



UNIVERSITAS INDONESIA

**NGO DAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT*: PERAN
WETLANDS INTERNATIONAL – INDONESIA PROGRAMME
DALAM MEREHABILITASI EKOSISTEM PESISIR DAN
MENGEMBANGKAN MATA PENCAHARIAN DI ACEH-NIAS
TAHUN 2005-2009 (PROYEK GREEN COAST)**

SKRIPSI

**Nike Qisthiarini
0606097120**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**NGO DAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT*: PERAN
WETLANDS INTERNATIONAL – INDONESIA PROGRAMME
DALAM MEREHABILITASI EKOSISTEM PESISIR DAN
MENGEMBANGKAN MATA PENCAHARIAN DI ACEH-NIAS
TAHUN 2005-2009 (PROYEK GREEN COAST)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial pada Program Studi Hubungan Internasional**

**Nike Qisthiarini
0606097120**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nike Qisthiarini

NPM : 0606097120

Tanda Tangan :



Tanggal : 25 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Nike Qisthiarini

NPM : 0606097120

Program Studi : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Judul Skripsi :

“NGO dan *Sustainable Development*: Peran Wetlands International – Indonesia Programme dalam Merehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Mengembangkan Mata Pencaharian di Aceh-Nias tahun 2005-2009 (Preoyek Green Coast)”

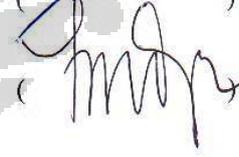
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Andi Widjajanto, M.Sc., M.A. ()

Sekretaris : Aninda R. Tirtawinata, M.Litt ()

Penguji Ahli : Andreas Pramudianto, S.H., M.Si. ()

Pembimbing : Ani Widyani Soetjipto, M.A. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 02 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena berkat kemudahan yang Allah berikan sehingga penulis mampu untuk mengerjakan skripsi pada waktunya. Skripsi ini ditujukan penulis untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Sosial dari Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Indonesia

Isu lingkungan merupakan isu yang selalu menarik untuk dibahas dalam studi hubungan internasional. Dalam kesempatan ini, penulis ingin melihat isu lingkungan pasca tsunami di Aceh dan Nias. Tsunami yang menghantam Aceh telah merusak wilayah Aceh termasuk ekosistem pesisir Aceh dan Nias. Ekosistem pesisir Aceh memiliki manfaat yang penting bagi masyarakat pesisir Aceh dan Nias terutama dalam perekonomian mereka. Namun, rehabilitasi ekosistem pesisir tidak menjadi perhatian bagi pemerintah. Dalam hal ini WI-IP sebagai salah satu NGO lingkungan mengadakan kegiatan rehabilitasi dan mengembangkan mata pencaharian masyarakat ekosistem pesisir.

Depok, 25 Juni 2012

Nike Qisthiarini

UCAPAN TERIMA KASIH

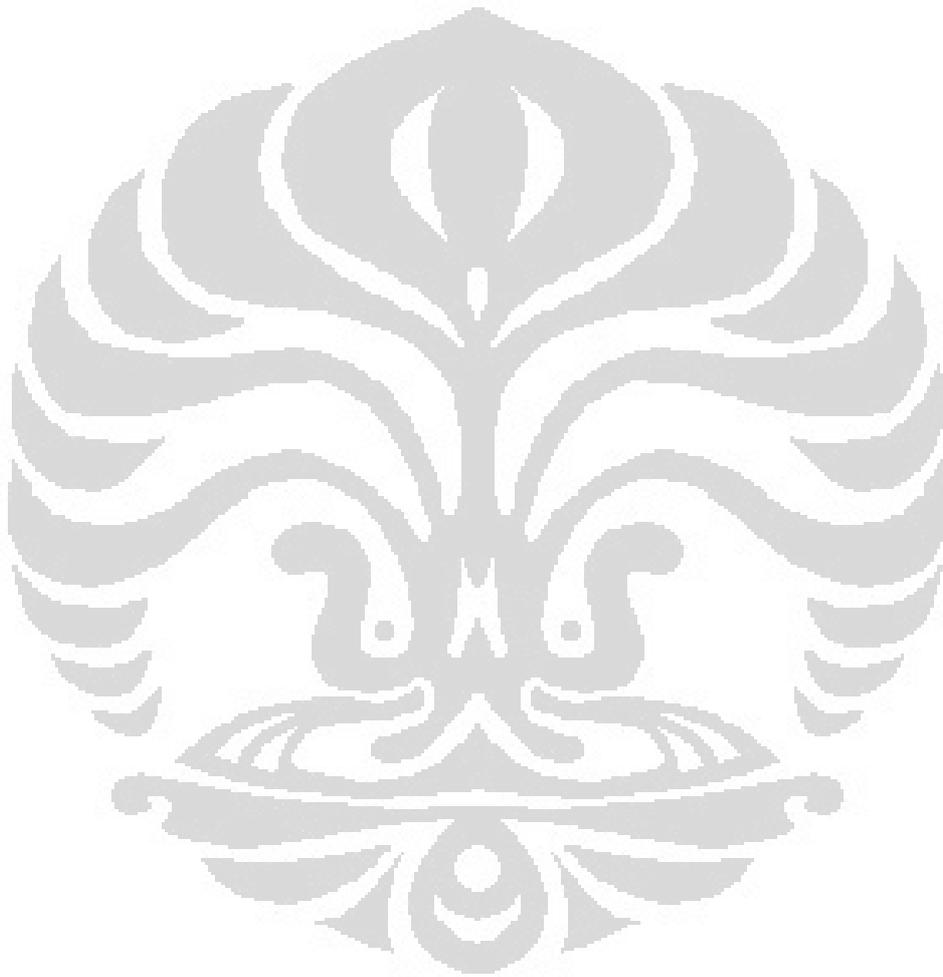
Alhamdulillahirabbil'alamin. Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan syukur sebesar-sebarnya kepada Allah SWT yang telah memberikan ridho dan kemudahannya dalam menuliskan skripsi ini. Perjalanan penulis sampai tahap ini sangat rumit dan panjang. Begitu berat proses yang penulis alami, tapi tanpa penulis sadari begitu banyak kemudahan yang Allah berikan kepada penulis. Penulis juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung selama proses penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Andi Widjajanto, M.Sc., M.A. selaku ketua program S1 Hubungan Internasional UI yang sudah memberikan kesempatan untuk penulis untuk dapat mengerjakan skripsi dan memberikan kemudahan bagi penulis sampai tahap ini.
2. Mba Ani selaku dosen pembimbing penulis, yang selalu berbaik hati menyempatkan waktunya yang sangat sibuk untuk membimbing penulis sampai penulis bias menyelesaikan skripsi ini.
3. Mba Amalia, selaku pembimbing terdahulu penulis. Mba lia terima kasih atas kebaikan hati mba lia telah membimbing penulis. Walaupun sempat tertunda, mba lia "Akhirnya aku bias menulis skripsi kembali".
4. Dosen-dosen HI, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Penulis tak lupa juga berterima kasih kepada Mbak Ayu yang berbaik hati dalam membantu penulis dan Mas Andre dan Mas Roni.
5. Buat teman-teman HI 2006 yang mendukung penulis untuk tetap tegar. Teman-teman senasib seperjuangan Lope, Soni, Agung, Aryo, Bas. Dan untuk teman HI penulis Uli, Ajeng, Jenny. Thanks.

6. Keluarga penulis, terutama mama tercinta yang selalu mengingatkan dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi. Penulis melakukan ini semua hanya demi mama. I love you Mom.

Depok, 25 Juni 2012

Nike Qisthiarini



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nike Qisthiarini
NPM : 0606097120
Program Studi : S1-Reguler Ilmu Hubungan Internasional
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“NGO dan *Sustainable Development*: Peran Wetlands International –
Indonesia Programme dalam Merehabilitasi Ekosistem Pesisir dan
Mengembangkan Mata Pencaharian di Aceh-Nias tahun 2005-2009 (Proyek
Green Coast)”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas karya akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 25 Juni 2012


Yang menyatakan

Nike Qisthiarini

ABSTRAK

Nama : Nike Qisthiarini
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul :

NGO dan *Sustainable Development*: Peran Wetlands International – Indonesia Programme dalam Merehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Mengembangkan Mata Pencaharian di Aceh-Nias tahun 2005-2009 (Proyek Green Coast)

Lingkungan dan pembangunan merupakan isu yang telah lama dibahas dalam masyarakat internasional. Dalam hal ini terdapat kesepakatan internasional bahwa keduanya harus diintegrasikan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Istilah pembangunan berkelanjutan di Indonesia sudah sejak lama dikenal namun sayangnya implementasinya di lapangan belum cukup baik. NGO sebagai salah satu aktor yang memiliki peran strategis banyak membantu dalam mendorong mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dalam hal ini kita dapat melihat upaya NGO dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dengan proyek-proyek yang dilaksanakan. Salah satu NGO yang mendorong mewujudkan upaya berkelanjutan adalah WI-IP. Lebih khusus, dapat dilihat dalam proyek Green Coast. Proyek Green Coast merupakan proyek rehabilitasi ekosistem pesisir pasca tsunami Aceh dan Nias. Proyek Green Coast merupakan proyek rehabilitasi ekosistem dengan menggabungkan upaya pemberdayaan ekonomi. Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai peran dan strategi WI-IP dalam proyek ini. Penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini memperlihatkan strategi yang digunakan WI-IP dalam proyek ini antara lain *information politics*, *leverage politics* dan *accountability politics*.

Kata kunci: NGO, wetlands international – Indonesia programme, aceh, tsunami, proyek green coast, sustainable development

ABSTRACT

Name : Nike Qisthiarini

Programme Study : International Relations

Tittle :

NGOs and Sustainable Development: The Role of Wetlands International - Indonesia Programme in Rehabilitating Coastal Ecosystems and Livelihoods in Aceh-Nias in 2005-2009 (Green Coast Project)

Environment and development is an issue that has long been discussed within the international community. In this case there is international agreement that they should be integrated to achieve sustainable development. The term sustainable development in Indonesia have long been known for implementation on the ground but unfortunately not good enough. NGOs as one of the actors who have a strategic role in encouraging a lot of help to achieve sustainable development in Indonesia. In this case we can see the efforts of NGOs in promoting sustainable development with projects undertaken. One NGO that encourages ongoing efforts to realize is WI-IP. More specifically, it can be seen in the Green Coast project. Green Coast Project is a project of post-tsunami rehabilitation of coastal ecosystems in Aceh and Nias. Green Coast project is the rehabilitation of the ecosystem by combining the efforts of economic empowerment. In this study, will discuss the role and WI-IP strategy in this project. The study is a qualitative research study using the literature. The results of this study show that the strategy used WI-IP in the project include information politics, leverage politics and accountability politics.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB 1: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Permasalahan.....	10
1.3 Asumsi Penelitian.....	10
1.4 Pertanyaan penelitian	10
1.5 Kerangka Konsep	11
1.5.1 NGO.....	11
1.5.2 Jejaring.....	13
1.5.3 Environmental Justice.....	15
1.5.4 Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>).....	18
1.6 Literature Survey	24
1.7 Metodologi Penelitian	27
1.8 Pembabakan.....	27
1.9 Tujuan dan Signifikansi.....	28
BAB 2: PROFIL WI-IP	29
2.1 Sejarah singkat, Visi, dan Misi.....	29

2.2	Strategi.....	30
2.3	Wetlands International dan perwakilannya di negara-negara	32
2.5	Pendanaan.....	33
2.6	Pendekatan Bio-rights.....	34

BAB 3: ACEH-NIAS PASCA TSUNAMI DAN PERAN WI-IP DALAM MEREHABILITASI EKOSISTEM PESISIR DAN MENGEMBANGKAN MATA PENCAHARIAN 2005-2009 (PROYEK GC)

3.1	Aceh-Nias Pasca Tsunami.....	41
3.2	WI-IP di Aceh Pasca Tsunami	48
3.2.1	Assessment.....	49
3.2.2	Proses Intervensi.....	51
3.2.3	Monitoring dan Evaluasi.....	60

BAB 3: ANALISA

4.1	Metode Kerja Advokasi.....	61
4.2	Jejaring.....	70
4.3	Transformasi Masyarakat dan Penerapan Prinsip <i>Sustainable Development</i> dalam Proyek Green Coast.....	75

BAB 4: Kesimpulan

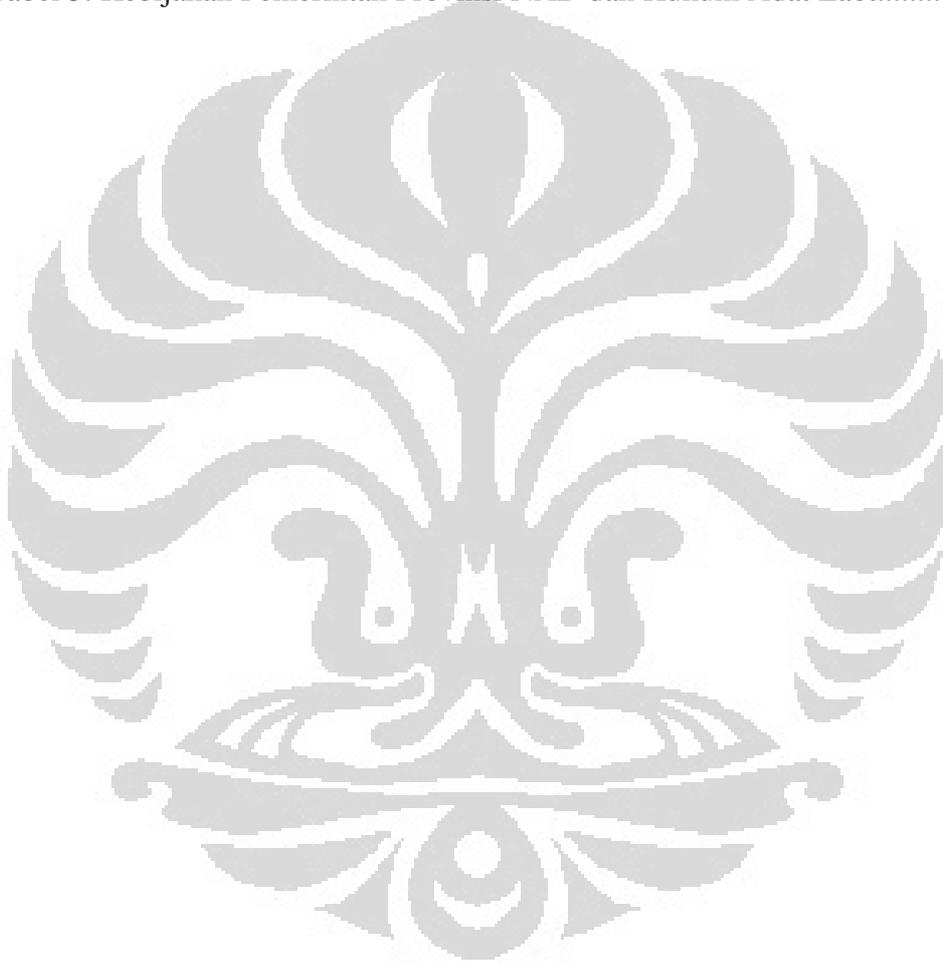
82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

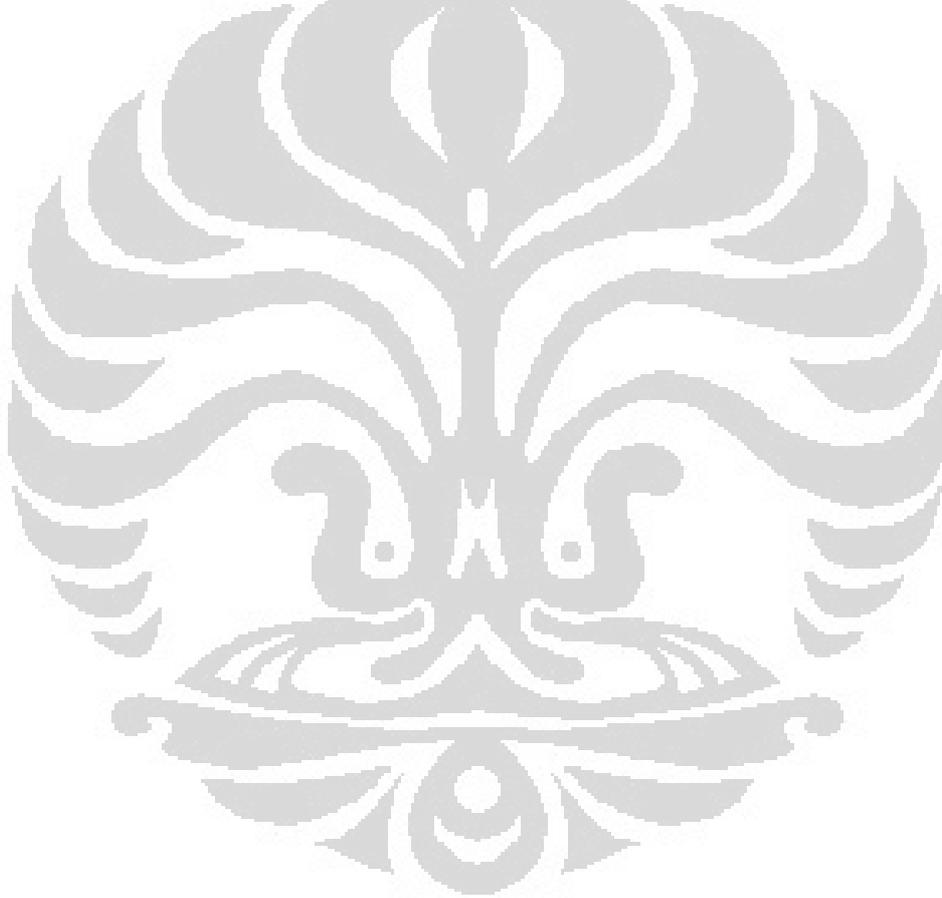
DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tiga Generasi Strategi Program Pembangunan NGO menurut Korten.....	12
Tabel 2. Luas Mangrove sebelum dan sesudah intervensi.....	76
Tabel 3. Pengembangan Mata Pencaharian GC 1.....	78
Tabel 4. Pengembangan Mata Pencaharian GC 2.....	79
Tabel 5. Kebijakan Pemerintah Provinsi NAD dan Hukum Adat Laot.....	80



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Segitiga Pembangunan Berkelanjutan.....	20
Gambar 2. Kerusakan Mangrove akibat Tsunami di Aceh Barat.....	42
Gambar 3. Perubahan Landscape di sepanjang pesisir Aceh akibat Tsunami.....	43
Gambar 4. Foto Satelit Kondisi Ulee Lheu Sebelum dan Sesudah Tsunami.....	44
Gambar 5. Lahan yang hilang di Aceh Barat akibat Tsunami.....	44
Gambar 6. Strategi <i>information politics</i> dalam Proyek GC.....	66
Gambar 7. Strategi <i>accountability politics</i> dalam Proyek GC.....	70



BAB I

Pendahuluan

1.1.Latar Belakang Permasalahan

Dalam fenomena yang terjadi dalam hubungan internasional, isu lingkungan menjadi isu yang sudah nyata keberadaannya. Munculnya isu lingkungan dalam studi Hubungan Internasional (HI) merupakan sebuah cermin perkembangan politik global. Isu-isu non-konvensional termasuk isu lingkungan mulai mencuat dalam hubungan internasional yang kuat dengan pandangan *state centrism* dan dominasi isu keamanan. Sejak tahun 1960an dan awal 1970an pergerakan lingkungan terus meluas menjadi lebih kompleks.¹ Termasuk munculnya karya-karya ilmiah tentang lingkungan sendiri pada awal tahun 1970, yang ikut mempengaruhi pergerakan lingkungan.² *The United Nations Conference on the Human Environment* yang diadakan pada tahun 1972 telah mendorong lingkungan menjadi isu besar di level internasional. Namun, akademisi HI sendiri belum mulai menulis tentang lingkungan sampai pada akhir tahun 1980 dimana muncul *concern* yang besar terhadap lingkungan dari publik dan pemerintah serta adanya *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) pada tahun 1992.³ Semenjak itu lingkungan menjadi sub-disiplin dari studi HI.

Salah satu isu yang mencuat dan menarik perhatian pada saat itu yaitu terkait lingkungan dan pembangunan, yang pada akhirnya dikenal istilah *sustainable development* sebagai sebuah strategi jangka panjang untuk solusi dari permasalahan yang muncul antara lingkungan dengan pembangunan. Perdebatan terkait hubungan degradasi lingkungan dan pembangunan sudah sejak lama berlangsung. Perhatian mengenai hal ini mulai kuat ketika beredarnya buku dan artikel pendobrak-paradigma yang membahas ketidakseimbangan antara

¹ Susan Buckingham dan Mike Turner, *Understanding Environmental Issues*, (London: Sage Publication Ltd, 2008), hlm.

² Kate O'Neill, *The Environment and International Relations*, (UK: Cambridge University Press), hlm.7-8

³ Susanne Jakobsen, "International Relations and Global Environmental Change", dalam *Cooperation and Conflict* (London: Sage Publications), Vol. 34(2), hlm. 206-207

kehidupan manusia dan lingkungan. Seperti, *'Silent Spring'* yang ditulis oleh Rachel Carson (1962) dan *'The Tragedy of the Commons'* oleh Garret Hardin (1968).⁴ Munculnya buku dan artikel tersebut membuat komunitas internasional mulai mengambil tindakan. Pada awal 1970an, perhatian mulai terfokus kepada lingkungan biofisik seperti isu manajemen keanekaragaman hayati, konservasi tanah, polusi air, degradasi tanah, dan desertifikasi – dan manusia yang dianggap merupakan akar penyebab permasalahan tersebut.⁵

Akibat perdebatan ini, di Barat muncul dua pemikiran sekolah yang prinsipal terkait penyebab degradasi lingkungan. Pertama, pandangan ini menyalahkan ketamakan dan pertumbuhan ekonomi sebagai penyebab degradasi lingkungan. Kedua, menyalahkan pertumbuhan populasi.⁶ Dari penelitian yang dilakukan, tanah di seluruh dunia mengalami degradasi sebesar 15%.⁷ Selain diakibatkan erosi oleh air dan angin, degradasi tanah ini juga disebabkan oleh penggunaan zat-zat kimia. Terancamnya kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati oleh tangan manusia juga menjadi permasalahan. Setiap tahunnya 6.000 jenis hewan punah yang terdiri dari 13% unggas, 25% mamalia dan 34% ikan.⁸ Sementara itu, dalam kurun waktu seratus tahun terakhir, pertumbuhan penduduk melonjak cepat terutama pada negara berkembang. Kenaikan jumlah penduduk ini antara lain disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, tidak memadainya jaminan sosial pada negara yang bersangkutan, budaya dan agama/kepercayaan, urbanisasi, dan diskriminasi terhadap wanita. Faktor tersebut menimbulkan tingkat pertumbuhan penduduk

⁴ UNEP, *Integrating Environment and Development: 1992-2002*. (*Silent Spring* merupakan buku yang ditulis oleh Carson, dalam buku ini ditulis bagaimana efek pestisida terhadap lingkungan dimana lebih lanjut Carson mengungkapkan penggunaan pestisida yang tidak terkontrol dan tidak teruji sangat berbahaya dan tidak hanya dapat membunuh binatang dan burung tetapi juga manusia. Sedangkan *The Tragedy of Commons* merupakan sebuah tulisan dari Hardin yang mengungkapkan bahwa *the tragedy of commons* adalah sebuah dilemma yang muncul akibat situasi dimana individu-individu yang terus bertambah --bertindak secara independen dan rasional menghasilkan kepentingan atau ketertarikan mereka sendiri-- yang akan menghabiskan sumberdaya yang terbatas, walaupun hal ini jelas tidak ada siapa pun yang menginginkan hal ini terjadi.)

⁵ UNEP, *Op.Cit*

⁶ Stanley Foundation, *Sixth Conference on the United Nations of the Next Decade*, (1971)

⁷ World Resources Institute (WRI), *World Resources 2000-2001: People and Ecosystems – The Fraying Web of Life*, (Washington DC, 2000)

⁸ *Ibid.*

yang tidak terkontrol, kemiskinan, dan kekurangan air yang tentunya berujung pada masalah kekurangan gizi pada manusia.⁹

Masalah lingkungan memang tidak dapat dilepaskan dari aktivitas yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya melalui sistem ekonominya dalam memproduksi barang dan jasa.¹⁰ Alam menyediakan sistem ekonomi dengan sumber daya alam berupa bahan baku dasar dan energi, baik yang dapat diperbaharui (dari hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan) maupun yang tidak dapat diperbaharui (batubara, minyak bumi) yang menjadi input bagi mesin ekonomi.¹¹ Sistem ekonomi kemudian mentransformasikan input ini menjadi output untuk memenuhi kebutuhan manusia (kayu menjadi kertas, minyak bumi menjadi BBM). Selain itu, alam juga memberikan servis dalam memungkinkan sistem ekonomi menjalankan aktivitasnya. Dukungan ini dapat berupa regulasi iklim, operasi dari siklus air, regulasi dari komposisi gas-gas di atmosfer, siklus nutrisi, dan lainnya. Tanpa adanya berbagai dukungan ini kelangsungan hidup manusia tidak dapat terjaga, apalagi sampai mampu menjalankan sistem ekonomi. Alam juga memberikan manusia nilai kepuasan yang dapat dinikmati secara langsung (*amenity values*).¹² Manusia akan mendapatkan kepuasan dengan melihat langsung atau menikmati keindahan alam misalnya dengan mendaki gunung, memancing dan lainnya. Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat memang tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumberdaya alam. Namun, eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan justru mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Hubungan dan keterkaitan antara lingkungan dan pembangunan inilah yang menjadi perhatian dan ketertarikan komunitas internasional untuk membahas permasalahan ini lebih lanjut.

⁹ M. Fani Cahyandito, "Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi dan Ekologi: Sustainability Communication dan Sustainability Reporting", diakses dari http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/06/jurnal_lmfe_pemb_berkelanjutan-ekonomiekologi-sust_comm-sust_rep_fani.pdf, pada tanggal 25 Mei 2012, pukul 15.16 WIB (M. Fani Cahyandito adalah pengajar Magister Sains Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung).

¹⁰ N Hanley, J F Shogren, B White, *Introduction to Environmental Economics*, (New York: Oxford University Press, 2001)

¹¹ M. Fani Cahyandito, *Loc.Cit.*

¹² M. Fani Cahyandito, *Loc.Cit.*

Selain lahirnya dua pandangan yang berbeda, muncul pula sebuah studi yang sangat terkenal pada masa itu. *The Club of Rome* menjadi kelompok yang menarik perhatian dunia karena publikasi mereka yang fenomenal. *The Club of Rome* merupakan asosiasi internasional informal yang terdiri tidak lebih dari 100 ilmuwan, eksekutif bisnis, pelajar yang memiliki perhatian terhadap sistem pembangunan global.¹³ Publikasi pertama mereka, yaitu sebuah buku yang berjudul *the Limits to Growth* pada tahun 1972. Dalam buku ini dipaparkan lima variabel analisis yaitu teknologi, populasi, nutrisi, sumber daya alam, dan lingkungan. Kesimpulan utama adalah apabila tren pada saat itu terus berlangsung, sistem global akan melampaui batas dan runtuh pada tahun 2000, dimana diproyeksikan bahwa stagnansi ekonomi di masa depan adalah sebagai akibat dari pola pembangunan ekonomi yang ada dan kerusakan lingkungan. Walaupun mendapat banyak kritik, *the Limits to Growth* merupakan publikasi pertama mengenai konsep *outer limit* – gagasan dimana pembangunan dapat terlimitasi oleh sumber daya di bumi yang tidak abadi.

Terbitnya *the Limits to Growths* menambah panjang perdebatan mengenai permasalahan lingkungan dan pembangunan, sampai pada akhirnya perbincangan mengenai *sustainable development* kemudian mulai mencuat pada awal 1980an, terutama ketika *World Commision on Environment dan Development* (WCED) atau dikenal juga dengan *Brundtland Commission* dibentuk pada tahun 1983. *Brundtland Commission* dibentuk untuk mengadakan dengar pendapat dan mempublikasikan laporan formal yang berisikan temuan-temuan. Setelah kurang lebih tiga tahun mengadakan pertemuan dengan pemimpin-pemimpin negara dan publik, *Brundtland Commission* mempublikasikan laporan final yaitu “*Our Common Future*”.¹⁴ Dalam laporan ini dikatakan adanya relasi yang kuat antara masalah kelaparan, kemiskinan, hutang luar negeri, pertumbuhan ekonomi dan persoalan kerusakan lingkungan. Lebih lanjut, dalam laporan ini dijelaskan bahwa keberlanjutan ekologi tidak akan tercapai apabila permasalahan

¹³ Carl Mitcham, “The Concept of Sustainable Development: Its origins and Ambivalence”, dalam *Thechnology in Society*, Vol.17, No.3, (USA: Elsevier Science Ltd, 1995), hlm. 314

¹⁴ Chris Sneddon, Richard B Howarth, Richard B Norgaad, “Sustainable Development in a Post-Brundtland World”, dalam *Ecological Economics*, Vol.57, (USA: Elsevier Science Ltd, 2006), hlm. 253-254

kemiskinan di dunia tidak dapat diselesaikan, dan kedua masalah ini harus diselesaikan secara bersama.¹⁵ Perbincangan mengenai *sustainable development* kemudian semakin diintensifkan dalam *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) atau dikenal dengan *Earth Summit* yang dilaksanakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992.¹⁶

Konferensi ini setidaknya menghasilkan tujuh pencapaian, yaitu Deklarasi Rio untuk Lingkungan dan Pembangunan (terdiri dari 27 prinsip); Agenda 21 – sebuah *blueprint* untuk lingkungan dan pembangunan di abad 21; Dua konvensi internasional –*the United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) dan *the Convention on Biological Diversity* (CBD); Komisi Pembangunan Berkelanjutan (*the Commission on Sustainable Development* --CSD); Perjanjian untuk negosiasi konvensi desertifikasi dunia; Pernyataan prinsip untuk Manajemen Berkelanjutan untuk Kehutanan. Selain itu, juga dibentuk *Global Environment Facility* (GEF). GEF sebenarnya diciptakan pada tahun 1991 sebagai kerja sama uji coba yang melibatkan UNEP, UNDP dan World Bank untuk menyelamatkan ekologi dari pembangunan lokal dan regional dengan menyediakan dana bantuan dan pinjaman dengan bunga yang rendah untuk membangun bangsa dan ekonomi sebagai transisi. Menurut konferensi, GEF diinisiasikan menjadi mekanisme finansial dari Agenda 21. GEF membantu dana proyek pembangunan nasional, regional, dan global yang mana juga memberikan keuntungan kepada lingkungan dalam empat area (perubahan iklim, keanekaragaman hayati, ozon, dan air) – dan sebagaimana juga membantu ekonomi lokal dan masyarakat. Mekanisme finansial seperti ini kemudian banyak dikembangkan dalam upaya konservasi lingkungan dan upaya pengentasan kemiskinan sebagai salah satu strategi penerapan *sustainable development* yang sering sekali ditemui sekarang ini. Sepuluh tahun setelah UNCED, diselenggarakan *World Summit Sustainable Development* (WSSD) di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2002. Dalam WSSD ini dibahas mengenai evaluasi terhadap efektivitas hasil pertemuan Rio. Hasil penting dari

¹⁵ Chris Sneddon, Richard B Howarth, Richard B Norgaard, *Op.Cit*, hlm. 372

¹⁶ William Mark Adam, *Green Development: Environment and Sustainability in the Third World*, (London: Routledge, 1990)

konferensi ini adalah *Political Declaration* dan *Johannesburg Plan of Implementation* (JPOI). *Political declaration* tersebut terdiri atas enam bagian yang intinya berupa komitmen untuk melaksanakan JPOI dengan penetapan kerangka waktu untuk mewujudkan capaian-capaian yang terkandung di dalamnya.

Selain pencapaian-pencapaian tersebut, yang menarik untuk diperhatikan dari konferensi tersebut dan dalam kerangka *sustainable development* adalah keterlibatan NGO. Sebanyak lebih dari 1.400 NGO yang menghadiri UNCED. UNCED sendiri merupakan konferensi internasional, intergovernmental pertama yang memberikan akses penuh kepada NGO-NGO.¹⁷ Partisipasi NGO dalam politik lingkungan global memang meningkat sejak beberapa abad yang lalu. Akademisi yang tertarik pada peran NGO dalam isu lingkungan global juga meningkat, dimana banyak studi yang menyatakan NGO sebagai aktor penting dan memberikan pengaruh dalam keputusan pemerintah dalam mengembangkan kebijakan domestik untuk melindungi sumberdaya alam dan negosiasi perjanjian internasional.¹⁸ Partisipasi NGO dalam politik lingkungan global dapat dilihat seperti mereka mencoba untuk meningkatkan kepedulian terhadap isu lingkungan; mereka melobi pengambil keputusan negara NGO dengan harapan dapat mempengaruhi kebijakan domestik dan luar negeri terkait lingkungan; mereka berkoordinasi melakukan pemboikotan dalam upaya menghentikan kerusakan lingkungan; mereka berpartisipasi dalam negosiasi lingkungan dalam level internasional; dan mereka membantu memonitor dan melaksanakan perjanjian internasional.¹⁹ Dari partisipasi ini penting untuk diketahui bahwa aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan oleh NGO-NGO dalam arena politik yang berbeda yang melibatkan juga tujuan, strategi dan dinamika politik yang unik dan berbeda. Dalam kaitannya dengan *sustainable development sendiri*, NGO memiliki keunggulan dan keterlibatan yang aktif, seperti mereka kuat mengarahkan

¹⁷ Robert W Kates, Thomas M Parris dan Anthony A Leiserowitz, "What is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice", dalam *Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, Vol.47, No.3, April 2005, hlm. 18

¹⁸ Michele M. Betsill dan Elisabeth Corell, "NGO Influence in International Environmental Negotiations: A Framework for Analysis", dalam *Global Environmental Politics*, (Massachusetts Institute of Technology, 2001), hlm. 67

¹⁹ *Ibid.*

masyarakat terpencil dan miskin, mereka membantu melakukan empowerment kepada orang-orang miskin dan mereka bekerja sama dan menguatkan institusi local, mereka melakukan proyek dengan biaya yang rendah dan lebih efisien daripada lembaga pemerintah; mereka mempromosikan *sustainable development*.²⁰

Di Indonesia sendiri, keterlibatan dan peran NGO dalam implementasi *sustainable development* cukup besar. Walaupun konsep *sustainable development* bukan hal yang baru di Indonesia, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dipahami dengan baik. Perbincangan tentang *sustainable development* sudah dibahas di Indonesia semenjak *The United Nations Conference on the Human Environment* pada tahun 1972, namun sampai sekarang masih menjadi masalah yang belum dapat diwujudkan secara baik.²¹ Implementasi *sustainable development* memang tidak mudah tetapi bukan berarti hal ini tidak dapat dicapai. Dalam hal ini keterlibatan NGO dalam berbagai program atau proyek yang mereka lakukan cukup banyak memberikan harapan untuk tercapainya *sustainable development*. Salah satu NGO yang aktif dalam penerapan *sustainable development* adalah WI-IP (*Wetlands International – Indonesia Programme*).

WI-IP merupakan NGO yang sudah banyak melakukan penelitian dan melaksanakan program terkait lingkungan khususnya mencakup lahan basah. Tidak hanya itu, WI-IP juga berhasil mengembangkan mekanisme pendanaan inovatif yang disebut dengan *Bio-rights*. *Bio-rights* pada dasarnya merupakan sebuah mekanisme pendanaan inovatif untuk mengatasi kerusakan lingkungan dengan cara menyediakan kredit (yang bisa diubah statusnya menjadi hibah).²² Semua prasyarat (hak dan kewajiban) kelompok masyarakat untuk dapat menerima bantuan modal usaha yang dikaitkan dengan keberhasilan rehabilitasi dituangkan dalam suatu kontrak kerja yang disaksikan tokoh masyarakat. Adapun

²⁰ P Streeten, "Non-governmental Organizations and Development", dalam *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 554, hlm. 193-210

²¹ Abdurrahman, "Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia", dalam *Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 14-18 Juli 2003, hlm. 3

²² Pieter van Ejjik dan Ritesh Kumar, *Bio-rights dalam Teori dan Praktek: Sebuah Mekanisme Pendanaan untuk Pengentasan Kemiskinan dan Konservasi*, (Netherlands: Wetlands International, 2008), hlm. 15

syarat kredit mikro ini dapat sepenuhnya menjadi hibah apabila masyarakat berhasil mempertahankan tanaman rehabilitasi dengan tingkat keberhasilan hidup biasanya mencapai lebih dari 75% (sesuai dengan kesepakatan). Namun sebaliknya, jika gagal mempertahankan jumlah di atas (75%) masyarakat diwajibkan mengembalikan modal usaha secara proporsional kepada pihak proyek.²³ Dengan pendekatan ini upaya rehabilitasi ekosistem dapat melibatkan masyarakat secara aktif, di mana masyarakat juga mendapatkan edukasi mengenai pentingnya menjaga ekosistem pesisir tanpa mengurangi manfaat yang bisa diambil dari ekosistem ini.

Keterlibatan WI-IP dalam pelaksanaan *sustainable development* secara nyata dapat dilihat dalam Proyek Green Coast (GC). Proyek GC merupakan proyek yang dibentuk atas respon terhadap bencana tsunami yang melanda Aceh-Nias pada tahun 2004. Bencana tsunami tidak hanya menelan banyak korban jiwa dan merusak infrastruktur, ekosistem pesisir Aceh-Nias juga mengalami kerusakan yang sangat parah. Menurut BRR, kerusakan lahan mangrove pasca tsunami di Aceh mencapai 20.000 ha dari luas lahan mangrove 53.512 ha (termasuk hasil konversi mangrove menjadi tambak seluas 27.592 ha).²⁴ Ekosistem pesisir sendiri memiliki fungsi yang sangat krusial bagi masyarakat pesisir, terutama sebagai mata pencaharian yang juga terganggu bahkan hilang akibat tsunami. Kerusakan ekosistem pesisir tidak hanya menimbulkan kerugian bagi masyarakat tetapi juga berdampak pada keanekaragaman hayati yang bergantung pada ekosistem ini dan berdampak luas bagi bumi.²⁵ Dengan melihat pentingnya ekosistem ini untuk keanekaragaman hayati dan juga perekonomian masyarakat pesisir, proyek GC ini pun dibentuk.

Proyek GC sendiri dipimpin oleh WI-IP dengan bekerjasama dengan WWF, dan beberapa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) lokal serta kelompok masyarakat mandiri. Selain itu, Oxfam Novib juga memberikan dukungan dengan

²³ Pieter van Ejjik dan Ritesh Kumar, *Op.Cit.*, hlm. 140

²⁴ BRR, Laporan Akhir BRR NAD-Nias: Perwakilan Nias 2005-2008, (Desember 2008)

²⁵ Gandi Y. S. Purba, "Peran Laut dan Ekosistem Pesisir dalam Mengurangi Pemanasan Global", dalam *Warta Konservasi Basah*, Juli 2009, hlm. 18. Ekosistem mangrove ikut berperan dalam mengurangi pemanasan global dengan menyerap proses fotosintesis. Proses fotosintesis pada mangrove berperan besar dalam mengurangi peningkatan CO₂ di atmosfer yang berakibat terjadinya pemanasan global.

menjadi donor dalam Proyek GC ini.²⁶ Tujuan yang ingin dicapai dalam program ini adalah merehabilitasi ekosistem pesisir sebagai basis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih lanjut.²⁷ Dimana diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam rehabilitasi. Berdasarkan tujuan tersebut terdapat empat kegiatan utama yang dikembangkan dalam proyek ini, yaitu:²⁸

1. Rehabilitasi ekosistem pesisir.
2. Pengembangan mata pencaharian ramah lingkungan.
3. Penyusunan peraturan desa yang mendukung upaya pelestarian lingkungan
4. Kampanye pendidikan lingkungan.

Dengan menggabungkan upaya konservasi lingkungan dan upaya meningkatkan kesejahteraan melalui penggunaan Bio-rights, WI-IP dengan proyek GC ini tidak hanya bertujuan untuk merehabilitasi ekosistem pesisir yang rusak akibat tsunami tetapi juga mengembangkan mata pencaharian masyarakat pesisir sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keberlangsungan ekosistem pesisir yang sejalan dengan prinsip *sustainable development*.

1.2. Rumusan Masalah

Perdebatan antara lingkungan dan pembangunan sudah berlangsung sejak lama dan masih menjadi polemik sekarang ini. Konsep *sustainable development* yang lahir sebagai sebuah upaya untuk memecahkan permasalahan yang muncul diantara lingkungan dan pembangunan. Pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa merugikan kebutuhan generasi-generasi mendatang merupakan merupakan salah satu harapan dari *sustainable development*. Penerapan *sustainable development* sendiri tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan dan peran NGO. Di Indonesia, peran NGO terkait *sustainable development* salah satunya dapat dilihat dari berbagai program yang mereka lakukan. WI-IP merupakan salah satu NGO yang aktif dan *concern* terhadap pencapaian *sustainable development* di Indonesia,

²⁶ WI-IP, *Ringkasan Profil Kegiatan WI-IP 2005-2009*, (Wetlands International)

²⁷ "Green Coast Goals", diakses dari

<http://www.wetlands.org/Whatwedo/Ouractions2/GreenCoastscommunitybasedrestoration/GreenCoastTsunamiresponse/tabid/438/language/en-US/Default.aspx>, pada tanggal 01 Februari 2012, pukul 5.10 WIB

²⁸ "Empat Tahun Partisipasi Proyek Green Coast Dalam Upaya Rehabilitasi Pesisir Aceh dan Nias Pasca Tsunami", dalam *Warta Konsevasi Lahan Basah*, Juli 2009, hlm. 8

seperti dilaksanakannya proyek GC. Proyek GC merupakan proyek yang bertujuan untuk merehabilitasi ekosistem pesisir sekaligus ikut mengembangkan mata pencaharian masyarakat pesisir dengan tetap memperdulikan ekosistem pesisir. WI-IP dengan menggunakan pendekatan Bio-rights dalam proyek GC, upaya konservasi lingkungan dan upaya peningkatan kesejahteraan disatukan sebagai wujud pelaksanaan *sustainable development*. Latar belakang inilah yang membuat penulis memiliki ketertarikan untuk mempertanyakan **“Bagaimana Peran WI-IP dalam Merehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Mengembangkan Mata Pencaharian di Aceh-Nias pada tahun 2005-2009 (Proyek Green Coast)?”**. Pertanyaan turunan pertama, apa strategi dan kegiatan yang dilakukan oleh WI-IP dalam proyek ini. Kedua, bagaimana kerja sama (*netwoking*) yang terjalin antara WI-IP dengan aktor-aktor lainnya dalam proyek ini.

1.3. Asumsi Penelitian

Kerusakan ekosistem pesisir di Aceh dan Nias pasca tsunami pada tahun 2004 memerlukan peran strategis dari CSO, dalam hal ini NGO lingkungan.

1.4. Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang, rumusan masalah dan asumsi penelitian di atas, ada pun pertanyaan penelitian dalam tulisan ini adalah:

1. Apakah peran WI-IP dalam Proyek Green Coast di Aceh-Nias pada tahun 2005-2009?
2. Apakah strategi WI-IP dalam proyek ini?
3. Bagaimanakah sinergi antara WI-IP dengan aktor lainnya dalam proyek ini?

1.5. Kerangka Konsep

1.5.1. NGO (*Non-Governmental Organisation*)

Terdapat beberapa istilah yang melekat dalam NGO seperti '*non-profit*', '*voluntary*', dan '*civil society*'.²⁹ Selain itu, terdapat karakteristik yang mendasar dari NGO, yaitu independen dari kontrol langsung negara.³⁰ Sementara itu, menurut Welch, NGO berfungsi sebagai penghubung antara dunia pemerintahan yang kompleks dan asing dengan ranah kelompok sosial dan ekonomi yang dekat dengan dan dikenal oleh masyarakat.³¹

Menurut Korten, setidaknya perkembangan evolusi NGO dapat dibagi menjadi tiga, yang diistilahkan dengan tiga "generasi".³² Perkembangan NGO ini terkait erat dengan strategi program pembangunan NGO. NGO generasi pertama, yang muncul akibat Perang Dunia pertama, memiliki perhatian utama dalam isu bantuan kemanusiaan dan kesejahteraan. Sehingga, pelayanan lebih terfokus pada pemenuhan kebutuhan yang mendesak dalam konteks bencana alam atau situasi krisis, seperti pendistribusian makanan, pengiriman tim medis, dan penyediaan tempat tinggal – yang semua didanai oleh kontribusi privat. Perhatian terfokus pada individual atau keluarga dan keuntungan yang mereka terima tergantung pada kehadiran dan sumber dari NGO itu sendiri. Menurut Korten NGO generasi pertama memiliki kekurangan sebuah teori pembangunan yang koheren dan strategi jangka panjang. Sementara upaya-upaya yang dilakukan NGO ini adalah pemenuhan kebutuhan yang mendesak bahkan akut, pendekatan ini tidak merumuskan dampak jangka panjang kemiskinan dan pembangunan.

²⁹ Ibid, hlm. 7

³⁰ Peter Willets, *Ibid*.

³¹ Claude E. Welch, *Protecting Human Rights in Africa: Roles and Strategies of Non-governmental Organizations*, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1995)

³² David C. Korten, "Third Generation NGO Strategies: A Key to People-centered Development", dalam *World Development*, Vol. 15, 1987, hlm 147-149

Tabel 1. Tiga Generasi Strategi Program Pembangunan NGO menurut Korten.

	First generation	Second generation	Third generation
Defining features	Relief and welfare	Small-scale self reliant local development	Sustainable systems development
Problem definition	Shortages of goods and services	Local inertia	Institutional and policy constraints
Time frame	Immediate	Project life	Indefinite long-term
Spatial scope	Individual or family	Neighborhood or village	Region or nation
Chief actors	NGO	NGO + beneficiary organizations	All public and private institutions that define the relevant system
Development education	Straving children	Community self- help iniatiatives	Failure in interdependent systems
Management orientation	Logistics management	Project management	Strategic management

Menyadari kekurangan dari generasi pertama, NGO generasi kedua pada tahun 1970an memfokuskan organisasi mereka kepada proyek pembangunan masyarakat. Pendekatan seperti ini berbeda dari sebelumnya, dimana perhatian difokuskan kepada peningkatan kapasitas. Sehingga, upaya-upaya yang dilakukan ditekankan pada pembangunan kelompok mandiri dalam level lokal atau desa. NGO generasi kedua seringkali juga menjalankan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Lebih lanjut, inisiatif pembangunan merupakan hasil dari kerjasama yang terbangun antara NGO dan masyarakat lokal. Menjelaskan mengenai NGO generasi kedua, Korten menyatakan strategi generasi kedua berbeda dimana mereka fokus pada pembangunan sumberdaya manusia atau *empowerment* sebagai isu sentral.

Namun, beberapa dekade kemudian, NGO mulai mempertanyakan dan mengevaluasi kembali pendekatan mereka terhadap pembangunan. NGO generasi ketiga ini menyadari bahwa upaya sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang masih terlimitasi. Korten menyatakan sejumlah NGO mulai menyadari mereka membutuhkan kepemimpinan yang lebih besar lagi dalam merumuskan disfungsi dari aspek-aspek kebijakan dan sektor-sektor di dalamnya di mana mereka bekerja. NGO generasi ketiga ini lebih memiliki peran *foundation-like* daripada peran pelayanan operasional. NGO generasi ketiga ini lebih meliputi mobilisasi *grassroots* dan advokasi kebijakan.

Terkait dengan NGO lingkungan sendiri, secara umum NGO lingkungan dapat dibagi menjadi tiga kategori.³³ Pertama, kategori *campaigners*. NGO yang termasuk dalam kategori *campaigners* merupakan kelompok NGO yang dikenal umum oleh masyarakat dan memiliki hubungan langsung dengan publik. Kelompok inilah yang biasanya aktif memberikan informasi maupun menggerakkan masyarakat dalam suatu isu perjuangan. Kedua, kategori *think-thank*. NGO yang termasuk dalam kategori *think-tank* merupakan kelompok NGO yang terdiri dari ilmuwan serta analis profesional. Kelompok ini biasanya terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan melalui dialog teknis mengenai isu tertentu dengan pihak-pihak tertentu, seperti sektor privat maupun pemerintah. Ketiga, kategori *business alliance*. NGO yang termasuk dalam kategori *business alliance* merupakan NGO yang berafiliasi dan mewakilkan kepentingan komunitas bisnis tertentu.

1.5.2. Jejaring³⁴

Menurut Sikkink dan Keck, *transnational advocacy network* merupakan struktur komunikasi di mana anggota-anggota termotivasi oleh “shared principled ideas/values”. Di mana terdapat pertukaran informasi dan layanan secara sukarela,

³³ Clair Gough and Simon Shackley, “The Respectable Politics of Climate Change: The Epistemic Communities and NGOs”, dalam *Royal Institute of International Affairs 1944*, Vol. 77, No. 2 (Apr., 2001), hlm. 329-345

³⁴ Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1998)

respirokal, dan horisontal. Aktor-aktor dalam jejaring advokasi transnasional dapat mencakup (1) NGO internasional dan lokal, organisasi advokasi dan penelitian; (2) gerakan sosial lokal; (3) foundations; (4) media; (5) gereja-gereja, intelektual; (6) bagian organisasi intergovernmental regional dan internasional; (7) bagian dari eksekutif dan atau palementer. Tidak semua aktor-aktor tersebut dapat ditemui dalam jejaring advokasi, namun NGO memiliki peran sentral dalam kebanyakan jejaring advokasi. NGO dalam hal ini biasanya memperkenalkan gagasan baru, menyediakan informasi, dan melakukan lobi untuk perubahan kebijakan.

Jejaring advokasi transnasional biasanya muncul dimana (1) saluran antara kelompok domestik dan pemerintah mereka terhalang dimana saluran tersebut tidak efektif dalam menyelesaikan konflik; (2) aktivis percaya jejaring tersebut akan memajukan misi dan kampanye mereka, dan secara aktif mempromosikan mereka; (3) konferensi internasional dan bentuk pertemuan internasional lainnya menciptakan arena untuk membentuk dan menguatkan jejaring. Sikkink dan Keck mengembangkan tipologi jenis taktik yang digunakan dalam jejaring, yang meliputi (a) *information politics*, atau kemampuan untuk memindahkan informasi yang berguna dengan cepat dan kredibel ke tempat yang dapat memberikan dampak yang besar; (b) *symbolics politics*, atau kemampuan untuk menggunakan simbol, aksi atau cerita yang masuk akal dari sebuah situasi atau klaim untuk pertemuan seringkali jauh jaraknya; (c) *leverage politics*, atau kemampuan untuk menggunakan aktor yang kuat untuk mempengaruhi situasi di mana anggota terlemah dari jejaring tidak mungkin memiliki pengaruh; (d) *accountability politics*, atau usaha untuk mengharuskan aktor yang kuat untuk bertindak sesuai dengan prinsip yang sudah mereka sahkan secara formal.

Banyak jejaring advokasi transnasional yang menghubungkan aktivis-aktivis di negara maju dengan aktivis lainnya di negara berkembang. Hal ini memungkinkan untuk mempengaruhi perilaku negara. Ketika hubungan antara negara dan aktor domestik mengalami kebuntuan, NGO domestik biasanya langsung mencari sekutu internasional untuk mencoba memberikan tekanan kepada negara mereka dari luar. Hal ini yang disebut dengan pola 'boomerang' dari karakteristik pengaruh jejaring advokasi transnasional bekerja, dimana

mereka menargetkan kegiatan mereka untuk mengubah perilaku sebuah negara. Untuk menilai pengaruh jejaring advokasi harus dilihat pada tujuan pencapaian pada berbagai level yang berbeda. Sikkink dan Keck mengidentifikasi beberapa tipe atau tingkatan pengaruh jejaring, yaitu (1) penciptaan isu dan agenda setting; (2) pengaruh pada posisi yang tidak berkesinambungan antara negara dan organisasi regional dan internasional; (3) pengaruh pada perubahan kebijakan terhadap aktor yang ditargetka, yang bisa saja negara, organisasi internasional atau regional, atau aktor privat; (4) pengaruh pada perilaku negara.

1.5.3. Environmental Justice

Environmental justice seringkali merujuk kepada gerakan politik dan sosial yang memiliki fokus terhadap distribusi kerugian lingkungan dan keuntungan yang tidak sama di dalam masyarakat dan untuk mereformasi proses pembuatan keputusan terkait isu lingkungan sehingga masyarakat juga memiliki hak untuk berpartisipasi.³⁵ *Environmental justice* muncul sebagai konsep pada awal 1980an, didorong oleh kebencian yang memuncak di dalam masyarakat Afrika-Amerika, Hispanik dan masyarakat asli yang menjadi sasaran industri berbahaya dan polusi yang ada terutama di lingkungan mereka. Hal ini kemudian mendorong munculnya gerakan *environmental justice* yang mengadopsi hak-hak sipil dan pendekatan keadilan sosial dalam *environmental justice* dan bertumbuhnya dari puluhan bahkan ratusan perjuangan lokal, peristiwa dan berbagai gerakan sosial lainnya. Terdapat beberapa konferensi dan aktivitas *grassroots* penting yang memunculkan gerakan *environmental justice*. Salah satu konferensi yang dilaksanakan terkait isu ini adalah konferensi yang diadakan oleh Universitas Michigan dengan tema “*Race and the Incidence of Environmental Hazards and Issues*”.³⁶ Konferensi ini merupakan konferensi akademik pertama yang diadakan terkait dengan subjek ini, walau pun sebelumnya telah ada tulisan yang berjudul “*Policies and Solutions for Environmental Justice*”. Dalam konferensi yang diadakan pada tahun 1990 tersebut terdapat dua hasil yang

³⁵ Clifford Rechtschaffen, Eileen Guana, dan Catherine A. O’Neill, “Environmental Justice” dalam *Publication of Golden Gate University School of Law*, 2005, hlm. 2

³⁶ Bunyan Bryant, *Environmental Justice: Issues, Policies, and Solutions*, (U.S.: Island Press, 1995), hlm. 4-5

signifikan yaitu (1) buku bacaan mengenai “*Race and the Incidence of Environmental Hazards*” dan (2) pertemuan kebijakan dengan U.S. Environmental Protection Agency Administrator Reilly.

Di Amerika Serikat, *environmental justice* terfokus pada dimensi persamaan dan keadilan dalam kebijakan lingkungan. Hal ini berbasis pada kesadaran bahwa biaya dan keuntungan tidak didistribusikan secara adil dan merata. *Environmental justice* sendiri memang sering diidentikkan dengan *environmental racism* dan (*environmental equity*). Namun, Bryant membedakan ketiga konsep tersebut.³⁷

“Environmental Racism: It is an extension of racism. It refers to those institutional rules, regulations, and policies or government or corporate decisions that deliberately target certain communities for least desirable land uses, resulting in the disproportionate exposure of toxic and hazardous waste on communities based upon certain prescribed biological characteristics. Environmental racism is the unequal protection against toxic and hazardous waste exposure and the systematic exclusion of people of color from environmental decisions affecting their communities.”

“Rasisme lingkungan: merupakan perluasan dari rasisme. Merujuk kepada peraturan kelembagaan, regulasi, dan kebijakan atau keputusan pemerintah atau perusahaan yang sengaja menargetkan komunitas untuk penggunaan lahan diinginkan yang sedikit, menghasilkan eksposur limbah beracun dan berbahaya yang tidak proporsional pada komunitas tertentu berdasarkan karakter biologis. Rasisme lingkungan adalah perlindungan yang tidak sama melawan eksposur limbah beracun dan berbahaya dan pengesampingan sistematis orang kulit berwarna dari keputusan lingkungan yang mempengaruhi komunitas mereka.”

“Environmental Equity: Environmental equity refers to the equal protection of environmental laws. For example, under the Superfund clean-up program it has been shown that abandoned hazardous waste sites in minority areas take 20 percent longer to be placed on the national priority action list than those in white areas. It has also been shown that the government’s fines are

³⁷ Bunyan Bryant, *Op.Cit*, hlm. 5-6

six times greater for companies in violation of RCRA in white than in black communities. This is unequal protection. Therefore laws should be enforced equally to ensure the proper siting, clean up of hazardous wastes, and the effective regulation of industrial pollution, regardless of the racial and economic composition of the community.”

“Ekuitas Lingkungan: Ekuitas Lingkungan merujuk pada perlindungan terhadap hukum lingkungan yang sama. Misalnya, di bawah program the Superfund clean-up telah menunjukkan bahwa limbah beracun dan berbahaya yang ditinggalkan di daerah minoritas membutuhkan 20 persen lebih lama untuk ditempatkan pada daftar prioritas aksi nasional dibandingkan daerah putih. Ini juga telah menunjukkan bahwa denda pemerintah adalah enam kali lebih besar bagi perusahaan yang melanggar RCRA putih daripada di komunitas berwarna. Ini adalah perlindungan yang tidak setara. Oleh karena itu, hukum harus dijalankan dengan adil untuk memastikan jumlah yang sesuai, membersihkan limbah berbahaya, dan regulasi polusi industri yang efektif, terlepas dari komposisi ras dan ekonomi komunitas.”

“Environmental Justice: Environmental justice is broader in scope than environmental equity. It refers to those cultural norms and values, rules, regulations, behaviors, policies, and decisions to support sustainable communities, where people can interact with confidence that their environment is safe, nurturing, and productive. Environmental justice is served when people can realize their highest potential, without experiencing the “isms”. Environmental justice is supported by decent paying and safe jobs; quality schools and recreation; decent housing and adequate health care; democratic decision-making and personal empowerment; and communities free of violence, drugs, and poverty. These communities where both cultural and biological diversity are respected and highly revered and where distributed justice prevails.”

“Keadilan Lingkungan: Keadilan Lingkungan adalah ruang lingkup yang lebih luas dari ekuitas lingkungan. Merujuk pada norma-norma budaya dan nilai-nilai, aturan, regulasi, perilaku, kebijakan, dan keputusan untuk mendukung masyarakat yang berkelanjutan, di mana orang dapat berinteraksi dengan keyakinan bahwa lingkungannya aman, terpelihara dan produktif. Keadilan Lingkungan disajikan ketika orang dapat menyadari teori potensi

tertinggi, tanpa mengalami “isme”. Keadilan Lingkungan didukung oleh pekerjaan dengan gaji yang layak dan aman; kualitas sekolah dan rekreasi; perumahan yang layak dan perawatan kesehatan yang memadai; pengambilan-keputusan yang demokratis dan pemberdayaan; dan masyarakat yang bebas dari kekerasan, narkoba, dan kemiskinan. Masyarakat ini baik keragaman kultural dan biologis dihargai dan sangat dipuja dan di mana keadilan terdistribusi berlaku.”

Di Amerika Serikat kemudian banyak jejaring *environmental justice* yang melibatkan banyak negara lain dan menjadi jejaring transnasional untuk *environmental justice*. Jejaring ini bekerja untuk membawa *environmental justice* ke seluruh bagian dunia dan untuk melindungi semua warga dunia untuk mengurangi ketidakadilan lingkungan yang terjadi di seluruh dunia. Jejaring global ini bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama yaitu lingkungan yang lebih bersih.³⁸

1.5.4. Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan)

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang muncul atas permasalahan eksistensial manusia yang dirasakan pada saat itu, yaitu peningkatan keprihatinan terhadap eksploitasi sumberdaya alam dan pembangunan ekonomi dengan mengorbankan kualitas lingkungan. Pembentukan *United Nations World Commission on Environment dan Development* (WCED) pun dilakukan untuk membahas lebih jauh terkait pembangunan berkelanjutan. Dalam “*Our Common Future*” yang dipublikasikan oleh WCED pada tahun 1987, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai berikut:³⁹

“sustainable development is defined as development that meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”

“pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang mempertemukan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi

³⁸ David Naguib Pellow, *Resisting Global Toxics*. (The MIT Press: Cambridge, Massachusetts, 2007).

³⁹ WCED, *Our Common Future*, (New York: Oxford University Press), hlm. 43

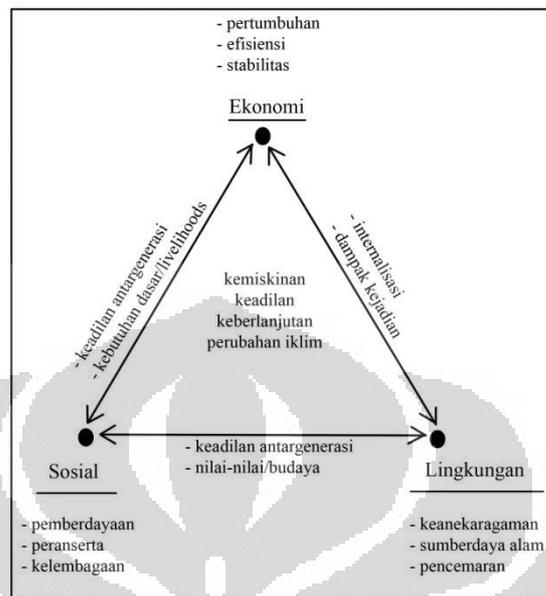
kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri”

Definisi ini mensiratkan bahwa dalam pembangunan bukan hanya generasi sekarang saja yang harus dipenuhi kebutuhannya, tetapi juga harus mempertimbangkan hak-hak generasi mendatang dimana sumberdaya alam juga dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Hal ini merupakan konsep penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dimana, dalam definisi tersebut terkandung dua gagasan yaitu gagasan kebutuhan dan gagasan keterbatasan. Gagasan kebutuhan dalam hal ini merujuk pada kebutuhan esensial kaum miskin sedunia yang harus diberi prioritas utama. Sementara, gagasan keterbatasan merujuk pada keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan masa depan.

Selain itu, konsep penting lainnya dalam definisi tersebut adalah pentingnya untuk menyatukan atau mengintegrasikan tiga pilar atau dimensi, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam mencapai tujuan berkelanjutan. Dalam hal ini, keterkaitan ketiga pilar tidak sepenuhnya bersifat *mutually exclusive*, namun mampu menciptakan perkuatan satu sama lainnya (*mutually reinforcing*). Keterkaitan antara ketiga pilar tersebut dapat dilihat dalam segitiga pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:⁴⁰

⁴⁰ Gabriela Popa, Ion Stegaroiu, Valentina-Ofelia Robescu, Ionut Barbu, Valentin Ilie, “Sustainable Development Strategy – the Key of Environmental and Organizational Management”, dalam *Proceedings of the International Conference on Energy and Environment Technologies and Equipment*.

Gambar 1. Segitiga Pembangunan Berkelanjutan – elemen pokok dan interkoneksi (diadaptasi dari Munasinghe 1992)



Pembangunan berkelanjutan memerlukan keseimbangan dan analisa terintegrasi dari ketiga perspektif utama yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dari segitiga tersebut, setiap sudut pandang berkoresponden terhadap *domain* (dan sistem), dimana masing-masing memiliki tujuan yang berbeda. Pandangan ekonomi lebih diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan manusia, melalui peningkatan dalam konsumsi dan jasa. Dalam hal ini, berkelanjutan secara ekonomi berarti bahwa suatu kegiatan pembangunan harus dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan kapital, dan penggunaan sumberdaya serta investasi secara efisien. Sementara *domain* lingkungan lebih terfokus kepada perlindungan integritas sistem ekologi. Sedangkan *domain* sosial menekankan pada hubungan manusia dan pencapaian aspirasi individu dan kelompok. Dalam hal ini, berkelanjutan secara sosial mensyaratkan bahwa suatu kegiatan pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil pembangunan, pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, dan pengembangan kelembagaan. Interaksi antara domain juga penting dalam memastikan sinergi yang mungkin muncul diantara ketiga dimensi tersebut. Isu seperti kemiskinan dapat diletakkan di tengah segitiga tersebut untuk menekan kembali bahwa mereka terkait dengan ketiga dimensi tersebut.

Konsep dan hasil dari WECD kemudian dibahas dan dikembangkan dalam *United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)* atau dikenal sebagai KTT Bumi pada tahun 1992. Hasil yang dicapai dalam KTT Bumi tersebut yaitu:

- Deklarasi Rio, dengan 27 prinsip yang menetapkan hak dan tanggung jawab bangsa-bangsa dalam memperjuangkan perkembangan dan kesejahteraan manusia.
- Agenda 21, sebuah rancangan tentang cara mengupayakan pembangunan yang berkelanjutan dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.
- Konvensi tentang perubahan iklim, dimana tujuan kerangka konvensi PBB untuk perubahan iklim adalah menstabilkan gas-gas rumah kaca dalam atmosfer pada tingkatan yang tidak akan mengacaukan iklim global.
- Konvensi tentang keanekaragaman hayati, menghendaki agar negara-negara mengerahkan segala daya dan dana untuk melestarikan keragaman spesies-spesies hidup, dan mengupayakan agar manfaat penggunaan keragaman hayati itu dirasakan secara merata.
- Pernyataan tentang prinsip kehutanan, dimana prinsip ini menjadi pedoman bagi pengelolaan, pelestarian dan pembangunan semua jenis hutan secara berkelanjutan.

Hasil dari KTT Bumi ini kemudian dikembangkan lagi dalam *World Summit Sustainable Development* pada tahun 2002, yang menghasilkan Deklarasi Johannesburg. Deklarasi Johannesburg yang ditetapkan tanggal 4 September 2002 menghasilkan komitmen politik seluruh lapisan masyarakat internasional untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan di semua tingkatan beserta dasar-dasar yang patut dijadikan acuan dalam memperkuat ketiga pilar berkelanjutan.

Dari berbagai dokumen maupun deklarasi yang dihasilkan dalam KTT tersebut terdapat lima prinsip utama yang terkandung dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yaitu:⁴¹

- Prinsip keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*)

⁴¹ Saifulloh, "Paradigma Pembangunan Lingkungan Hidup di Indonesia", dalam *Paper Program Pascasarjana UIN MALIKI Malang*, 2010.

Setiap generasi di dunia memiliki hak untuk menerima dan menempati bumi bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya, di mana setidaknya terdapat tiga tindakan generasi sekarang yang sangat merugikan generasi mendatang.⁴² Pertama, konsumsi yang berlebihan terhadap sumberdaya berkualitas membuat generasi mendatang harus membayar lebih mahal untuk dapat mengkonsumsi sumberdaya yang sama. Kedua, pemakaian sumberdaya saat ini belum diketahui manfaat terbaiknya sangat merugikan generasi mendatang, karena mereka harus membayar mahal untuk in-efisiensi dalam penggunaan sumberdaya dalam yang dilakukan generasi sekarang. Ketiga, pemakaian sumberdaya alam secara habis-habisan generasi sekarang membuat generasi mendatang tidak memiliki keragaman sumberdaya yang besar. Terdapat tiga dasar yang terkandung dalam prinsip keadilan antargenerasi,⁴³ yaitu pertama setiap generasi harus melakukan konservasi keragaman sumberdaya lingkungan. Kedua, setiap generasi harus menjaga atau memelihara kualitas lingkungan. Ketiga, setiap generasi yang menjamin hak akses yang sama terhadap segala warisan kekayaan alam dari generasi sebelumnya dan harus melindungi akses ini untuk generasi mendatang.

- Prinsip keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*)

Prinsip ini menekankan pada keadilan dalam sebuah generasi umat manusia, termasuk di dalamnya ketidakberhasilan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar lingkungan dan sosial, atau tepatnya kesenjangan antara individu dengan kelompok dalam masyarakat tentang pemenuhan kualitas hidup. Menurut Achmad Santosa, prinsip ini berkaitan dengan isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan karena pertama, beban dan permasalahan lingkungan dipikul oleh masyarakat yang lemah secara sosial dan ekonomi.⁴⁴ Kedua, kemiskinan menimbulkan akibat degradasi lingkungan, karena masyarakat yang masih dalam taraf pemenuhan *basic need* pada umumnya

⁴² Edith Brown Weiss, "Our Rights and Obligations to future Generations for the Environment", dalam *American Journal of International Law*, Vol. 84, 1991, hlm. 201-202

⁴³ Edith Brown Weiss, "Intergenerational Equity: A Legal Framework for Global Environmental Change", dalam Richard L. Revesz, *Foundations of Environmental Law and Policy*, (Oxford: Oxford University Press, 1997), hlm. 309-312

⁴⁴ Mas Achmad Santosa, "Aktualisasi Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan dalam Sistem dan Praktek Hukum Nasional", dalam *Jurnal Hukum Lingkungan Tahun III*, 1991, hlm 1-21

tidak memiliki kepedulian lingkungan. Ketiga, upaya-upaya perlindungan dapat berakibat pada sektor-sektor tertentu yang lain. Keempat, tidak seluruh anggota masyarakat memiliki akses yang sama dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan pengetahuan, ketrampilan, keberdayaan serta struktur pengambilan keputusan dapat menguntungkan anggota masyarakat tertentu dan merugikan kelompok lain.

- Prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa tidak adanya temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya mencegah kerusakan lingkungan.

- Prinsip perlindungan keragaman hayati (*conservation of biological diversity*)

Prinsip perlindungan keragaman hayati merupakan prasyarat bagi berhasilnya pelaksanaan prinsip keadilan antargenerasi. Dalam hal ini, potensi keragaman hayati memberikan arti penting bagi kesinambungan kehidupan umat manusia. Semakin besar kerusakan atau pun kepunahan keragaman hayati maka akan berdampak terhadap keberlangsungan kehidupan umat manusia.

- Internalisasi biaya lingkungan (*internalisation of environmental cost and incentive mechanism*)

Prinsip ini berangkat dari suatu keadaan dimana penggunaan sumberdaya alam sekarang merupakan kecenderungan atau reaksi dari dorongan pasar. Kerusakan lingkungan dapat dilihat sebagai *external cost* dari suatu kegiatan ekonomi yang diderita oleh pihak yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut. Oleh karena itu, biaya kerusakan lingkungan harus diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber alam tersebut.

Dalam hukum-hukum internasional, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ini juga dikembangkan untuk diintegrasikan ke dalam hukum-hukum internasional. Pada tanggal 2-6 April 2002, telah dihasilkan Deklarasi New Delhi, dimana deklarasi ini membahas tentang prinsip-prinsip hukum

internasional yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam deklarasi tersebut antara lain:⁴⁵

- Prinsip kewajiban negara untuk menjamin penggunaan yang berkelanjutan atas sumberdaya alam.
- Prinsip keadilan dan pemerangan terhadap kemiskinan.
- Prinsip tanggungjawab bersama tapi berbeda.
- Prinsip pendekatan pencegahan terhadap kesehatan manusia, sumberdaya alam, dan ekosistem.
- Prinsip partisipasi publik dan akses informasi dan keadilan.
- Prinsip tata kelola.
- Prinsip integrasi dan saling keterkaitan khususnya berhubungan dengan tujuan hak asasi manusia dan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dalam hal ini telah banyak perjanjian internasional internasional yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia sendiri, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut sudah diintegrasikan ke dalam hukum nasional. Namun, implementasi untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan masih belum baik. Dalam penelitian ini akan terlihat bagaimana WI-IP, sebagai NGO lingkungan, ikut mendorong dalam mengembangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui proyek Green Coast di Aceh dan Nias.

1.6.Literature Survey

Dalam studi Hubungan Internasional penelitian terkait isu lingkungan sudah mulai banyak dilakukan. Seperti Riena Dwi Astuty, dalam penelitiannya “Kerjasama Internasional dalam Menangani Masalah Pemanasan Global:

⁴⁵ Andreas Pramudianto, “Penerapan Hukum Internasional Mengenai Pembangunan Berkelanjutan (*International Law of Sustainable Development*) di Indonesia (Studi Awal Penerapan Konsep dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Perjanjian Internasional dan Hukum Nasional), dalam *Jurnal Pusat Studi Lingkungan Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia: Lingkungan dan Pembangunan*, Vol. 27, No. 2, 2007, hlm. 139

Pembentukan Rezim Pemanasan Global 1992-2000”⁴⁶ yang meneliti tentang upaya untuk menanggulangi masalah lingkungan terutama permasalahan pemanasan global melalui kerangka kerjasama internasional. Pemanasan global telah menjadi perhatian oleh negara-negara karena dampak dari pemanasan global yang mulai menunjukkan dampak negatif yang signifikan. Menyadari dampak negatif dari fenomena pemanasan global ini, negara-negara di dunia berupaya untuk melakukan suatu upaya untuk menanggulangi masalah tersebut. Salah satu upaya tersebut adalah dengan kerangka kerjasama internasional. Salah satu alat kerjasama adalah dengan pembentukan rezim internasional yang akan mengatur perilaku negara di dunia. Dalam penelitiannya, Riena menemukan empat peran yang dimainkan oleh negara dalam proses negosiasi yaitu *leader states*, *vote blocking states*, *supporting states* dan *swing states*. Namun pada akhirnya, Riena menyimpulkan proses negosiasi dalam pembentukan rezim internasional ini merupakan proses yang panjang yang diakibatkan karena kompleksnya negosiasi antara negara-negara yang terlibat dan ditambah dengan kehadiran aktor non-negara.

Harini Dyah Kusumastuti dalam penelitiannya yang berjudul “Kerjasama Internasional dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah Aliran Sungai Mekong (2001-2004)”⁴⁷ juga menjelaskan mengenai upaya kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang dialiri Sungai Mekong, seperti China, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, dan Kamboja, dalam pemanfaatan Sungai Mekong. Dalam hal ini, Harini fokus kepada Mekong River Commission dan greater Mekong Subregion sebagai bentuk kerjasama dalam pengelolaan air regional. Dalam penelitian ini, disimpulkan beberapa hal yang menarik seperti keterlibatan China dan Myanmar. Keterlibatan China dan Myanmar dalam rejim pengelolaan air di Sungai Mekong dapat dilakukan melalui kerangka kerjasama ekonomi. Dimana perekonomian yang hampir selalu menjadi prioritas utama dalam program pembangunan akan cukup efektif untuk mengikat negara yang

⁴⁶ Riena Dwi Astuty, *Kerjasama Internasional dalam Menangani Masalah Pemanasan Global: Pembentukan Rezim Pemanasan Global 1992-2000*, (Depok: Universitas Indonesia, 2002)

⁴⁷ Harini Dyah Kusumastuti, *Kerjasama Internasional dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah Aliran Sungai Mekong (2001-2004)*, (Depok: Universitas Indonesia, 2007)

bersangkutan ke dalam mekanisme kerjasama yang tidak hanya mengedepankan masalah ekonomi, namun juga memasukkan elemen lingkungan di dalamnya.

Sementara itu, Kinanti Kusumawardani Taufik dalam penelitiannya yang berjudul “Aksiologi Ekofeminisme liberal dalam Reflexive Modernization: Studi Kasus Transnational Environment Activists Organizations dan Peran ProFauna dalam Mengangkat Diskursus Pelestarian Satwa Liar di Indonesia Periode 1994-2005”⁴⁸ membahas peran masyarakat transnasional dan LSM dalam isu lingkungan. Peranan masyarakat transnasional dan LSM sebagai aktor politik tidak hanya terbatas pada pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintah *per se*, tetapi juga mencakup spektrum yang lebih luas yaitu keterlibatan masyarakat sipil dalam proses perubahan nilai-nilai normatif serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui kegiatan sosial-budaya dan penyebaran argumentasi etika. Terkait dengan peran ProFauna, Kinanti menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam studi kasus mengenai peran ProFauna mengangkat diskursus perlindungan satwa liar, dapat dipahami bagaimana ekofeminisme liberal, sebagai suatu bentuk argumentasi etika menjadi penyebab kausal perubahan nilai-nilai normatif. Meskipun keberadaan argumentasi etika yang diusung oleh masyarakat beresiko seringkali diragukan, secara pasti argumentasi tersebut berperan dalam proses perubahan pada perpolitikan masyarakat sipil dunia.

Dari literature survey tersebut, tulisan ini ingin mengisi studi-studi sebelumnya terkait dengan lingkungan dan NGO dalam isu lingkungan. Khususnya peran dari WI-IP sebagai NGO lingkungan dalam menggabungkan upaya rehabilitasi dengan *livelihoods* pasca tsunami Aceh dan Nias di proyek Green Coast pada tahun 2005 sampai 2009. Rehabilitasi ekosistem pesisir pasca tsunami Aceh dan Nias tidak terlalu mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah karena terfokus pada perbaikan infrastruktur. Di sinilah WI-IP sebagai NGO lingkungan memainkan peran yang strategis yang tidak hanya melakukan upaya rehabilitasi ekosistem pesisir namun juga menggabungkannya dengan upaya *livelihoods*. Selain itu, tulisan ini juga ingin melihat strategi dan kerja sama

⁴⁸ Kinanti Kusumawardhani Taufik, *Aksiologi Ekofeminisme liberal dalam Reflexive Modernization: Studi Kasus Transnational Environment Activists Organizations dan Peran ProFauna dalam Mengangkat Diskursus Pelestarian Satwa Liar di Indonesia Periode 1994-2005*, (Depok: Universitas Indonesia, 2008)

atau *networking* yang terjalin antara NGO dan aktor-aktor lain dalam sebuah proyek green coast ini.

1.7. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan merupakan metode yang dilakukan dengan mengkaji berbagai bahan pustaka atau dokumen sehingga dapat merepresentasikan keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini, penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer mencakup publikasi, laporan, buku, artikel, dan lain sebagainya. Sedangkan data sekunder mencakup data terkait kerja WI-IP.

1.8. Pembabakan

Skripsi ini disusun ke dalam 5 bab, yaitu:

Bab I; berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, asumsi penelitian, pertanyaan penelitian, kerangka konsep, literature review, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, pembabakan, tujuan dan signifikansi.

Bab II; berisi penjelasan mengenai profil Wetlands International – Indonesia Programme (WI-IP), dimana dalam bab ini akan dijelaskan mengenai sejarah terbentuknya Wetlands Internasional, strategi kerja Wetlands International, Wetlands International di berbagai dunia, Pendanaan, dan mengenai pendekatan bio-rights sebagai pendekatan yang dikembangkan oleh Wetlands International dalam upaya rehabilitasi lahan basah dan *livelihoods*.

Bab III; berisi pembahasan. Dalam bab ini, pertama akan dijelaskan mengenai kondisi Aceh dan Nias pasca Tsunami. Kedua, akan dijelaskan mengenai WI-IP dalam merehabilitasi ekosistem pesisir dan mengembangkan mata pencaharian Aceh-Nias (Proyek Green Coast) pada tahun 2005-2009 yang dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan.

Bab IV; berisi analisa. Dalam bab ini, temuan yang ditemui dalam pembahasan akan dianalisa dengan melihat kembali konsep *transnational advocacy network* Sikkink dan Keck sehingga dapat dilihat, pertama strategi ataupun taktik WI-IP dalam proyek Green Coast, kedua, jejaring WI-IP dalam proyek ini, ketiga capaian terkait transformasi masyarakat.

Bab V; berisi kesimpulan

1.9. Tujuan dan Signifikansi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat peran WI-IP dalam merehabilitasi ekosistem pesisir dan mengembangkan mata pencaharian di Aceh-Nias tahun 2005-2009 (Proyek Green Coast). Selain itu, penelitian ini bermaksud untuk melihat kinerja atau strategi yang digunakan oleh NGO dalam melaksanakan suatu program, dalam penelitian ini yaitu WI-IP. Penelitian ini juga bermaksud untuk melihat sinergi atau *networking* yang terjalin antara WI-IP dengan aktor-aktor lainnya yang ikut terlibat dalam proyek GC di Aceh dan Nias pada tahun 2005-2009.

Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berkontribusi pada kajian akademik mengenai peran NGO lingkungan dalam menangani sebuah isu lingkungan. Lebih spesifik, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi kepada kajian terkait peran WI-IP dalam merehabilitasi ekosistem pesisir dan mengembangkan mata pencaharian di Aceh-Nias pada tahun 2005-2009. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang luas terhadap dilakukannya penelitian yang lebih mendalam lagi di masa datang.

BAB II

Profil WI-IP

Wetlands International – Indonesia Programme (WI-IP) merupakan salah satu NGO yang aktif dalam isu lingkungan di Indonesia. WI-IP dalam hal ini juga melakukan upaya rehabilitasi Aceh dan Nias pasca tsunami, terutama rehabilitasi ekosistem pesisir. Sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai peran WI-IP dalam upaya rehabilitasi Aceh dan Nias, pada bab ini akan dijelaskan mengenai profil WI-IP. Dalam hal ini, dijelaskan juga mengenai strategi kerja Wetlands International, Wetlands International di seluruh dunia, dan juga terkait pendanaan Wetlands International. Selain itu, dalam bab ini akan dijelaskan juga mengenai pendekatan bio-rights sebagai sebuah pendekatan yang dikembangkan oleh Wetlands International terkait upaya rehabilitasi lahan basah dengan menggabungkannya dengan upaya *livelihoods* yang digunakan dalam proyek *green coast*.

2.1. Sejarah singkat, Visi dan Misi

Wetlands International – Indonesia Programme (WI-IP) adalah bagian dari jaringan global Wetlands International (WI), yang merupakan NGO dan bekerja secara global, regional, nasional hingga lokal untuk mencapai tujuan konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara bijaksana, sebagai bentuk sumbangan bagi terwujudnya pembangunan secara berkelanjutan.⁴⁹ Wetlands International merupakan organisasi independen dan *not-for-profit*.⁵⁰

WI-IP, semula bernama Asian Wetlands Bureau (AWB-IP), telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1987 atas dasar Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Indonesia, yaitu dengan Departemen

⁴⁹ WI-IP, “Organisation Profile”, diakses dari <http://www.wetlands.or.id/profile.php>, pada tanggal 28 Februari 2011, pukul 15.13 WIB

⁵⁰ Wetlands International, “About Wetlands International”, diakses dari <http://www.wetlands.org/Aboutus/tabid/54/Default.aspx>, pada tanggal 9 Januari 2012, pukul 23.28 WIB

Kehutanan, Direktur Jenderal PHPA.⁵¹ AWB yang semula berdiri sendiri, pada tahun 1995 bersama organisasi sejenis yaitu *International Waterfowl and Wetland Research Bureau (IWRB)* dan *Wetland for the Americas (WA)*, melebur diri menjadi Wetlands International dimana organisasi dengan nama baru ini membuka kesempatan kepada pemerintah negara-negara untuk bergabung menjadi anggota. Dengan surat no.1659/Menhut-VI/95 tanggal 17 November 1995 Menteri Kehutanan menyatakan Indonesia bergabung menjadi anggota Wetlands International. Pada November 1997 ditandatangani MoU yang baru antara Direktur Jenderal PHPA dengan Wetlands International yang menjadi landasan tetap beroperasinya Wetlands International – Indonesia Programme di Indonesia. MoU ini berjangka waktu lima tahun dengan perpanjangan otomatis satu tahun untuk proses evaluasi dan perpanjangan.

Misi Wetlands International adalah memelihara dan mempertahankan lahan basah, termasuk sumberdaya dan keanekaragaman hayatinya untuk generasi mendatang.⁵² Visi WI-IP yaitu visi jangka panjang bahwa lahan basah serta sumberdaya air dapat dikonservasi dan dikelola sehingga berbagai nilai dan jasa lingkungannya dapat memberikan manfaat bagi keanekaragaman hayati serta kehidupan manusia.

2.2. Strategi

Dalam melakukan kegiatan-kegiatannya, Wetlands International memiliki empat strategi utama.⁵³ Pertama, memobilisasi pengetahuan dan ahli terbaik. Pengetahuan adalah inti dari kerja Wetlands Internasional, dimana Wetlands International mengembangkan dan mengkomunikasikan ilmu pengetahuan sebagai mekanisme inti yang dipakai untuk memperoleh perhatian, menginformasikan, melatih dan meyakinkan pihak lain. Wetlands International menyediakan informasi terkait lahan basah yang meliputi nilai dari lahan basah

⁵¹ WI-IP, *Ringkasan Profil Kegiatan WI-IP*, (Bogor: WI-IP).

⁵² Wetlands International, "Our Mission and Vision", diakses dari <http://www.wetlands.org/Aboutus/MissionVision/tabid/58/Default.aspx>, pada tanggal 9 Januari 2012, pukul 14.03 WIB

⁵³ Wetlands International, *Strategic Intent 2011-2020*, (Netherlands: WI)

dan pelayanannya. Dalam mengembangkan pengetahuan tersebut Wetlands International memiliki jaringan yang terdiri dari *specialist group* dan *associate experts*. *Specialist group* terdiri dari ahli ilmuwan yang memiliki tugas menyediakan informasi dan saran dalam mendukung program Wetlands International. *Specialist group* ini merupakan bagian vital dari Wetlands International, dimana terdapat 16 *specialist group* (2.000 orang) yang 15 diantaranya merupakan kerjasama dengan IUCN. Sedangkan, *Associate group* terdiri dari ahli yang memiliki tugas pelaksanaan kerja lapangan, meneliti, dan mengembangkan proposal.

Kedua, meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu kritis. Seringkali untuk membuka peluang untuk bertindak dilakukan dengan cara menyoroti dan menarik perhatian dengan kritis bahkan *shocking* terkait fakta dan masalah lahan basah. Menurut pengalaman, dengan menyoroti hilangnya lahan basah yang penting secara global, didukung dengan informasi yang ilmiah terkait nilai-nilai mereka, dapat memberikan dampak yang besar. Selain itu, Wetlands International juga bekerja sama dengan organisasi yang memiliki tujuan yang sama untuk memaksimalkan jangkauan dan dampak. Ketiga, mendorong masyarakat untuk bertindak. Dalam hal ini, Wetlands International lebih bertindak dalam menyediakan pengetahuan, membangun kapasitas lokal dan membuka akses dalam peluang finansial. Wetlands International bertindak sebagai penengah antara masyarakat dan *stakeholder* lain, seperti lembaga pemerintah dan otoritas pembangunan, untuk memastikan kebutuhan masyarakat diperhitungkan dalam rencana dan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam. Dalam hal ini, Wetlands International juga membantu masyarakat untuk menjembatani konflik kepentingan atas sumberdaya alam yang muncul antara mereka dan *stakeholder* lain. Aktivitas pengelolaan lahan basah yang dilakukan Wetlands International selalu didukung oleh program pelatihan yang intensif bagi masyarakat.

Keempat, mempengaruhi kebijakan dan aksi. Advokasi Wetlands International bertujuan untuk meningkatkan kebijakan dan aksi publik atau privat. Inti dari kinerja Wetlands Internasional adalah tindakan, pengetahuan, dan kebijakan. Terdapat beberapa poin dalam strategi ini yaitu pertama, pengalaman

di lapangan mendukung kegiatan advokasi. Kegiatan lapangan merupakan tindakan terbaik untuk membuat perubahan terhadap kebijakan publik dan privat. Kedua, ilmu pengetahuan sebagai alat untuk advokasi. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan digunakan untuk membujuk pembuat kebijakan dan menarik perhatian terhadap isu-isu yang diusung Wetlands International. Ketiga, keterlibatan langsung dalam meningkatkan kebijakan perusahaan dan pemerintah. Dalam hal ini, Wetlands International terlibat langsung dan menyediakan dukungan teknis, untuk advokasi dan kampanye media.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, Wetlands International seringkali menjalin kemitraan dengan pihak lain, seperti NGO, institusi pengetahuan, lembaga publik, dan perusahaan.

2.3. Wetlands International dan perwakilannya di negara-negara.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, WI-IP merupakan jaringan global Wetlands Internasional yang berpusat di Belanda. Wetlands International (WI) bekerja melalui jaringan regional, kantor perwakilan di negara dan kantor proyek (*project office*), dengan berpusat di Belanda.⁵⁴ Dalam hal ini, Wetlands International memiliki 20 kantor di berbagai negara termasuk pusatnya di Belanda dan di Indonesia. kantor perwakilan lainnya berada di Afrika (kantor regional Afrika), Mali - Sahelian (kantor sub-regional), Mali – Mopti (kantor proyek), Guinea-Bissau, East Africa, Argentina, Panama, China, Japan, Australia, Fiji, Indonesia, Indonesia – Banten (kantor proyek), Malaysia, Thailand, South Asia, Black Sea Region, Russia, Mediterrance.

Setiap kantor berkontribusi untuk mengembangkan dan menerapkan strategi global dan bertanggung jawab untuk kinerja terhadap target global. *Legal entities* dibangun di setiap wilayah untuk mengembangkan dan melaksanakan program WI dan untuk menjaga kerjasama regional dan nasional.⁵⁵ Dengan

⁵⁴ Wetlands International, "Our Organisation", diakses dari <http://www.wetlands.org/Aboutus/Ourorganisation/tabid/2663/Default.aspx>, pada tanggal 9 Januari 2012, pukul 13.47 WIB

⁵⁵ Wetlands International, *Strategic Intent 2011-2020, Ibid.*

perjanjian formal, kantor jaringan bekerja untuk tujuan strategi, kebijakan dan standar operasional global yang sama. Melalui kerjasama dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, Wetlands International dapat bekerja di lebih 100 negara.

Wetlands International bekerja melalui kantor jaringan global, yang memiliki mandat dan menjalankan fungsi yang berbeda.⁵⁶ Semua kantor perwakilan dipandu oleh *strategic intent*, berkontribusi terhadap tujuan dan target dan bekerja untuk seperangkat nilai dan kebijakan organisasi. Kantor pusat global di Belanda memberikan panduan secara keseluruhan, dukungan dan koordinasi untuk jaringan. Sedangkan kantor lain memiliki mandat regional, sub-regional, atau nasional mandat atau dikhususkan untuk mengelola proyek tertentu. Kantor pusat dipimpin oleh Management Board (Chief executive officer dan Chief Operations Officer) yang diawasi oleh *Supervisory Council*. Sementara itu kantor perwakilan dipimpin oleh *Local Board*. Dimana kepala kantor perwakilan berkordinasi dengan Management Board untuk merumuskan isu dan strategi keseluruhan organisasi.

Terdapat perjanjian mengani kondisi untuk penggunaan nama ‘Wetlands International’. Dimana, mengikat kantor-kantor perwakilan kepada kantor pusat dan melakukan bagian-bagian konstituen dari jaringan untuk bekerja untuk strategi global dan mengikutioperasional standar, misalnya pada akuntabilitas keuangan, manajemen sumberdaya manusia dan komunikasi. Untuk memperkuat jaringan dibentuk program pengembangan organisasi.

2.4. Pendanaan

Terkait dengan pendanaan, Wetlands International tidak dependen dengan satu donor saja. Hal ini untuk mengurangi resiko apabila terdapat perubahan budget yang tidak terduga.⁵⁷ Wetlands International menerima pendanaan atau

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Wetlands International, “Our Donors”, diakses dari <http://www.wetlands.org/Aboutus/Networkpartnersanddonors/Donors/tabid/2017/Default.aspx>, pada tanggal 9 Januari 2012, pukul 14.49 WIB

donor dari pemerintah, organisasi dan konvensi internasional, dan NGO lain. Pendanaan terdiri dari *project income*, *income from membership*, dan sumber lainnya.⁵⁸ Terkait dengan keanggotaan, WI-IP memiliki anggota pemerintah dan NGO yang tergabung dalam *Association of Members*.⁵⁹ Terdapat 30 pemerintah dan 11 NGO yang menjadi anggota dan keanggotaan ini akan terus bertambah. Keterlibatan dengan pemerintah dan NGO kunci adalah salah satu kekuatan terbesar Wetlands International, memfasilitasi kerjasama antara Wetlands International dan negara-negara dimana Wetlands International bekerja. Hal ini sangat penting dalam menghasilkan proyek bersama dan membantu melaksanakan rencana kerja dari konvensi internasional dimana mereka menjadi penandatangan. *Association of Members* melakukan pertemuan setiap tiga tahun sekali.

Setiap kantor perwakilan bertanggung jawab untuk memastikan pendanaan yang berkelanjutan untuk kegiatannya baik secara independen atau pun berkolaborasi di seluruh jaringan.⁶⁰ Walaupun, kantor perwakilan memiliki tanggung jawab sendiri, kantor pusat memimpin dan memungkinkan pengembangan sumberdaya untuk jaringan dan kadang-kadang memperoleh dan mengelola program global, yang kemudian diserahkan kepada kantor perwakilan untuk pelaksanaannya.

Sebagai salah satu bentuk tanggungjawab kepada donor, Wetlands International membuat detail laporan finansial yang dipublikasikan dalam *Annual Review*.

2.5. Pendekatan Bio-rights.

Terkait dengan pengelolaan lahan basah termasuk ekosistem pesisir, Wetlands International telah mengembangkan sebuah pendekatan. Wetlands International memiliki basis yang kuat dalam mengelola ekosistem pesisir, yaitu

⁵⁸ Wetlands International, *Annual Plan and Budget 2011*, (Netherlands: Wetlands International)

⁵⁹ Wetlands International, "Our Association of Members", diakses dari <http://www.wetlands.org/Aboutus/Ourorganisation/Governance/AssociationofMembers/tabid/1200/Default.aspx>, pada tanggal 10 Januari 2012, pukul 17.11 WIB

⁶⁰ Wetlands International, *Strategic Intent*, *Ibid*.

dengan mekanisme finansial yang inovatif, disebut dengan Bio-rights.⁶¹ Pengelolaan ekosistem yang dikembangkan oleh Wetlands International merupakan pengelolaan yang tidak hanya berfokus pada rehabilitasi ekosistem tetapi juga memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat pesisir. Berikut ini adalah dasar pemikiran dari dikembangkannya pendekatan Bio-rights.

Dasar pemikiran pendekatan Bio-rights.

Ekosistem yang ada di bumi dan manusia yang tinggal di dalamnya memiliki ikatan dan hubungan simbiosis yang kompleks dan besar. Tidak dapat dipungkiri manusia sangat bergantung pada lingkungan alam untuk menunjang kehidupan sehari-hari mereka. Ekosistem alam dapat dikatakan sebagai mesin produksi bagi bumi, dimana ekosistem memberikan manusia mulai dari air, bahan makanan dan masih banyak lagi. Namun, sayangnya degradasi lingkungan justru terus terjadi dari tahun ke tahun. Pembangunan dan kemiskinan merupakan faktor yang turut menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang lebih besar. Pembangunan masyarakat di daerah pedesaan menurut PBB pada tahun 2000 hampir tidak bergerak di negara-negara berkembang. Cara-cara tradisional untuk lepas dari kemiskinan biasanya adalah bermigrasi ke daerah perkotaan. Cara ini bukanlah solusi untuk jutaan masyarakat miskin, namun di lain pihak sistem tradisional dalam pertanian dan kehutanan juga tidak menunjang pembangunan bagi masyarakat miskin di pedesaan.⁶²

Seperti pembentukan daerah perlindungan atau *protected areas* yang tidak memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan bagi masyarakat setempat. Seringkali, *protected areas* justru memberikan akses yang terbatas terhadap lahan.⁶³ Adanya akses yang terbatas terhadap sumberdaya justru merupakan beban penghidupan bagi masyarakat miskin pedesaan, karena masyarakat sendiri sangat bergantung pada sumber daya alam di sekitarnya untuk

⁶¹ C Nelleman dan E. Corcoran (eds). *Dead Planet, Living Planet – Biodiversity and Ecosystem Restoration for Sustainable Development: A Rapid Response Assessment*. United Nations Environment Programme (Norway: Birkeland Trykkeri AS, 2010), hlm. 75-80

⁶² “Financial Mechanisms for Poverty-Environment Issues: The Bio-rights System”, diakses dari, www.bio-rights.org, pada tanggal 13 Mei 2012, pukul 17.29 WIB

⁶³ Joshua Bishop, Sachin Kapila, Frank Hicks, Paul Mitchell dan Francis Vorhies, *Building Biodiversity Business*, London: Shell International Limited and the International Union for Conservation of Nature, 2008), hlm. 10

memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat yang tidak memiliki pilihan selain bergantung pada sumber daya alam disekitarnya memaksa mereka terus mengeksploitasi sumber daya alam untuk kebutuhan hidup mereka, sehingga secara tidak sadar mereka justru menciptakan kerusakan lingkungan yang terus meningkat. Protected areas sendiri diciptakan melihat aktivitas masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan dan pembangunan dapat mengancam kelestarian lingkungan. Dimana pembangunan sendiri sering dianggap sebagai permasalahan dan penyebab utama dari kehilangan atau pun kerusakan lingkungan.⁶⁴ Walaupun, dalam beberapa pengalaman menunjukkan pendekatan tradisional termasuk adanya *protected areas* tidak cukup efektif untuk mencapai tujuan konservasi itu sendiri.⁶⁵

Pembangunan-pembangunan telah memaksa masyarakat miskin untuk mengeksploitasi alam dengan tidak bertanggung jawab demi memenuhi kebutuhan hidup jangka pendek mereka, di sini mereka terperangkap dalam "jerat kemiskinan" yaitu sumber daya alam dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek.⁶⁶ Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelayanan ekosistem untuk kehidupan yang berkelanjutan juga telah meningkatkan pengaruh berbahaya dari umpan balik negatif mata pencaharian terhadap lingkungan. Upaya untuk menghubungkan konservasi lingkungan dan pembangunan ini sudah lama diperdebatkan dan hal ini juga menjadi pertanda adanya pergeseran paradigma dalam pemikiran terkait konservasi. Dimana kebijakan yang dulu ada melihat manusia sebagai ancaman sekarang lebih kepada rekan potensial dalam strategi pembangunan berkelanjutan.⁶⁷ Pergeseran paradigma dalam pemikiran terkait konservasi atau disebut sebagai *new conservation*, memiliki beberapa karakteristik yang ditunjukkan oleh perubahan yang signifikan dalam tiga isu.⁶⁸

⁶⁴ Katrina Brown, "Innovations for Conservation and Development", dalam *The Geographical Journal*, Vol. 168, No.1, March 2002, hlm. 6

⁶⁵ Katrina Brown, *Ibid*, hlm. 7

⁶⁶ Pieter van Eijk dan Ritesh Kumar, *Bio-rights dalam Teori dan Praktek: Sebuah Mekanisme Pendanaan untuk Pengentasan Kemiskinan dan Konservasi*, (Netherlands: Wetlands International, 2008), hlm.10

⁶⁷ P. Blaikie and S. Jeanrenaud, "Biodiversity and Human Welfare", dalam *Social Change and Conservation: Politics and Impacts of National Parks and protected Areas*, (London:Earthscan, 1997), hlm 46-70

⁶⁸ D. Hulme and M. Murphree, "Communities, wildlife and 'new conservation'", dalam *Africa Journal of International Development*, Vol.11, 1999, hlm. 85-277

Pertama, adanya fokus partisipasi oleh komunitas lokal dalam konservasi; kedua, mengadopsi wawasan terbaru dari ekologi mengenai pemahaman tentang dinamika dan disequilibria ekosistem yang berbeda; ketiga, merupakan manifestasi dari ideologi neo-liberal, yang menghindari pelestarian keanekaragaman hayati melalui proteksionisme dan lebih cenderung melakukan konservasi yang dapat dimanfaatkan, sebagaimana *new conservation* juga melihat *market* sebagai potensi kerja sama. Strategi-strategi ataupun pendekatan yang mencoba mengintegrasikan keduanya –konservasi lingkungan dan pembangunan— pun mulai banyak dikembangkan, salah satunya *Bio-rights*.

Bio-rights merupakan sebuah mekanisme pendanaan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan konservasi dan restorasi lingkungan secara berkelanjutan. *Bio-rights* sendiri telah dikembangkan di akhir 1990-an oleh Wetlands International, Wageningen University dan Pusat Penelitian (Alterra) dengan sejumlah organisasi lokal dan dengan dukungan dana dari Canada Fund, CIDA (Canadian International Development Agency), America Forests, DGIS (Directoraat Generaal Internationale Samenwerking; development aid department of the Dutch Ministry of Foreign Affairs), Oxfam Novib dan Kedutaan Besar Inggris,⁶⁹ Pelaksanaan pendekatan ini telah dirintis, salah satunya di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi kerusakan lingkungan dengan cara menyediakan kredit yang dapat diubah statusnya menjadi hibah. Kredit ini berlaku sebagai sebuah skema pembayaran. Para pihak yang melakukan investasi membayarkan sejumlah dana kepada masyarakat setempat sebagai pemilik sumber daya untuk pengadaan pelayanan lingkungan. Pendekatan seperti ini mengatasi jerat kemiskinan sebagai sebuah kekuatan penggerak di balik permasalahan kemiskinan masyarakat pedesaan dan permasalahan lingkungan seperti kerusakan keanekaragaman hayati, kerusakan ekosistem dan perubahan iklim.⁷⁰ Pendekatan *Bio-rights* telah dikembangkan sebagai sebuah alat pelengkap bagi instrumen-instrumen konservasi dan pembangunan yang ada saat ini. *Bio-rights* juga mengakomodasikan kebutuhan akan mekanisme yang berbasis pada

⁶⁹ “Financial Mechanisms for Poverty-Environment Issues: The Bio-rights System”, *Loc.Cit.*

⁷⁰ “Financial Mechanisms for Poverty-Environment Issues: The Bio-rights System”, *Loc.Cit.*

pasar yang menargetkan masalah-masalah kompleks terkait lingkungan, ekonomi global dan kemiskinan.

Strategi dalam pendekatan Bio-rights untuk mencapai tujuan konservasi, dilakukan melalui tiga tahap:⁷¹

Tahap 1. Pemberian kredit mikro untuk pembangunan berkelanjutan

Sesuai dengan kesepakatan di antara para pemangku kepentingan yang relevan dengan inisiatif Bio-rights dan setelah penyusunan sebuah perencanaan proyek secara keseluruhan, penerapan Bio-rights akan dimulai dengan pemberian kredit mikro kepada kelompok masyarakat setempat. Kredit mikro ini bisa digunakan untuk pembangunan, dalam arti semua kegiatan yang bertanggung jawab baik dari segi ekologi, sosial maupun ekonomi sebagai alternatif atas praktek-praktek berbahaya yang mengancam lingkungan. Sebagai contohnya adalah inisiasi yang bertanggung jawab di bidang budidaya, perikanan dan kehutanan, pengembangan wisata ekologi atau produksi kerajinan tangan. Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung penghidupan masyarakat seperti pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan juga bisa diaplikasikan.

Kredit mikro ini biasanya diberikan kepada tingkat kelompok bukan individual, untuk mendukung kerja sama di antara para anggota (kelompok) masyarakat dan untuk menciptakan rasa memiliki masyarakat terhadap proyek yang mereka kerjakan. Selin itu, dengan menjadikan masyarakat bertanggung jawab secara kolektif atas sikap anggota individunya, resiko kegagalan proyek dapat dicegah semaksimal mungkin. Untuk menjamin penggunaan mikro kredit secara optimal dan berkelanjutan, para penerima kredit mikro tersebut juga mendapatkan dukungan aktif dalam kegiatan-kegiatan (pelatihan) pembangunan yang ditentukan.

Tahap 2: Penerapan kegiatan konservasi dan restorasi lingkungan

Masyarakat setempat membayar kembali kredit mikro yang telah mereka terima, beserta 'bunga' yang ditetapkan, dalam bentuk kontribusi aktif konservasi

⁷¹ Pieter van Eijk dan Ritesh Kumar, *Op.Cit*, hlm 16-20

lingkungan. Hal ini akan mengundang berbagai kegiatan termasuk konservasi keanekaragaman hayati dan habitatnya, restorasi ekosistem serta pemberian pelayanan tertentu seperti air bersih dan pengurangan emisi karbon. Kontribusi masyarakat bisa tergantung dari kondisi lokal setempat. Pelayanan lingkungan yang dilakukan tidak hanya membatasi praktek-praktek yang tidak bertanggung jawab (misalnya perburuan atau penggundulan hutan), tetapi bisa juga mencakup pelestarian lingkungan dari dampak pelayanan restorasi aktif lain yang sebelumnya mengalami kerusakan/kegagalan.

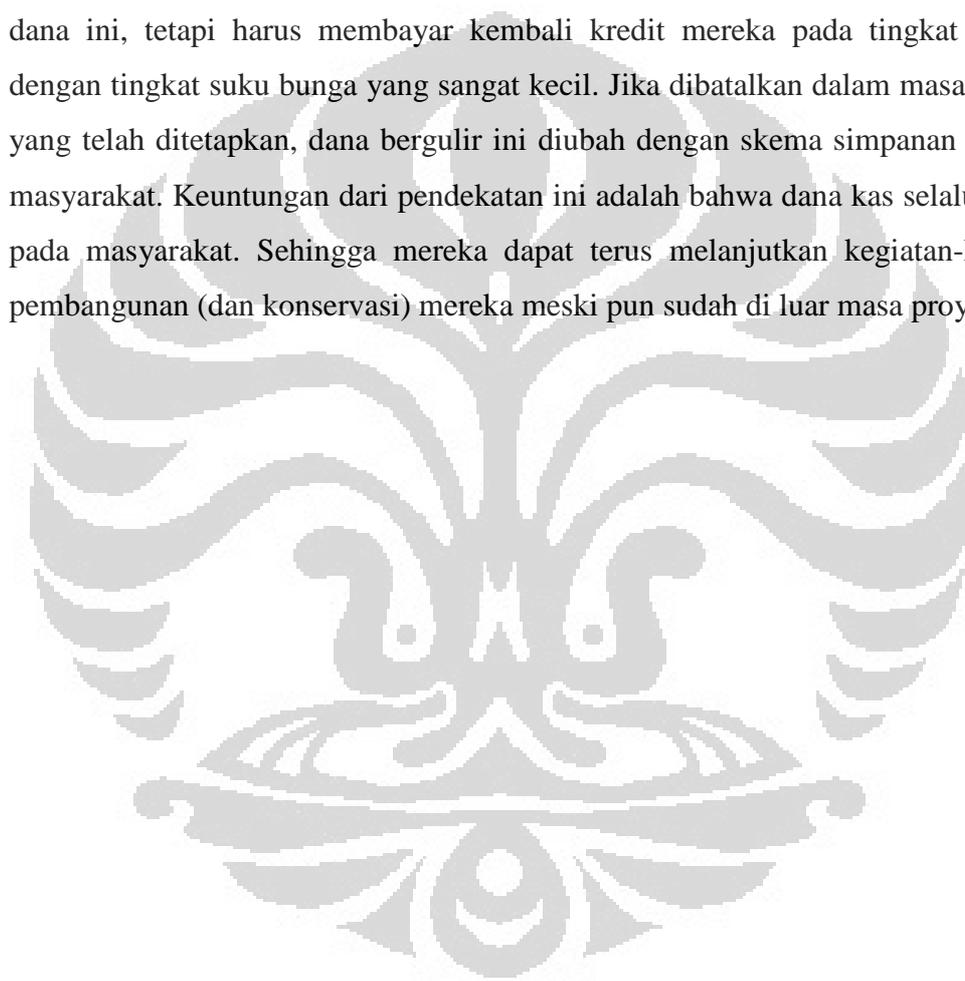
Kewajiban-kewajiban masyarakat untuk upaya konservasi ditetapkan secara resmi dalam sebuah kontrak. Indikator-indikator keberhasilannya dapat diukur (seperti misalnya tingkat ketahanan hidup benih tanaman yang ditanam, tingkat kerusakan lingkungan akibat tekanan perburuan) disepakati dan akan diawasi. Masyarakat yang terlibat memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa prasyarat-prasyarat ini telah tercapai. Kegiatan pengembangan kapasitas dan peningkatan kesadaran memberikan pengetahuan teknis yang tepat kepada para peserta untuk menerapkan ukuran-ukuran konservasi yang telah disepakati berhasil. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan pandangan atau wawasan penting mengenai pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan untuk memperbaiki taraf hidup mereka.

Tahap 3: Perubahan status kredit mikro

Kredit mikro diubah menjadi bantuan murni (hibah) apabila kegiatan-kegiatan konservasi yang dilakukan mencapai keberhasilan dalam periode waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan. Jika ukuran-ukuran konservasi tidak memenuhi standar-standar tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, para penerima kredit mikro diharuskan membayar kembali sebagian atau keseluruhan dana kredit yang telah diterima sebelumnya. Untuk proyek-proyek penghijauan kembali di masa sebelumnya misalnya, disetujui bahwa tingkat persentase ketahanan hidup benih yang lebih dari 75% akan menjadikan kredit mikro yang telah diterima sebelumnya berubah status menjadi bantuan murni. Jika tingkat persentase tanaman yang bertahan hidup lebih rendah, sejumlah dana yang proporsional (jumlahnya tergantung dari perbandingan benih yang bertahan

hidup) wajib dikembalikan. Persyaratan seperti ini menyebabkan konservasi yang berkualitas tinggi akan lebih terjamin. Pasal mengenai keadaan *force majeure* melindungi masyarakat terhadap kejadian-kejadian yang tidak diharapkan seperti bencana alam, kerusuhan massa, dan menempatkan resiko proyek kepada para pihak yang melakukan investasi (para penyedia dana).

Dalam beberapa kasus, sejumlah dana bergulir sedang dikembangkan sebagai sebuah caa untuk memberikan kredit mikro: masyarakat dapat meminjam dana ini, tetapi harus membayar kembali kredit mereka pada tingkat tertentu dengan tingkat suku bunga yang sangat kecil. Jika dibatalkan dalam masa kontrak yang telah ditetapkan, dana bergulir ini diubah dengan skema simpanan berbasis masyarakat. Keuntungan dari pendekatan ini adalah bahwa dana kas selalu berada pada masyarakat. Sehingga mereka dapat terus melanjutkan kegiatan-kegiatan pembangunan (dan konservasi) mereka meski pun sudah di luar masa proyek.



BAB III

Aceh-Nias Pasca Tsunami dan WI-IP dalam Merehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Mengembangkan Mata Pencaharian di Aceh-Nias 2005-2009 (Proyek GC)

Tsunami yang menghantam Indonesia pada Desember 2004 mengakibatkan kerusakan yang besar terutama di wilayah Aceh dan Nias. Selain kerusakan infrastruktur yang memang besar, ekosistem pesisir Aceh dan Nias juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Kerusakan ekosistem pesisir ini juga diikuti oleh hilangnya pekerjaan masyarakat pesisir yang berdampak langsung terhadap perekonomian mereka, yang sebagian besar memang bergantung pada ekosistem pesisir. Oleh karena itu, tidak hanya kegiatan rekonstruksi yang penting tetapi juga adanya rehabilitasi ekosistem pesisir. Dalam bab ini akan memaparkan secara singkat kondisi Aceh dan Nias pasca tsunami untuk melihat pula secara singkat upaya-upaya rehabilitasi yang ada secara umum dan juga peran Wetlands International – Indonesia Programme (WI-IP) sebagai salah satu aktor yang melakukan kegiatan rehabilitasi dengan proyek Green Coast (GC).

3.1. Aceh-Nias Pasca Tsunami

Pada tanggal 26 Desember 2004, gempa bumi berkekuatan 9,0 skala richter terjadi di Samudera Hindia. Pusat gempa hanya 150 km dari provinsi Aceh yang terletak di ujung barat daya Indonesia. Kurang dari satu jam kemudian, tsunami mencapai pantai Aceh dan Nias, dan mencapaimencapai daratan sampa sejauh 7 km di beberapa tempat. Tsunami yang menghantam Aceh dan Nias tidak hanya mengakibatkan kerusakan fisik yang meliputi kerusakan bangunan dan ekologi tetapi juga mengakibatkan kerugian sosial dan ekonomi yang besar. Kerusakan-kerusakan tersebut meliputi kerusakan terhadap ekosistem pesisir dan juga berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir.

Menurut BRR kerusakan lahan mangrove pasca tsunami di Aceh mencapai 20.000 ha dari luas lahan mangrove 53.512 ha (termasuk hasil konversi mangrove menjadi tambak seluas 27.592 ha).⁷² Sekitar 800 km pantai Aceh, seringkali selebar sampai dengan 5 km, mengalami dampak yang parah dan keseluruhan garis pantai Nias mengalami perubahan.⁷³ Kerusakan yang besar disebabkan oleh puing reruntuhan dan timbunan lumpur di tanah pertanian dan tambak ikan.

Gambar 2. Kerusakan Mangrove akibat Tsunami di Aceh Besar⁷⁴



Di banyak tempat, pantai-pantai hilang dan palung sungai mengalami perubahan. Tidak hanya itu, di berbagai wilayah Aceh dan Nias, dapat terlihat banyak perubahan daratan secara signifikan dan banyaknya tanaman pantai dan vegetasi lainnya yang mati.⁷⁵

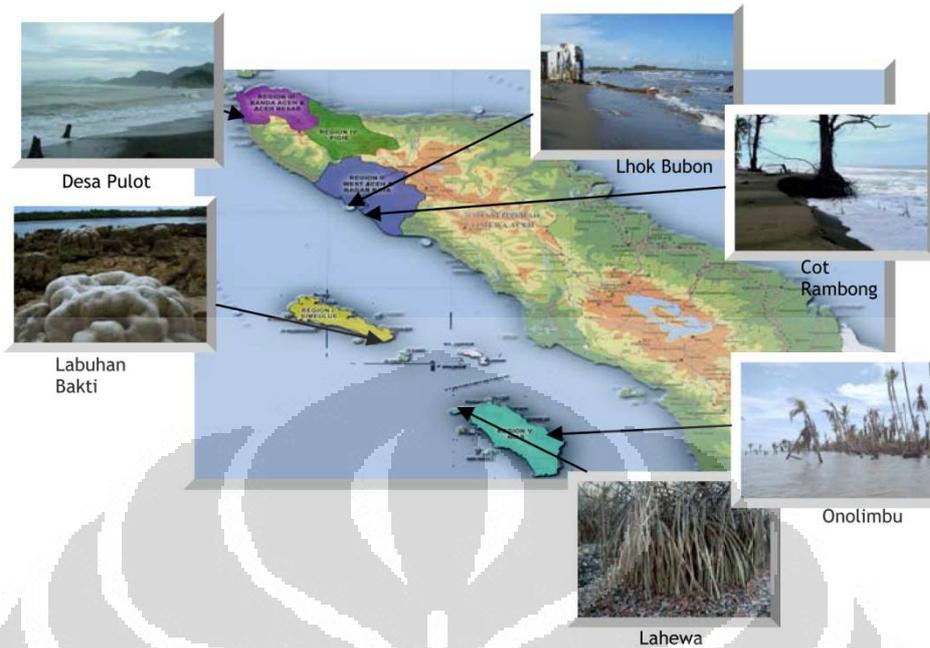
⁷² BRR, *Laporan Akhir BRR NAD-Nias: Perwakilan Nias 2005-2008*, (2008), hlm 6-7

⁷³ BRR, *Aceh dan Nias Setahun Setelah Tsunami: Upaya Pemulihan dan Langkah Ke Depan*, (2005), hlm. 24

⁷⁴ Iwan Tri Cahyo dan I Nyoman Suryadiputra, *Study of Lessons Learned from Mangrove/Coastal Ecosystem Restoration Efforts in Aceh since Tsunami*, (Bogor: WI-P, 2006), hlm. 25

⁷⁵ I Nyoman N. Suryadiputra (ed.al), *Kajian Kondisi Lingkungan Pasca Tsunami di Beberapa Lokasi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias*, (Bogor: WI-IP/CPSG/Univ.Syah Kuala), hlm 333-341

Gambar 3. Perubahan Landscapae di sepanjang pesisir Aceh akibat Tsunami⁷⁶



Di Simeulue telah terjadi perubahan fisik lahan basah yang cukup signifikan yaitu terjadinya pengangkatan daratan sehingga luas daratan di pantai menjadi bertambah sekitar 100 m kearah laut. Perubahan signifikan akibat pengangkatan adalah perubahan pola gerakan dan penggenangan air. Pengaruh dari perubahan pola air ini sangat jelas terlihat pada vegetasi mangrove. Perubahan pola air ini menjadikan areal mangrove menjadi kering dan akibatnya tumbuhan mangrove mati. Kekeringan ini juga berpengaruh kepada biota yang hidup dan memanfaatkan areal mangrove tersebut karena mangrove yang mati. Di Kabupaten Aceh Barat yang berhadapan langsung dengan lautan Hinda, membuat tanaman pelindung pantai hilang karena tsunami. Sementara itu, di Banda Aceh dan Aceh Besar kerusakan meliputi berkurangnya luas areal pantai sebagai akibat terjadinya penurunan daratan, perubahan sifat fisika-kimia air dan tanah karena pengaruh air laut dan endapan dari laut yang masuk ke darat, dan hilangnya sebagian besar vegetasi di kawasan pesisir.

⁷⁶ *Op.Cit, Study of Lessons Learned from Mangrove/Coastal Ecosystem Restoration Efforts in Aceh since Tsunami*, hlm. 22

Gambar 4. Foto Satelit Kondisi Ulee Lheu Sebelum dan Sesudah Tsunami⁷⁷



(Sumber : <http://www.crisp.nus.edu.sg/tsunami/tsunami.html>)

Gambar 5. Lahan yang hilang di Aceh Barat akibat Tsunami⁷⁸



Di kabupaten Nias kerusakan meliputi bertambahnya luas areal pantai sebagai akibat terjadinya pengangkatan daratan di utara Nias, berkurangnya luas areal pantai sebagai akibat terjadinya penurunan daratan di belahan timur bagian selatan dan hilangnya sebagian besar vegetasi di kawasan pesisir. Di Kabupaten Pidie kerusakan lingkungan pesisir akibat tsunami tidak terlalu parah. Namun lingkungan pesisir di kawasan ini, terutama yang dulunya merupakan kawasan hutan mangrove, memang telah banyak dialih fungsikan menjadi pertambakan jauh sebelum tsunami terjadi. Dampak yang ditimbulkan dari tsunami di kawasan ini umumnya berupa masuknya air laut ke darat. Sementara itu di Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe air laut tsunami menggenangi desa-desa dengan

⁷⁷ Diakses dari <http://www.crisp.nus.edu.sg/tsunami/tsunami.html>, pada tanggal 23 Februari 2012, pukul 16.17 WIB

⁷⁸ *Op.Cit, Study of Lessons Learned from Mangrove/Coastal Ecosystem Restoration Efforts in Aceh since Tsunami*, hlm. 23

ketinggian air sekitar 1-3 meter. Sama seperti Kabupaten Pidie, hampir semua kawasan hutan mangrove di lokasi ini telah mengalami kerusakan sebelum tsunami karena di konversi menjadi tambak dan bentuk pemanfaatan lainnya. Gambaran kerusakan ekosistem pesisir khusus mangrove dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Kerusakan juga dapat dilihat dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir Aceh dan Nias Sebelum tsunami, aktivitas ekonomi masyarakat difokuskan pada kegiatan bertani dan menangkap ikan, serta sector kehutanan yang melibatkan 47% tenaga kerja Aceh, masyarakat lainnya adalah pedagang kecil, pegawai negeri, atau bekerja di sektor jasa.⁷⁹ Rusaknya ekosistem pesisir akibat tsunami secara tidak langsung ikut mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi masyarakat Aceh dan Nias. Di bidang ekonomi, kerusakan atau kerugian akibat tsunami ini meliputi:⁸⁰

- Sektor produktif merugi senilai USD 1.2 milyar
- Proyeksi ekonomi menurun 5% di Aceh dan Nias
- 100.000 pengusaha kecil kehilangan mata pencahariannya
- 4.71 perahu nelayan hilang
- Lebih dari 20.000 hektar tambak hancur dan rusak
- 60.000 petani menganggur
- Lebih dari 70.000 lahan pertanian rusak

Di Kabupaten Simeulue, mata pencaharian masyarakat antara lain petani (termasuk perkebunan dan peternakan), nelayan, pekerja bangunan dan pengolahan kopra. Sebagian masyarakat yang berada di pesisir bekerja sebagai nelayan. Tsunami telah merusak sarana perikanan seperti perahu, alat tangkap dan keramba milik penampung. Warga Desa Alus Alus sebagian besar masih tinggal di tempat pengungsian yang berjarak sekitar 1 km dari desa lama. Umumnya warga masih sangat trauma dengan kejadian bencana. Sebagian warga masyarakat tidak ingin berlama-lama tinggal di pengungsian dan tidak setuju

⁷⁹ Eye on Aceh, *Sebuah Agenda Rakyat? Bantuan Pasca Tsunami di Aceh*, (2006), hlm. 14

⁸⁰ BRR, *Aceh dan Nias Setahun Setelah Tsunami: Upaya Pemulihan dan Langkah Ke Depan*, (2005), hlm. 16

dengan rencana perwilayahan pemukiman yang baru. Karena wilayah pemukiman yang baru menjadikan warga kesulitan untuk melanjutkan kegiatan semula sebagai nelayan dan memaksa masyarakat harus berganti profesi. Sementara itu pengungsi dari pesisir di Desa Labuhan Bakti tidak bekerja secara maksimal, karena itu mereka tetap ingin kembali ke pemukiman semula. Masyarakat Labuhan Bakti yang berprofesi sebagai nelayan, kebanyakan menganggur karena kapal/perahu mereka rusak atau hilang. Perpindahan penduduk dari wilayah pesisir ke pegunungan, menyebabkan perubahan sosial, antara lain perubahan profesi dari nelayan menjadi petani. Selain itu, perpindahan penduduk juga telah menyebabkan konflik antar sesama warga terkait dengan status tanah, rumah dan perebutan mata pencaharian.

Di Aceh Barat, setelah terjadinya tsunami banyak warga masyarakat yang menjadi pengangguran. Masih banyak masyarakat yang tinggal di pengungsian belum memiliki pekerjaan. Hal ini disebabkan pekerjaan yang mereka lakukan tidak bisa dilakukan lagi karena kerusakan sarana dan prasarana. Di Kabupaten Pidie, rusaknya ekosistem mangrove sangat berpengaruh terhadap jumlah hasil tangkapan. Selain itu, perahu, alat tangkap pancing, jarring dan pukat darat milik nelayan telah rusak dan hancur akibat tsunami. Pada akhirnya beberapa nelayan bekerja pada sebuah perusahaan pemilik perahu dengan sistem bagi hasil. Di Kota Lhokseumawe, sebagian besar penduduk adalah petani tambak dan nelayan. Akibat bencana, tambak mengalami kerusakan. Menurut petani tambak, hasil tambak mengalami penurunan yang cukup signifikan pasca bencana. Sebagai masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan juga menurun hasil tangkapannya. Permasalahan utama yang dihadapi nelayan adalah jumlah dan kualitas alat tangkap yang kurang memadai dan kurangnya modal.

Kondisi yang memprihatinkan ini telah banyak mengundang banyak pihak untuk memberikan bantuan. Pemerintah Indonesia sendiri membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias (BRR). BRR bertugas untuk membangun kembali sumber-sumber kehidupan dan prasarana serta memperkuat masyarakat di Aceh dan Nias. Selain bantuan dari pemerintah, berbagai NGO juga ikut dalam upaya rehabilitasi Aceh pasca tsunami. Setidaknya

terdapat 76 NGO internasional maupun lokal yang terdaftar oleh BRR dalam melaksanakan aktivitas rehabilitasi mangrove. Wetlands International – Indonesia Programme (WI-IP) merupakan salah satu NGO yang ikut membantu khususnya dalam upaya rehabilitasi ekosistem pesisir.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi ekosistem pesisir, NGO menggunakan pendekatan yang berbeda-beda. Namun, rehabilitasi yang dilakukan di Aceh sendiri lebih banyak menggunakan pendekatan *cash for work*. Sedangkan, WI-IP dengan Proyek Green Coast lebih memilih untuk menggabungkan upaya rehabilitasi dan *livelihood* yang dikenal dengan pendekatan *bio-rights*. Hal ini didasari karena melihat pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh beberapa NGO dengan pendekatan *cash for work* kurang memberikan hasil yang signifikan.

Pada intinya, melalui pendekatan atau mekanisme “*cash for work*” masyarakat dilibatkan dalam kegiatan rehabilitasi dengan cara dibayar tunai yaitu sekitar Rp 35.000,- perhari.⁸¹ Penggunaan mekanisme “*cash for work*” dalam pelaksanaannya memang berhasil melibatkan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi namun sayangnya tidak menunjukkan keberhasilan rehabilitasi ekosistem pesisir itu sendiri. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor.⁸² Kegiatan penanaman umumnya dilakukan secara massal sehingga pengelolaan kegiatan sulit sekali terkontrol yang mengakibatkan sulitnya menjamin kehati-hatian dan kesungguhan peserta dalam menanam bibit. Peserta *cash for work* juga tidak dibekali informasi tentang menanam bibit. Perawatan bibit yang telah ditanam pun tidak ada, dikarenakan program *cash for work* tidak mewajibkan adanya perawatan bibit yang telah ditanam oleh peserta, selesai tanam selesai pula tanggung jawab mereka. Belajar dari sini, WI-IP memutuskan untuk menggunakan pendekatan *bio-rights*. Hal ini yang juga membuat menarik untuk melihat lebih lanjut WI-IP dalam merehabilitasi ekosistem pesisir di Aceh dan Nias.

⁸¹ Iwan Tri Cahyo Wibisono dan I Nyoman N. Suryadiputra, *Hasil Pembelajaran dari Restorasi Mangrove/Ekosistem Pesisir Aceh dan Nias Pasca Tsunami*, (Bogor: Wetlands International, 2006), hlm. 44

⁸² *Ibid.*,

3.2. Wetlands International – Indonesia Programme (WI-IP) di Aceh dan Nias Pasca Tsunami

Bencana tsunami yang menghantam Aceh dan Nias pada tahun 2004 telah mengundang berbagai pihak untuk memberikan bantuan baik dari internasional dan nasional. Bantuan ini banyak direalisasikan melalui program-program rehabilitasi yang dilakukan oleh berbagai NGO. Beberapa organisasi konservasi dan pembangunan pun datang secara bersamaan untuk mengidentifikasi cara-cara memasukkan aspek-aspek lingkungan ke dalam strategi penurunan resiko dampak bencana. Restorasi ekosistem dipertimbangkan sebagai sebuah aspek penting untuk penanggulangan bencana. Terkait dalam hal ini, WI-IP merupakan salah satu NGO lingkungan yang ikut melakukan kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir yang dikaitkan dengan pembangunan yang berkelanjutan, yaitu dikenal dengan proyek Green Coast. Pada tahun 2005 bersama dengan BRR dan BPDAS Krueng Aceh, Proyek Green Coast resmi diluncurkan. Terkait dengan BRR sendiri, Pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh, dimana salah satu tugas BRR adalah mengkoordinasi proyek-proyek rehabilitasi yang ada di Aceh.

Proyek Green Coast mendapatkan dana bantuan darurat dari SHO (*Netherlands public charity funds*) yang disalurkan oleh Oxfam Novib. Proyek ini dimulai dari Oktober 2005 sampai dengan Maret 2009, dipimpin oleh WI-IP dengan bekerjasama dengan WWF. Proyek ini berbeda dengan proyek rehabilitasi lainnya karena menggabungkan upaya rehabilitasi dan *livelihoods* dengan pendekatan yang dikemabangkan oleh Wetlands Internasional dan mitranya yaitu pendekatan bio-rights. Pendekatan ini digunakan karena melihat bahwa sebuah pendekatan masyarakat berskala kecil mungkin sangat efektif untuk mencapai tujuan-tujuan rehabilitasi dan pembangunan serta untuk menjamin keterlibatan nyata anggota masyarakat dalam rehabilitasi lingkungan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh WI-IP dalam proyek ini meliputi:

3.2.1 Assessment

Tsunami yang menghantam Aceh dan Nias berdampak kerusakan ekosistem pesisir Aceh dan Nias. WI-IP secara cepat melakukan kajian terhadap kerusakan dan kondisi Aceh dan Nias pasca tsunami. Kegiatan assessment ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi agar proyek dapat dijalankan secara efektif dan efisien. WI-IP dalam kegiatan ini mengembangkan *interactive multimedia database* yang terdiri dari data informasi lingkungan dan sosial-ekonomi.⁸³ Kegiatan ini dilakukan dari September sampai Desember 2005 (Green Coast fase I) dan dari Juni sampai Desember 2007 (Green Coast fase II).⁸⁴

Kegiatan assessment dilakukan oleh WI-IP dengan bekerja sama dengan ahli-ahli dengan membentuk tim survey WI-IP. Tim terdiri dari ahli ekologi, ahli ekonomi, spesialis rehabilitasi, spesialis *sylviculture*, ahli tanah, spesialis *biodiversity*, dan *limnologist*. WI-IP juga bekerja sama dengan CPSG (*Campus Professional Study Group*), FKH-Unsyiah dan tim survey Universitas Syah Kuala Aceh. Dalam kegiatan ini WI-IP juga bekerja sama dengan UNEP (*United Nations Environment Programme*) melalui “*UNEP-Green Data Assessment Project*”.⁸⁵ Hasil kerjasama antara WI-IP dan UNEP ini bertujuan untuk mengumpulkan, menyusun dan mengevaluasi data lingkungan Aceh dengan cakupan kegiatan meliputi: kegiatan lingkungan yang dilakukan oleh *working groups*, pertanian dan kondisi fisika kimia tanah, kehutanan di darat maupun pesisir, kawasan lindung, keanekaragaman hayati, lahan basah, perikanan laut dan darat.⁸⁶ Kegiatan dilakukan dari Agustus 2006-Oktober 2006.

WI-IP juga melakukan kajian data melalui Lokakarya bertajuk “*Perbaikan Penghidupan Masyarakat di Wilayah yang Terkena Dampak Tsunami melalui Rehabilitasi dan Pengelolaan Berkelanjutan Ekosistem*”

⁸³ WI-IP, “Green Coast: For Nature and People After the Tsunami”, dalam *Publikasi Green Coast*.

⁸⁴ I. N. N. Suryadiputra, *Kajian Kondisi Lingkungan Pasca Tsunami di Beberapa Lokasi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias*, (Bogor: WI-IP/CPSG/Univ.Syah Kuala), hlm. 3

⁸⁵ N. Sari, Fadia Miraika, Ferry Hasudungan, Lili Muslihat, dan Nyoman Suryadiputra, *Penilaian Data Lingkungan Pasca Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Bogor: WI-IP, 2006)

⁸⁶ *Op.Cit*, *Penilaian Data Lingkungan Pasca Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, hlm. 1

Pesisir".⁸⁷ Lokakarya ini dilaksanakan pada tanggal 18-19 April 2007 di Aula Bappeda. Lokakarya ini dihadiri sebanyak 67 peserta yang mewakili Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Bappeda dari 17 kabupaten Pesisir NAD dan 2 Kabupaten Nias disamping itu peserta juga berasal dari perwakilan BRR, lembaga donor, LSM/NGO, CBO, dan perguruan tinggi. Dalam lokakarya ini dibahas 3 tema utama, yaitu kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir, pemberdayaan ekonomi dan kebijakan tata ruangpesisir. Selain itu, WI-IP juga melakukan kajian data dengan menghadiri workshop di Bangkok dengan tema "*Coastal Forest Rehabilitation and Management in Asian Tsunami Affected Countries*" pada tahun 2006.⁸⁸ Workshop ini dilaksanakan oleh FAO (*Food and Agriculture Organization of the United Nations*) dengan tujuan untuk bertukar informasi mengenai rehabilitasi ekosistem pesisir pasca tsunami dan mengidentifikasi kebutuhan jangka-panjang.

WI-IP juga melakukan diskusi bersama dengan pemerintah kota dan beberapa organisasi yang terlibat dalam program rekonstruksi untuk melakukan identifikasi opsi rehabilitasi yang berbasis *sustainable development*.⁸⁹ Beberapa pertemuan juga dilakukan dengan partner WI-IP untuk mengumpulkan masukan atau rekomendasi untuk kegiatan proyek termasuk reformasi kebijakan terkait ekosistem peisisr Aceh-Nias.⁹⁰ WI-IP juga bekerja sama dengan masyarakat setempat dalam mengumpulkan data dan informasi.

⁸⁷ "Lokakarya Program Rehabilitasi Pesisir Partisipatif dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat" dalam *Warta Konservasi Lahan Basah*, Vol.15, No.2, 2007, hlm. 12

⁸⁸ Jeremy Broadhead and Robin Leslie, *Proceedings of the workshop on coastal forest rehabilitation and management in Asian tsunami-affected countries*, (Bangkok, FAO Regional Office for Asia and the Pasific, 2007)

⁸⁹ "Influencing Coastal Investments" diakses dari <http://www.wetlands.org/Whatwedo/Ouractions/GreenCoastscommunitybasedrestoration/GreenCoast2inAceh/Changingpolicies/Influencingcoastalinvestments/tabid/1197/Default.aspx>, pada tanggal 13 Maret 2012, pukul 09.44WIB

⁹⁰ WWF, *Promoting Equitable Distribution of Conservation Costs and Benefits*, (2004), hlm. 13

3.2.2. Proses Intervensi

Setelah kegiatan *assessment* dilakukan, berbagai kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir dan pengembangan mata pencaharian dalam proyek ini mulai dilaksanakan.

3.2.2.1. Partisipasi publik

Proyek Green adalah proyek yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir. Keberhasilan proyek ini sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat pesisir Aceh dan Nias, karena masyarakat merupakan pelaksana kegiatan rehabilitasi. Kegiatan rehabilitasi dilakukan di lima lokasi, yaitu Simeulue, Aceh wilayah pesisir barat, Aceh wilayah pesisir bagian utara, Aceh wilayah pesisir bagian timur dan Nias. Tanaman yang ditanam yaitu mangrove dan berbagai tanaman pantai lainnya. Dalam kegiatan rehabilitasi ini masyarakat terlibat mulai dari menanam sampai dengan merawat.

3.2.2.2. Small Grant

Proyek Green Coast merupakan proyek yang tidak hanya bertujuan untuk merehabilitasi ekosistem pesisir Aceh-Nias yang rusak akibat tsunami, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan alternatif mata pencaharian. Dalam mencapai tujuan ini, digunakan pendekatan *Bio-rights*, yaitu mekanisme pendanaan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan konservasi dan restorasi lingkungan secara berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan menyediakan pinjaman modal usaha tanpa bunga dan tanpa agunan kepada kelompok masyarakat. Sebagai kompensasinya kelompok diwajibkan menanam dan merawat sejumlah tertentu tanaman rehabilitasi selama minimal satu tahun. Apabila kegiatan rehabilitasi berhasil maka pinjaman tersebut menjadi hibah *grant* kepada masyarakat. Kegiatan rehabilitasi yang dikombinasikan dengan peningkatan mata pencaharian ini dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan NGO lokal.

Setidaknya telah terjalin kemitraan dengan lebih 51 NGO lokal untuk melakukan lebih dari 74 kegiatan rehabilitasi di Aceh dan Nias.⁹¹ Sebelum bantuan dana ini dibagikan kepada masyarakat, banyak kegiatan yang dilakukan WI-IP diantaranya sosialisasi. Sosialisasi dilakukan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dan partner lokal untuk memberi kejelasan tentang pendekatan Bio-rights dan menekankan tujuan-tujuan proyek. Selanjutnya, kelompok-kelompok masyarakat yang terdiri atas 15-40, yang tertarik, terbentuk. Dalam kegiatan sosialisasi ini, WI-IP juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan proposal kegiatan yang menggabungkan rehabilitasi dan pengembangan mata pencaharian dengan pendekatan Bio-rights.⁹²

Proses seleksi sendiri setidaknya ada tiga tahap, yaitu mengirimkan proposal kepada WI-IP, evaluasi proposal, dan keputusan. Untuk memastikan transparansi dalam proses seleksi, dibentuk *advisory committee* yang terdiri dari elemen atau institusi atau organisasi yang peduli dengan rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh, yaitu BRR, Panglima Laot, WALHI, Bapedalda, Departemen Kehutanan, dan penasihat dari organisasi perempuan dan gender. Dimana, total proposal yang diterima WI-IP ada 103 proposal, dari 103 proposal ini yang disetujui adalah 59 proposal. Pada fase II proyek GC, WI-IP tidak memerlukan lagi melakukan sosialisai kepada masyarakat dan partner lokal karena mereka sudah mengenal dan memahami konsep ini melalui proyek GC fase I.⁹³ Walaupun WI-IP tidak perlu melakukan sosialisasi, masyarakat dan partner lokal tetap diberikan kesempatan untuk mengembangkan proposal kegiatan seperti pada fase I. Namun, WI-IP memberikan perhatian yang lebih kepada mereka yang berhasil dalam implementasi kegiatan dalam lapangan di fase I. Dari proposal yang disetujui melibatkan 12 NGO lokal dan 4 CBO. Perencanaan proyek kemudian diformalkan ke dalam kesepakatan perjanjian atau kontrak secara tertulis. Kontrak ini ditandatangani oleh WI-IP, ketua NGO lokal atau ketua CBO penerima bantuan pada lokasi kegiatan proyek Bio-rights dengan ditandatangani oleh saksi, yaitu kepala desa dan/atau para tokoh/pemuka masyarakat sehingga status formal dari

⁹¹ Ita Sualia, "Program Pesisir Hijau Green Coast Project di Aceh-Nias untuk Menghadapi Perubahan Iklim Global", dalam *Warta Konservasi Lahan Basah*, Vol.15, No.3, 2007, hlm. 14

⁹² I. N. N. Suryadiputra, *Ibid*, hlm, 12-13

⁹³ *Ibid*, hlm. 30-32

kontrak mejadi lebih kuat. Kontrak ditandatangani dalam sebuah upacara resmi yang juga dihadiri oleh pegawai pemerintah setempat.

Pengembangan mata pencaharian sendiri berbeda dalam setiap lokasi proyek, tergantung pada tuntutan khusus masyarakat yang terlibat. Seperti usaha pengembangan industri rumahan, pengembangan sistem "sylvo-fishery" yaitu dengan menanam mangrove di sekitar tepi (pematang) tambak dan di tengah tambak, kegiatan beternak kambing, pengembangan usaha untuk pengolahan dan pemasaran produk makanan, dan lainnya. WI-IP dalam hal ini juga menyarankan sejumlah pilihan pengembangan alternatif mata pencaharian dan memberikan arahan kepada masyarakat agar pilihan terhadap kegiatan pengembangan mata pencaharian tersebut tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan atau menyebabkan eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan.⁹⁴

3.2.2.3. Pendidikan publik

Proyek Green Coast merupakan proyek yang ikut melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, adanya kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya ekosistem pesisir bagi mereka dan pendidikan lingkungan sangat diperlukan. Walaupun nyatanya lokal NGO yang berkerja sama dalam proyek ini adalah organisasi lingkungan, kebanyakan dari organisasi tersebut tidak memiliki pengalaman dalam merehabilitasi ekosistem pesisir sebagai kegiatan utama mereka. Melihat kondisi ini, WI-IP memberikan alokasi kegiatan khusus yaitu peningkatan kapasitas bagi organisasi ini dan CBO. Komponen peningkatan kapasitas ini meliputi pelatihan, studi banding, dan melakukan beberapa kunjungan. Selain itu, bahan material seperti petunjuk praktis, leaflets dan booklet terkait permasalahan teknis juga dikembangkan dan didistribusikan kepada partner lokal dan CBO.

⁹⁴ *Ibid.*. 139

Kegiatan peningkatan kapasitas lebih banyak dilakukan melalui pelatihan-pelatihan.⁹⁵ Pelatihan ini meliputi 'kursus' mengenai rehabilitasi dan ekosistem pesisir. Topik utama yaitu pengenalan terhadap ekosistem mangrove, tanaman pantai, dan prosedur rehabilitasi mangrove dan hutan pantai. Keahlian teknis juga diajarkan melalui pelatihan-pelatihan. Keahlian teknis yang diajarkan mencakup teknik memilih dan menyiapkan bibit di dalam persemaian, menetapkan lokasi penanaman, menanam dan merawat bibit di lokasi penanaman. Pelatihan dengan topik manajemen dan administrasi keuangan lembaga dan pengelolaan kelembagaan kelompok masyarakat juga dilakukan.⁹⁶ Pelatihan dengan topik ini untuk membantu partner lokal dalam manajemen dana dan administrasi keuangan. Selain itu, pelatihan terkait manajemen modal usaha bergulir juga dilakukan. Pelatihan ini dilakukan bekerja sama dengan Yayasan Peramu Bogor (YPB Foundation).⁹⁷ Pelatihan ini diikuti oleh 5 fasilitator CBO, WI-IP, 10 perwakilan dari lokal NGO. Selain itu, pelatihan ini juga diberikan kepada kelompok masyarakat dari enam desa yaitu desa Krueng Tunong, Gie Jong, Keude Unga, Lam Ujong dan Gampang Baro.

WI-IP juga bekerja sama dengan UNEP melakukan twinning program.⁹⁸ Program ini dilakukan untuk kelompok masyarakat binaan di Aceh khususnya Desa Lham Ujong dan Pulot. Perwakilan dari masing-masing kelompok dikirim ke Pemalang untuk melihat secara langsung praktek kegiatan ekonomi yang menerapkan konsep silvofishery. Total peserta berjumlah 25 orang. Program ini disebut twinning program berupa program pengembaran antara kegiatan yang telah dilakukan oleh kelompok masyarakat di Pemalang, yang terlebih dahulu dibina oleh WIIP, dengan kelompok masyarakat Aceh.

Kegiatan ini terdiri dari kegiatan pelatihan di Bogor dan Pemalang yang dilakukan selama 11 hari mulai dari tanggal 26 November sampai 6 Desember

⁹⁵ "Rehabilitasi Ekosistem Pesisir di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya" dalam *Green Coast: For nature and people after the tsunami*, publikasi WI-IP.

⁹⁶ Ita Sualia dan Eko Budi P, "Empat Tahun Partisipasi Proyek Green Coast dalam Upaya Rehabilitasi Pesisir", dalam *Warta Konservasi Lahan Basah*, Juli 2009, hlm. 13

⁹⁷ I. N. N. Suryadiputra, *Ibid*, hlm. 56

⁹⁸ Telly Kurniasari. "Twinning Program: Program Studi Banding untuk kelompok Masyarakat Binaan Aceh ke Pemalang (Jawa Tengah)", dalam *Warta Konservasi Lahan Basah*, Juli 2007, hlm. 9

2006, dan kegiatan praktek langsung dengan mendatangkan trainer ke Aceh selama 7 hari dari tanggal 22 Januari 2007. Pelatihan kegiatan ekonomi yang diberikan meliputi pelatihan budidaya sayuran hidroponik, pelatihan budidaya lele dan teknik pemijahannya, pelatihan budidaya ikan nila, pelatihan silvofishery, pelatihan budidaya ikan kepiting keramba, pelatihan budidaya melati di sekitar dan di dalam kolam/tambak, pelatihan pembuatan krupuk udang, pelatihan pembuatan terasu, pelatihan beternak itik dan puyuh, pelatihan pembuatan pupuk bokashi. Untuk mendukung pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan, WI-IP membuat berbagai buku panduan lapangan. Bersama CARE International Indonesia, WI-IP juga memberikan bimbingan teknis terhadap kalangan LSM di Kab. Simeulue pada tanggal 6 September 2005.

Dalam proyek ini, juga diberikan pelatihan teknik dan strategi kampanye lingkungan. Hal ini mengingat partner lokal yang strategis dalam menyebarkan pesan lingkungan kepada masyarakat yang tinggal di sepanjang pesisir Aceh dan Nias. Berbagai teknik dan pendekatan terkait kampanye lingkungan diajarkan bersama dengan pemahaman dan pengetahuan untuk menginterpretasikan berbagai material peningkatan kesadaran dan teknik dalam menyampaikan pesan lingkungan kepada masyarakat secara sederhana dan efektif.⁹⁹ Selain itu, pelatihan juga dilakukan terkait dalam pemahaman kebijakan. Pelatihan diberikan dengan tujuan partner lokal dapat menganalisa sebuah kebijakan, dengan berbasis pada ekosistem pesisir dan sektor ekonomi.

3.2.2.4. Awareness Raising

Selain peningkatan kapasitas, WI-IP juga menekankan komponen peningkatan kesadaran lingkungan terutama kesadaran terhadap keberlangsungan ekosistem pesisir. Peningkatan kesadaran ini tidak hanya ditujukan untuk masyarakat luas tetapi juga ditujukan untuk pemerintah, NGO lokal, CBO, lembaga pendidikan, dan sektor privat.¹⁰⁰ Berbagai kegiatan dilakukan dalam komponen ini. Seperti mengembangkan berbagai material kampanye lingkungan

⁹⁹ I. N. N. Suryadiputra, *Ibid*, hlm. 56

¹⁰⁰ I. N. N. Suryadiputra, *Ibid*, hlm. 59

yang terdiri dari poster, leaflet, booklet, flyers dan stiker. Semua bahan material ini memuat pesan lingkungan, terutama mengenai pentingnya mangrove dan konservasi mangrove. Sedangkan untuk masyarakat luas, peningkatan kesadaran terhadap lingkungan terutama ekosistem pesisir lebih menjadi prioritas. Penyebaran material ini dilakukan dengan kerja sama dengan partner lokal dan jaringan KuALA.¹⁰¹ Penyebaran ini juga dilakukan ketika terdapat kegiatan lingkungan seperti pameran dan acara lainnya.

Peningkatan kesadaran juga diwujudkan dalam kegiatan pendidikan lingkungan dan pembangunan pusat kajian. Kegiatan pendidikan lingkungan yang dilakukan berupa pemutaran film dokumenter, lomba cerdas-cermat, kompetisi menanam mangrove, lomba lukis untuk pelajar tingkat Sekolah Dasar.¹⁰² Selain itu, WI-IP juga bekerja sama dengan Yayasan Lebah dalam kegiatan pendidikan lingkungan ini. Yayasan Lebah ikut mengembangkan kegiatan rutin pendidikan lingkungan hidup terutama berkaitan dengan pengelolaan ekosistem pesisir bagi murid-murid tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh.¹⁰³

Tidak hanya itu, Yayasan Lebah juga mendukung upaya minimal satu SD di lokasi terdekat untuk memperoleh predikat SD Adiwiyata Nasional dengan memberikan pelatihan pengembangan kurikulum berbasis lingkungan, menciptakan budaya sekolah yang ramah lingkungan melalui pengelolaan sampah, dan penghijauan sekolah.¹⁰⁴ Penghargaan Adiwiyata sendiri merupakan salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.¹⁰⁵ Adapun tujuan pemberian penghargaan Adiwiyata ini adalah sebagai wujud apresiasi atas usaha yang telah dilakukan sekolah dalam upaya melaksanakan perlindungan dan pengelolaan dalam proses pembelajaran; sebagai tanda bahwa suatu sekolah telah melaksanakan empat komponen sekolah

¹⁰¹ I. N. N. Suryadiputra, *Ibid*, hlm. 59

¹⁰² Iwan Tri Cahyo Wibisono dan I Nyoman N Suryadiputra, *Hasil Studi Pembelajaran dari Restorasi Mangrove/Ekosistem Pesisir di Aceh dan Nias Pasca Tsunami*, (Bogor, 2006), hlm. 85

¹⁰³ "Percontohan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir di Kawasan Kuala Gigeng Kabupaten Aceh Besar" dalam *Green Coast: For nature and people after the tsunami*

¹⁰⁴ *Ibid*.

¹⁰⁵ "Adiwiyata", diakses dari <http://www.menlh.go.id/category/program-unggulan/adiwiyata/>,

adhiyata (kebijakan berwawasan lingkungan, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif dan pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan); sebagai dasar untuk pelaksanaan pembinaan program adhiyata yang harus dilaksanakan oleh pihak kabupaten/kota, provinsi dan pusat.¹⁰⁶ Untuk memperkuat kegiatan pendidikan lingkungan ini, WI-IP turut menyebarkan berbagai materi kampanye lingkungan, seperti poster, leaflet, brosur, komik, dan plang himbauan. BRR juga bekerja sama dengan membuat buku panduan yang berjudul "Penanaman Mangrove Bersama Masyarakat".¹⁰⁷ Buku ini disebarluaskan ke masyarakat luas di berbagai wilayah pesisir Aceh dan Nias.

Peningkatan kesadaran juga dilakukan dengan membangun pusat kajian ekosistem pesisir. Dalam membangun pusat kajian ekosistem pesisir (PKEP), WI-IP bekerja sama kembali dengan Yayasan Lebah. Pusat kajian ini berada di Kahju (*Center for Kahju Coastal Ecosystems Study*) dan Gampong Baro. Pusat Kajian ini dibangun dan dikelola untuk digunakan oleh anak-anak sekolah maupun masyarakat umum sebagai tempat untuk mempelajari dan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan akan fungsi ekosistem pesisir.¹⁰⁸ Sudah banyak kegiatan yang dilakukan PKEP sejak berdiri, diantaranya yaitu melanjutkan sejumlah kajian keanekaragaman hayati melalui observasi, melanjutkan pemulihan ekosistem pesisir dengan penanaman mangrove dan vegetasi pantai, pemberdayaan masyarakat setempat, sebagai frontline pendidikan lingkungan.¹⁰⁹ Kegiatan lain yaitu kegiatan penghitungan cadangan karbon dan pengembangan ekowisata yang keseluruhan kegiatan ditujukan untuk konservasi lingkungan hidup serta penyadaran, pendidikan, dan peningkatan taraf hidup masyarakat luas. Tidak hanya menjadi pusat pembelajaran terkait ekosistem pesisir, PKEP juga menjadi tempat untuk memasarkan produk kerajinan tangan dan makanan yang dibuat oleh kelompok masyarakat. Selain itu, pusat kajian juga telah dimanfaatkan

¹⁰⁶ "Implementasi Komponen dan Standar Adhiyata", diakses dari <http://www.menlh.go.id/implementasi-komponen-dan-standar-adhiyata/>,

¹⁰⁷ "BRR Luncurkan Program Penghijauan Pesisir", diakses dari http://www.e-aceh-nias.org/media_center/press_release.aspx?id=22&language=IN

¹⁰⁸ "Percontohan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir di Kawasan Kuala Gigeng Kabupaten Aceh Besar", *Op.Cit*

¹⁰⁹ "Pusat Kajian Ekosistem Pesisir (PKEP) Gampong Baro, Apa Saja Disana?", dalam Talkshow Radio Rumoh PMI 104FM, Rabu 01 Desember 2010, pukul 17.00-18.00 WIB

oleh masyarakat setempat atau para nelayan sebagai tempat diskusi dan beristirahat sebelum dan setelah melaut.¹¹⁰

3.2.2.5. Advokasi

Untuk menjamin kelestarian ekosistem, WI-IP juga melakukan inisiasi advokasi kebijakan di tingkat desa. Terbentuknya suatu peraturan yang disepakati oleh warga dan pemerintahan desa. Peraturan ini disusun dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa. Peraturan yang telah disahkan antara lain oleh Keuchik Gampong/Desa Krueng Tunong pada tanggal 10 September 2008 Nomor 11.14.05.03.2022/338/2008.¹¹¹ Peraturan ini mengenai perlindungan dan pelestarian tanaman mangrove dan hutan pantai serta pemanfaatannya di Muara Krueng Sawah Kameng. Dalam peraturan ini terdapat setidaknya 11 peraturan seperti pelarangan dalam merusak ekosistem pesisir. Peraturan ini juga mengatur sanksi-sanksi apabila peraturan yang telah disepakati tersebut dilanggar. Selain itu, WI-IP bekerja sama dengan Pusat Gerakan dan Advokasi Rakyat (PUGAR), Panglima Laot dan Kelompok Masyarakat Udeep Saree membentuk Daerah Perlindungan Laut (DPL) seluas 20 ha dan Badan Pengelola DPL di Anoi Item.¹¹² Panglima Laot merupakan pemimpin di antara nelayan dan memiliki hak dan kewajiban terkait penerapan sanksi untuk pelanggaran yang dilakukan. Panglima Laot telah melakukan pengawasan melalui patrol laut terhadap penangkapan ikan secara destruktif di Anoi Item dan telah menetapkan adanya suatu kawasan larangan tangkap di sekitar daerah pemijahan (*spawning ground*) dan pengasuhan (*nursery ground*). WI-IP bersama ketiga organisasi tersebut juga melaksanakan diskusi publik yang melibatkan PemKo Sabang, Majelis Adat, dan TNI-AL dalam rangka proses adopsi peraturan DPL oleh PemKo Sabang. Di Nias, WI-IP juga berupaya melakukan penyelamatan ekosistem Laguna Teluk Belukar. Dalam rangka pemantapan status kawasan tersebut dilakukan beberapa upaya baik di

¹¹⁰ “4 Tahun Kemitraan LEBah dalam Kegiatan Rehabilitasi Pesisir di Kawasan Kecamatan Baitussalam dan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar”, dalam *Publikasi Lebah*.

¹¹¹ “Rehabilitasi Ekosistem Pesisir di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya”, hlm. 6

¹¹² “Perlindungan Ekosistem Terumbu karang oleh Masyarakat bagi Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan di Pulau Weh/Sabang, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam”, hlm. 2-3

tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten dengan pendekatan diantaranya pengembangan kebijakan yaitu dengan menyusun dokumen Rencana Aksi Pengelolaan Ekosistem Laguna Teluk Belukar.¹¹³ Dokumen ini kemudian disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait.

Selain itu, WI-IP juga bekerja sama dengan WWF dalam advokasi kebijakan di tingkat yang lebih tinggi lagi. Pengembangan kebijakan dan advokasi dilakukan untuk menciptakan sebuah kerangka kebijakan yang mampu mendukung kelanjutan dan keberlangsungan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan terkait hal ini meliputi analisis *stakeholder*, pengumpulan data atau informasi, peningkatan kesadaran, *legal drafting*, dan lobi. Kegiatan-kegiatan ini adalah bagian dari advokasi untuk mengkritisi kebijakan yang sudah ada atau pun untuk mengembangkan kebijakan yang baru. Dalam mengkritisi kebijakan terkait dengan pengelolaan pesisir di Aceh, beberapa langkah penting perlu dilakukan. Berdasarkan data dan informasi, dihasilkan *assessment* legal drafting, diikuti oleh konsultasi publik sampai dokumen “semi final” selesai. Untuk memperoleh masukan dari publik, dokumen final di-*review* dalam konsultasi publik sebelum diundangkan secara luas.

Kebijakan ini tentu harus diterima dan dapat mengakomodasi harapan publik. Oleh karena itu dilakukan dua pendekatan. Pertama, policy reviews. Pendekatan policy review lebih berfokus pada berbagai peraturan (baik peraturan pemerintah dan hukum adat laot) yang sudah ada baik sebelum dan sesudah tsunami. Setidaknya 43 peraturan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir yang sudah diidentifikasi dan dianalisa untuk menemukan relevansi kebijakan ini untuk kondisi pasca tsunami. Kedua, on ground input. Dari pengalaman yang sudah ada, mengindikasikan bahwa penerimaan publik terhadap sebuah kebijakan merupakan hal yang krusial dalam aplikasi kebijakan tersebut di lapangan. Oleh karena itu, proses pengembangan kebijakan harus mengakomodasi aspirasi dan opini masyarakat. Sosialisasi dan berbagai pertemuan merupakan media yang cocok untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pihak yang terkait, termasuk

¹¹³ I. N. N. Suryadiputra, I. T. C. Wibisono, Ita Sualia, dan Ferry Hasudungan, *Pengelolaan Lahan Basah Pesisir dan Pengurangan Resiko Bencana di Indonesia*, (Bogor, WI-IP, 2009), hlm. 103

pemerintah, NGO lokal dan masyarakat. Berbagai pertemuan ini dilaksanakan selama proyek Green Coast.

Untuk membuat proses advokasi di Aceh efektif, dalam proyek Green Coat dibuat forum dengan nama KuALA (Koalisi untuk Advokasi Laut Aceh). Jaringan ini dibangun pada tanggal 3 Oktober 2007 berpusat di Banda Aceh dengan cakupan kerja meliputi seluruh wilayah provinsi Aceh. Misi utama KuALA adalah konservasi ekosistem pesisir dan laut untuk kesejahteraan masyarakat. KuALA memiliki tiga fokus, seperti yang diungkapkan oleh Arif Syah Nasution,¹¹⁴

“...kita coba fokus ke 3 isu sesuai dengan visi kita terwujudnya kelestarian ekosistem pesisir dan laut untuk kesejahteraan masyarakat, ada 3 misi yang kita emban, yang pertama mendorong adanya kebijakan yang pro rakyat, baik itu dari aspek mengurangi kerentanan mereka terhadap dampak ekologis dan juga dampak ekonomi dengan konteks sosial-ekonomi di kawasan pesisir. Kedua kita juga mencoba menempatkan dan mendorong dan juga mengadvokasi masyarakat sebagai salah satu pemeran utama jadi mereka mempunyai hak kelola atas sumberdaya alam pesisir dan laut. Ketiga kita menyadari untuk misi pertama dan kedua kita butuh sumberdaya manusia untuk mencoba memberikan sebuah seperti konsep paper kepada pemerintah dan masyarakat sehingga capacity building untuk jaringan KuALA juga menjadi concern bagi KuALA saat ini.”

Sedangkan untuk tindakan-tindakan prioritas KuALA meliputi penyusunan Draft Qanun Ilegal dan Destructive Fishing, penyusunan tata ruang pesisir dan laut di 5 kawasan kecamatan, penyebaran brosur, kampanye anti pencemaran, penanaman mangrove di kawasan pesisir, pelatihan microfinacial, kerjasama dengan pihak terkait untuk menyebar info, hearing (diskusi publik) dan pertemuan desa. Anggota jaringan KuALA terdiri dari NGO,

¹¹⁴ Dikutip dari Talkshow Radio Rumoh PMI dengan tema “Jaringan KuALA”, pada tanggal 19 September 2010

3.2.3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)¹¹⁵

Tujuan dari monitoring adalah untuk memeriksa pelaksanaan proyek di lapangan, Dari kegiatan monitoring ini akan menghasilkan masukan atau rekomendasi terkait realisasi dari aktivitas yang dilakukan di lapangan. Monitoring dilakukan oleh tim yang terdiri dari staff WI-IP. Untuk mempermudah kegiatan monitoring di lapangan dibentuk tim teknis yang terdiri dari tiga spesialis teknis local yang mewakili wilayah proyek, Dalam mengumpulkan data dan melaksanakan monitoring dikembangkan dua format questionnaire sebagai petunjuk dan referensi tim teknis. Questionnaire pertama terkait aktivitas rehabilitasi dan termasuk beberapa hal yang meliputi jumlah bibit yang ditanam, jenis tanaman, proses persiapan penanaman, kondisi lokasi penanaman, dan lainnya. Sedangkan questionnaire kedua terkait aktivitas pengembangan mata pencaharian dan termasuk beberapa hal yang meliputi jenis aktivitas ekonomi, kesempatan pasar, preferensi masyarakat, proses pemilihan alternatif mata pencaharian.

Sebelum kegiatan monitoring dilakukan, tim teknis diberikan pelatihan. Tim teknis diajarkan untuk memahami dan menginterpretasi konten dari questionnaire sebelum terjun ke lapangan untuk melakukan monitoring. Setelah dilakukan uji coba di beberapa lokasi rehabilitasi, tim teknis baru dikatakan mampu untuk melakukan monitoring. Salah satu komponen rehabilitasi dalam kegiatan monitoring adalah untuk menghitung persentase bertahannya tanaman. Sedangkan komponen ekonomi dalam kegiatan monitoring adalah proses manajemen kegiatan dan dampaknya terhadap status ekonomi masyarakat.

Selama proyek GC, kegiatan monitoring dilakukan dalam enam kali, yaitu tiga kali dalam GC 1 dan tiga kali dalam GC 2. Kegiatan monitoring pertama dilakukan pada saat proyek pertama dilakukan. Kegiatan monitoring kedua dilakukan selama proyek berlangsung. Untuk kegiatan monitoring yang kedua, dilakukan untuk mengetahui progres kegiatan proyek. Kegiatan monitoring ketiga dilakukan sesaat sebelum proyek berakhir untuk mengetahui hasil dari kegiatan proyek. Tim monitoring tidak mendatangi seluruh lokasi proyek tetapi hanya

¹¹⁵ *Ibid, An Assessment of Lesson Learnt from the Green Coast Project*, hlm.

beberapa lokasi saja. Setiap aktivitas, tim monitoring melakukan dokumentasi. Kegiatan monitoring, baik GC1 dan GC 2 juga dilakukan secara eksternal oleh BRR dan Oxfam Novib melalui konsultan independen mereka.

Monitoring yang dilakukan secara eksternal oleh BRR dan Oxfam juga merupakan hal yang penting. Hasil monitoring biasanya menjadi bahan untuk dokumentasi-dokumentasi mereka, Biasanya berupa dokumentasi evaluasi akhir mereka. Oxfam dalam dokumen evaluasi akhirnya mengungkapkan bahwa proyek Green Coast merupakan contoh yang baik dalam pengembangan partisipasi.¹¹⁶ Dalam hal ini, proyek dilaksanakan juga memperhatikan kapasitas lokal dan keterlibatan mereka. Selain itu, proyek ini membantu masyarakat untuk membangun kembali perekonomian mereka dan juga merehabilitasi ekosistem pesisir.

¹¹⁶ Oxfam, *Oxfam International Tsunami Fund Final Evaluation: Downward Accountability Review Executive Summary*, (2009).

BAB IV

ANALISA

Proyek Green Coast merupakan proyek rehabilitasi pasca tsunami Aceh, dimana proyek ini tidak hanya melakukan upaya merehabilitasi ekosistem pesisir yang rusak akibat tsunami tetapi juga menggabungkan upaya rehabilitasi ini dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Aceh dan Nias. Dalam hal ini, tentu saja diperlukan strategi-strategi dalam mencapai tujuan proyek Green Coast. Keterlibatan berbagai pihak seperti masyarakat, NGO internasional dan lokal, badan pemerintah, dan lainnya juga memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan proyek ini. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan terkait kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh WI-IP dalam proyek Green Coast. Dalam bab ini, peneliti akan menganalisa strategi yang digunakan oleh WI-IP dalam proyek Green Coast dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Untuk mengeksplor strategi yang digunakan WI-IP, peneliti melihat kembali pada tipologi strategi yang ada dalam teori Sikkink dan Keck. Dalam bab ini, juga akan dijelaskan jejaring atau kerjasama yang terjalin dalam proyek ini dan juga bagaimana prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan diterapkan dalam proyek Green Coast.

4.1. Metode Kerja Advokasi

Sikkink dan Keck mengidentifikasikan terdapat empat strategi yang digunakan dalam jejaring advokasi, yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, *accountability politics*. Dengan tipologi strategi Sikkink dan Keck ini, akan dieksplor lebih lanjut terkait strategi-strategi yang digunakan oleh WI-IP dalam proyek Green Coast.

Information politics

Salah satu strategi yang kuat dalam jaringan advokasi adalah kontrol atas informasi. Dalam hal ini, mereka mendapatkan pengaruh dengan memobilisasi

informasi sebagai strategi untuk advokasi. Untuk memotivasi orang untuk bertindak, mereka perlu memahami mengapa masalah yang sedang dibahas merupakan masalah yang penting bagi mereka. Kelebihan jaringan advokasi dalam strategi ini adalah dapat menyediakan informasi dengan cakupan yang lebih luas. Informasi ini berpengaruh bukan hanya karena isinya, tetapi juga karena cara-cara bagaimana informasi ini dikomunikasikan. Cara-cara informasi ini dikomunikasikan antara lain:

- Secara cepat. Karena memiliki *network* yang luas, mereka mampu untuk mendapatkan akses informasi bahkan mereka dapat memperoleh informasi yang akan hilang atau ditekan. Informasi ini kemudian dibagikan dalam jaringan dengan pengembangan teknologi komunikasi. Seperti melalui internet, dimana informasi yang penting dapat dibagikan dengan cepat.
- Secara kredibel. Untuk dianggap serius, informasi haruslah kredibel. Jaringan advokasi sering menggunakan pengumpulan informasi yang canggih dan metode analisis yang efektif. Dalam hal ini, dilibatkan ahli untuk dapat mengumpulkan dan menyajikan informasi yang dapat dipercaya.
- Secara dramatis. Laporan teknis dapat memberikan informasi penting. Namun, untuk menarik perhatian orang, laporan teknis saja tidak cukup. Oleh karena itu, jaringan advokasi seringkali mengkomunikasikan informasi yang menyediakan fakta-fakta dengan wajah manusia. Tujuannya tidak hanya untuk membuat orang-orang mengetahui sebuah isu yang sedang dibahas, tetapi juga membuat orang merasakan.

Dalam hal ini, indikator dalam *information politics* ini adalah adanya pengumpulan dan mobilisasi informasi.

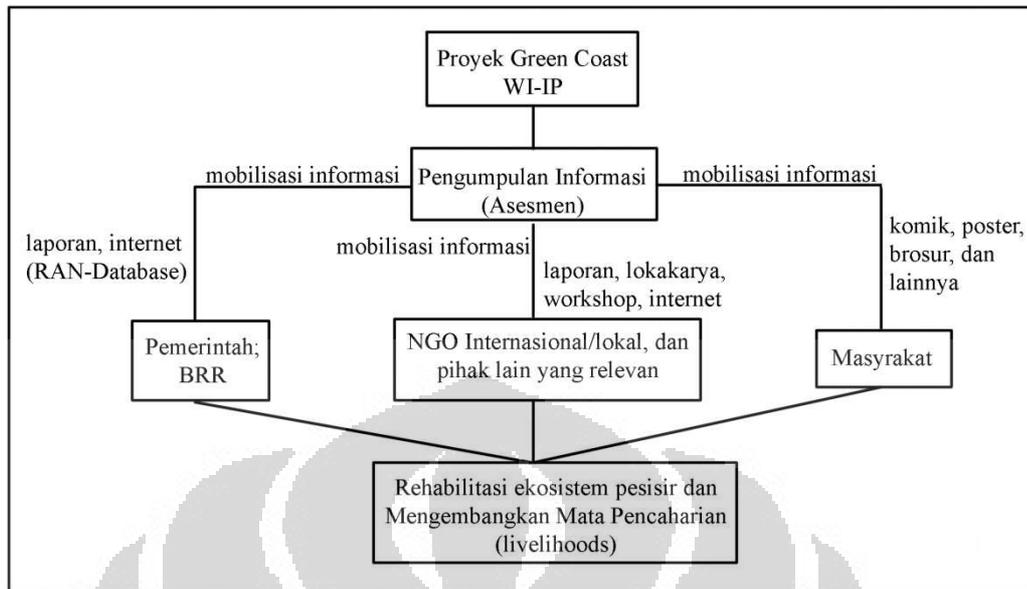
Dalam proyek Green Coast, WI-IP telah melakukan berbagai kegiatan dalam mengumpulkan informasi, yaitu dalam kegiatan asesmen. Kegiatan asesmen yang dilakukan oleh WI-IP merupakan kegiatan asesmen terhadap kerusakan akibat tsunami di Aceh dan Nias. Kegiatan ini dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti institusi pendidikan yang berada di Aceh. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan akses informasi yang lebih mudah. WI-IP juga membentuk tim dengan berbagai ahli di dalamnya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data yang kredibel. Berbeda dengan asesmen

yang dilakukan oleh pihak lain, asesmen yang dilakukan oleh WI-IP tidak hanya mengumpulkan informasi terkait kerusakan lingkungan yaitu kerusakan ekosistem pesisir tetapi juga mengumpulkan informasi terkait dampak tsunami terhadap masyarakat seperti kondisi sosial-ekonomi mereka. Hal ini membuat WI-IP berhasil untuk menjembatani informasi terkait kerusakan lingkungan dan informasi terkait kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dengan informasi ini, WI-IP dapat mengembangkan berbagai kegiatan yang menggabungkan upaya rehabilitasi ekosistem pesisir dan *livelihoods*. Dimana, program rehabilitasi lainnya cenderung untuk lebih terfokus kepada perbaikan infrastruktur atau rehabilitasi lingkungan saja.

Selain dengan melakukan kajian secara langsung, pengumpulan informasi juga dilakukan dengan lokakarya dan workshop. Dengan kegiatan semacam ini, WI-IP tidak hanya dapat memperoleh informasi tetapi juga terdapat *sharing* informasi. Dengan informasi-informasi yang telah dikumpulkan, WI-IP berhasil mempublikasikan berbagai laporan. Setidaknya sudah terdapat delapan laporan mengenai kerusakan Aceh dan Nias pasca tsunami yang telah dipublikasikan oleh WI-IP. Laporan-laporan ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang membutuhkan termasuk kepada organisasi yang melakukan rehabilitasi pasca tsunami Aceh. Laporan-laporan yang dipublikasikan oleh WI-IP dalam proyek ini juga secara rutin diteruskan kepada BRR. Dengan melakukan kegiatan ini, memungkinkan komunikasi terus berjalan dengan BRR. Terkait dengan hal ini, BRR mengembangkan *RAN-Database*. *RAN-Database* dikembangkan dengan tujuan untuk mempermudah BRR dalam mengkoordinasi proyek-proyek rehabilitasi pasca tsunami yang dilakukan di Aceh.

Informasi yang telah dikumpulkan oleh WI-IP juga disebarluaskan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui kerusakan ekosistem pesisir akibat tsunami dan pentingnya ekosistem pesisir bagi kehidupan mereka sehingga mereka mau terlibat dalam kegiatan rehabilitasi. Agar menarik untuk masyarakat, informasi ini diolah dengan format yang berbeda seperti komik, poster, brosur dan lainnya.

Gambar 6. Strategi *information politics* dalam proyek Green Coast¹¹⁷



Pengumpulan informasi yang dilakukan oleh WI-IP dijadikan sebagai input dan rekomendasi terkait pelaksanaan proyek Green Coast lebih lanjut. Dalam hal ini, upaya rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi fokus dan isu yang secara tidak langsung ingin diangkat oleh WI-IP. Dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi yang berjalan di Aceh dan Nias belum banyak pihak yang memberikan perhatian secara khusus terhadap rehabilitasi ekosistem pesisir yang sistematis dan berkelanjutan. Rehabilitasi yang ada lebih bersifat parsial, padahal kerusakan kawasan pesisir dan rehabilitasinya tidak dapat dipisahkan dari aspek ekologi, sosial, budaya dan ekonomi. Dengan memobilisasi informasi kepada seluruh pihak yang terkait, diharapkan rehabilitasi ekosistem pesisir di masa yang akan datang akan lebih memperhatikan aspek-aspek tersebut. Lebih khusus lagi, masyarakat mau terlibat langsung dalam kegiatan rehabilitasi proyek Green Coast.

¹¹⁷ Skema strategi *information politics* dibuat oleh peneliti untuk mempermudah menganalisa strategi *information politics* WI-IP dalam proyek Green Coast.

Symbolic politics

Strategi ini merupakan kemampuan untuk menggunakan simbol, aksi atau cerita yang masuk akal dari sebuah situasi untuk mempengaruhi pihak lain yang jauh jaraknya. Dalam hal ini, *symbolic politics* melibatkan penggunaan simbol yang kuat atau pun cerita-cerita untuk mempublikasikan sebuah isu. Penggunaan strategi ini dapat dilihat terkait persoalan masyarakat pribumi di Amerika. Pemberian penghargaan *Nobel Peace Prize* kepada Rigoberta Menchu misalnya, dapat mempertinggi kesadaran publik terhadap situasi masyarakat pribumi di Amerika. Atau kemampuan pergerakan masyarakat pribumi dalam menggunakan perayaan 500 tahun perjalanan Columbus ke Amerika untuk menaikkan isu pribumi, merupakan salah satu contoh kemampuan jejaring dalam menggunakan simbol peristiwa untuk membentuk pemahaman. Interpretasi sebuah simbol pada dasarnya merupakan bagian dari proses persuasi, dimana jejaring membangun sebuah kesadaran dan memperluas pengikut. Dalam hal ini, indikator dalam *symbolic politics* adalah penggunaan berbagai macam simbol untuk menaikkan isu.

Dalam proyek Green Coast, tidak terlihat WI-IP menggunakan strategi ini. Walaupun sebenarnya terdapat simbol-simbol atau cerita-cerita berpotensi untuk dapat dikembangkan dalam proyek ini. Seperti cerita Azhar, salah satu masyarakat Desa Lam Ujong Aceh. Azhar merupakan masyarakat Aceh pada umumnya yang juga terkena dampak tsunami pada tahun 2004. Namun yang menjadi berbeda adalah ketika masyarakat lain memikirkan kebutuhan mendesak mereka seperti makanan dan rumah, Azhar justru mencari tanaman yang bisa ditanam. Keterbatasan dan dan bantuan ketika itu tidak mematahkan usaha Azhar untuk menanam kembali bibit bakau. Azhar memiliki keyakinan bakau dapat melindungi desanya dari gelombang, angin kencang, abrasi, dan mengembalikan udang, ikan dan kepiting. Alih-alih mencari kebutuhan dasarnya, Azhar justru pergi untuk menanam bakau. Karena tindakan ini, Azhar seringkali dianggap gila oleh masyarakat lainnya. Ketika WI-IP datang dan melakukan pendekatan, Azhar merupakan sosok yang dicari oleh WI-IP yaitu seseorang yang peduli dengan lingkungan dan masyarakat sekitar.

Sosok Azhar seharusnya bisa dikembangkan menjadi sebuah cerita luarbiasa yang dapat menarik perhatian masyarakat. WI-IP dapat mengkaitkan cerita Azhar ini dengan pentingnya menjaga ekosistem pesisir dimana masyarakat pesisir dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka tanpa merusak ekosistem pesisir. Dalam hal ini, dengan kesamaan nasib sebagai korban tsunami dan sebagai masyarakat Aceh, cerita Azhar seharusnya bisa menimbulkan kesadaran masyarakat Aceh dan Nias. Walaupun cerita Azhar ini pernah dimuat dalam media internet, namun sayangnya cerita ini tidak dikembangkan menjadi strategi yang cukup efektif dalam menarik masyarakat untuk terlibat dalam proyek ini.

Leverage Politics

Strategi ini merupakan kemampuan untuk menggunakan aktor yang kuat untuk mempengaruhi situasi dimana anggota terlemah dari jejaring tidak mungkin memiliki pengaruh. Dalam hal ini terdapat situasi dimana anggota memiliki kemampuan terbatas dalam mengubah keadaan. Dengan bekerjasama dengan aktor yang lebih kuat, jaringan advokasi dapat memperoleh pengaruh yang lebih besar untuk perubahan. Dalam hal ini, indikator dalam *leverage politics* adalah adanya pelibatan aktor yang kuat untuk perubahan.

Dalam proyek Green Coast, terdapat beberapa kendala yang dihadapi WI-IP. Salah satu kendala tersebut adalah rendahnya minat masyarakat terhadap proyek rehabilitasi ekosistem pesisir. Seperti, di Desa Lafau dan Lahewa. Persepsi dan minat masyarakat terhadap kegiatan rehabilitasi sangat rendah. Masyarakat kurang menunjukkan antusias dan semangat terhadap kegiatan-kegiatan baru, terlebih yang mensosialisasikan kegiatan tersebut adalah para pendatang. Masyarakat cenderung tertutup dan sulit menerima suatu ide atau inovasi kegiatan baru. Rendahnya minat dan persepsi masyarakat terhadap kegiatan rehabilitasi juga terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga lain termasuk NGO. Hal ini karena masyarakat menganggap mereka lambat dalam membantu menanggulangi kondisi sosial ekonomi masyarakat pada saat

tanggap darurat. Sehingga dalam masyarakat pihak lembaga atau NGO memberikan kesan hanya sekedar memberikan janji.

Untuk menghadapi kendala seperti ini, diperlukan aktor yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Dengan pelibatan aktor yang berpengaruh dalam masyarakat, setidaknya tingkat kecurigaan masyarakat terhadap pendatang dapat ditekan. Untuk meningkatkan minat dan persepsi masyarakat terhadap kegiatan rehabilitasi, WI-IP melakukan kerjasama dengan Panglima Laot dengan melakukan suatu pendekatan sosial-budaya yang khas. Panglima Laot merupakan suatu struktur adat di kalangan masyarakat nelayan di propinsi NAD, yang bertugas memimpin Hukum Adat Laot. Panglima Laot sebenarnya berada di luar struktur organisasi pemerintahan, tetapi bertanggungjawab kepada kepala daerah setempat. Dalam hal ini, Panglima Laot merupakan salah satu aktor yang berpengaruh dalam masyarakat pesisir Aceh dan Nias. Bahkan, bagi masyarakat Aceh dan Nias, Panglima Laot memiliki pengaruh yang lebih besar dari kepala desa. Selain itu, Panglima Laot juga dilibatkan dalam proyek Green Coast sebagai juru penyelesai masalah jika terjadi konflik dalam masyarakat pesisir termasuk dalam pengelolaan mangrove.

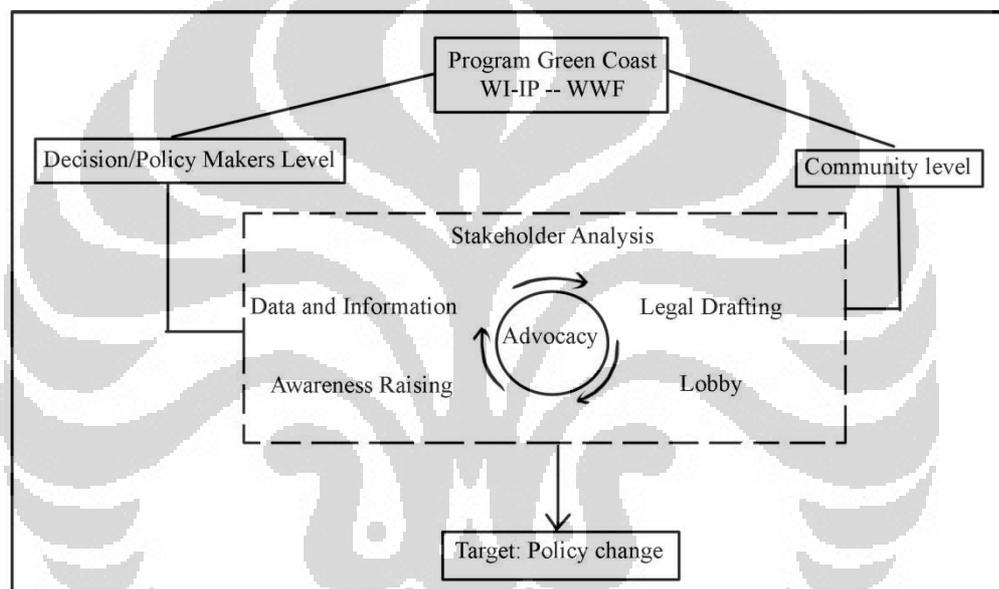
Accountability Politics

Strategi ini merupakan upaya untuk mengharuskan aktor yang kuat untuk bertindak sesuai dengan prinsip yang sudah mereka sahkan secara formal. Dalam hal ini, indikator dalam *accountability politics* adalah adanya advokasi kebijakan. Dalam proyek Green Coast, WI-IP bekerjasama dengan WWF mengambil kesempatan untuk melakukan advokasi kebijakan untuk mendorong adanya kebijakan yang mendukung keberlangsungan ekosistem pesisir di Aceh dan Nias.

Advokasi kebijakan yang dilakukan dalam proyek ini setidaknya menggunakan dua pendekatan, yaitu di tingkat pengambil kebijakan dan di tingkat masyarakat. Di level pengambil kebijakan, advokasi kebijakan dilakukan dengan memberikan input untuk pembuatan kebijakan melalui dokumen analisis kebijakan dan kebutuhan, hak, dan pandangan masyarakat. Di level masyarakat,

advokasi kebijakan dilakukan dengan pertemuan desa, workshop lokal, pelatihan, ‘roadshow’ untuk mengumpulkan input lokal dan di saat yang bersamaan menyediakan kebijakan untuk mendukung masyarakat. Pada dasarnya analisis kebijakan terhadap manajemen sumberdaya pesisir di Aceh dan Nias dilakukan untuk *me-review* apakah kebijakan yang sudah ada; pertama, telah mengakomodasi kebutuhan untuk mendorong rekonstruksi dan rehabilitasi; kedua, relevan dengan kondisi setelah tsunami; ketiga, memastikan manajemen sumberdaya alam dan *livelihoods* masyarakat pesisir yang berkelanjutan.

Gambar 7. Strategi *accountability politics* dalam proyek Green Coast¹¹⁸



Dalam analisis kebijakan, setidaknya telah dilakukan analisis kebijakan terhadap 40 kebijakan pemerintah dan hukum adat laot. Kebijakan advokasi dilakukan dengan dua pendekatan, untuk memastikan bahwa kebijakan nantinya mengakomodir tidak hanya kebutuhan masyarakat pesisir tetapi juga keberlangsungan ekosistem pesisir. Analisis kebijakan yang telah dilakukan ditambah dengan dimasukkannya hasil-hasil asesmen dihasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk adanya perubahan kebijakan. Dari analisis kebijakan, disimpulkan terdapat beberapa kelemahan substansial antara lain *resources use-*

¹¹⁸ Skema strategi *accountability politics* dikembangkan peneliti untuk mempermudah menganalisa strategi *accountability politics* WI-IP dalam proyek Green Coast.

oriented, capital-oriented, state-based resources management, sectoral coastal management (tidak terintegrasi).

Rekomendasi-rekomendasi yang ada kemudian dipublikasikan dalam bentuk dokumen analisis kebijakan. Sudah terdapat dua dokumen analisis yang dihasilkan, yaitu “dokumen analisis kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan provinsi NAD”, “dokumen analisis kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan provinsi Sumatera Utara”. Dokumen ini kemudian diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Qanun Pengelolaan Pesisir. Qanun merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi NAD. Penyusunan Qanun dilakukan dan dihasilkan “naskah rancangan Qanun Provinsi NAD tentang pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Sebelumnya, juga sudah dihasilkan panduan kebijakan rekonstruksi hijau (*Green Reconstruction Guidelines*) untuk Aceh yang bertujuan membantu menyediakan perlindungan alamiah terhadap tsunami dan kejadian alam ekstrim di masa mendatang. Panduan ini mendapatkan respon positif dari berbagai pihak baik di Indonesia maupun Internasional. Petunjuk pelaksanaan ini memberikan kesempatan bagi para pengambil keputusan dan kebijakan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan dan memastikan bahwa hasil rekonstruksi dapat bertahan lama dan didukung oleh pemangku kepentingan setempat.

Melihat teori Sikkink dan Keck, dapat terekplor dalam proyek *Green Coast* ini WI-IP menggunakan tiga strategi yaitu *information politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. Sedangkan *symbolic politics* tidak terpenuhi karena tidak adanya penggunaan simbol-simbol untuk menaikkan isu. Dari penjelasan di atas, terlihat ketiga strategi ini merupakan inti dari kegiatan, dimana strategi ini mendorong pencapaian tujuan proyek *Green Coast*. Terlihat bahwa *information politics* menjadi basis atau dasar dari kegiatan advokasi yang dilakukan. Dengan mengumpulkan informasi dan fakta, WI-IP berhasil menghasilkan input dan rekomendasi untuk pelaksanaan rehabilitasi dengan menggabungkan upaya

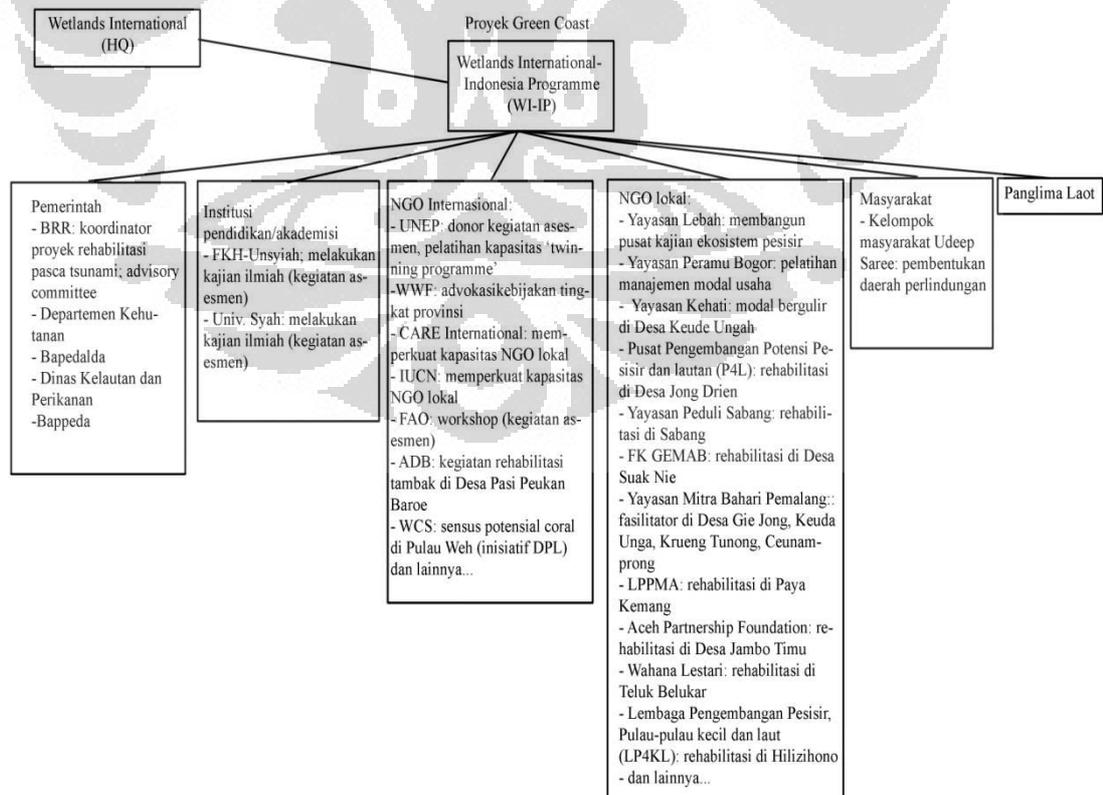
pengembangan mata pencaharian untuk masyarakat pesisir. Tidak hanya itu, dengan data dan informasi yang terkumpul dapat menjadi bahan untuk melakukan strategi *accountability politics* untuk melakukan advokasi kebijakan.

Apabila melihat kembali, pada dasarnya strategi ini menjelaskan pula strategi global Wetlands International dalam melakukan advokasi. Strategi global Wetlands Internasional bisa tergambarkan melalui segitiga yaitu dengan komponen *science*, *practice*, dan *policy*. Dalam hal ini, pengalaman praktis lapangan dengan basis pengetahuan secara tidak langsung akan meningkatkan kebijakan. Dalam komponen *practice*, pengalaman lapangan akan mendukung kerja advokasi. Kegiatan lapangan akan memunculkan pengalaman-pengalaman terbaik (*best practices*). Melalui pengalaman-pengalaman inilah dapat dilakukan perubahan dalam kebijakan privat dan publik. Sedangkan dalam komponen *science*, pengetahuan merupakan alat untuk advokasi. Dalam hal ini, menggunakan basis pengetahuan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dan menarik perhatian kepada isu yang sedang dibahas. Sedangkan untuk komponen *policy*, dengan basis *practice* dan *science* terlibat langsung dalam meningkatkan kebijakan pemerintah. Hal ini dilakukan dengan menyediakan dukungan teknis untuk melakukan advokasi dan kampanye media.

4.2. Jejaring

Bencana tsunami yang telah menghantam Aceh dan Nias pada tahun 2004 telah menyedot perhatian internasional. Berbagai bantuan dan program banyak dilakukan untuk merekonstruksi Aceh dan Nias. WI-IP merupakan merupakan salah satu NGO yang ikut dalam merehabilitasi Aceh khususnya merehabilitasi ekosistem pesisir melalui proyek Green Coast. Dalam proyek Green Coast terdapat banyak pihak yang ikut bekerja sama sehingga terbentuk *networking*. Jejaring atau *networking* yang terjalin dapat terlihat dari sinergi kerja sama antara WI-IP dengan mitra kerjanya yaitu dari pemerintah dan NGO internasional/lokal, seperti yang tergambar pada bagan dibawah. Bagan tersebut memperlihatkan banyaknya aktor yang terlibat dalam upaya rehabilitasi ekosistem pesisir dan

pengembangan mata pencaharian masyarakat pesisir Aceh dan Nias. Pemerintah Indonesia segera melakukan tindakan setelah bencana tsunami menghantam Aceh pada tahun 2004, salah satunya adalah membentuk BRR. BRR merupakan representasi dari pemerintah yang secara khusus bertanggungjawab dalam pengkoordinasian serta pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh dan Nias. Oleh karena itu, kerjasama dan komunikasi dengan BRR sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan yang dilakukan BRR atau pun dengan proyek lainnya. Hal ini dicapai dengan membuat laporan yang secara rutin dikirim ke BRR. Kerjasama dengan BRR dilakukan melalui berbagai lokakarya dan pertemuan-pertemuan. BRR juga dimasukkan dalam *advisory committee* untuk mengawasi transparansi proyek Green Coast. Dalam *advisory committee* ini juga terdiri dari Panglima Laot, WALHI, Bapedalda, Departemen Kehutanan, dan penasihat dari organisasi perempuan dan gender. *Advisory committee* juga dibentuk untuk mengarahkan jalannya proyek dan juga berperan dalam seleksi proposal *small grant*.



Proyek Green Coast ini melibatkan instansi resmi lainnya seperti Dinas Kehutanan dan Perikanan, dan Bappeda. Selain itu, WI-IP juga melibatkan akademisi seperti FKH-Unsyiah dan Universitas Syah yang lebih terfokus pada kajian ilmiah di dalam kegiatan asesmen. Pelibatan institusi pendidikan ini juga mempermudah akses WI-IP dalam mengumpulkan data dan informasi. WI-IP juga menggandeng NGO internasional lainnya seperti UNEP, WWF, CARE Internasional, dan lainnya. WI-IP sendiri merupakan NGO lingkungan yang sudah lama aktif dalam melakukan kegiatan konservasi dan sudah memiliki koneksi yang kuat dengan NGO internasional lainnya, sehingga WI-IP dapat dengan mudah mengajak NGO internasional lainnya untuk terlibat dalam proyek ini. Selain NGO internasional, WI-IP juga melibatkan NGO lokal, NGO lokal yang terlibat dalam proyek ini dapat terbilang cukup banyak. Dimana, NGO lokal lebih berperan dalam fasilitator bagi masyarakat pesisir Aceh dan Nias dalam merehabilitasi ekosistem pesisir dan mengembangkan mata pencaharian.

Keterlibatan NGO lokal yang cukup banyak di satu sisi dapat menguntungkan namun di sisi lain bisa menjadi kelemahan atau kendala. Keterlibatan NGO lokal menjadi kekuatan atau menguntungkan karena banyaknya sumber daya manusia, dalam hal ini NGO lokal, akan lebih memudahkan dalam mengelola administrasi seperti laporan finansial dan juga memudahkan mengelola aktivitas di lapangan. Keterlibatan NGO lokal juga mempermudah untuk mendekati atau berkomunikasi dengan *stakeholders* lain seperti pemerintah, NGO lokal lainnya, dan donor. Namun, keterlibatan NGO lokal dapat menjadi kelemahan tersendiri. Hal ini terkait tidak fokusnya NGO lokal. Seringkali NGO lokal tidak fokus terhadap kegiatan mereka di lapangan karena mereka terlalu fokus dengan banyak isu lingkungan lainnya.

Oleh karena itulah, dalam proyek ini juga diadakan pelatihan kapasitas bagi NGO lokal. Selain keterlibatan NGO lokal, WI-IP juga melibatkan Panglima Laot. Keterlibatan Panglima Laot dalam proyek ini sangat penting, mengingat Panglima Laot merupakan aktor yang memiliki pengaruh kuat dalam masyarakat pesisir Aceh dan Nias. Selain keterlibatan aktor-aktor tersebut, keterlibatan masyarakat dalam proyek ini merupakan komponen yang terpenting. Pada dasarnya proyek ini

merupakan proyek yang mendorong bagaimana pengelolaan sumberdaya alam yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil membuka akses atau melibatkan secara langsung masyarakat Aceh yang tinggal di wilayah pesisir, dimana sebenarnya mereka sudah memiliki sistem yang sudah dipercaya turun menurun. Oleh karena itu, di sini panglima laot memiliki peran penting. Keterlibatan masyarakat dilakukan mulai dari pengadaan benih, penanaman bibit dan pemeliharaannya. Dalam hal ini, masyarakat bertanggungjawab untuk merawat tanaman yang telah ditanam. Untuk 'mengikat' dan menarik masyarakat diberikan semacam dana hibah yang dapat digunakan untuk menciptakan alternatif mata pencaharian. Keterlibatan banyak pihak mengharuskan adanya koordinasi yang solid. Namun, inilah yang sering menjadi kendala. Salah satu kendala yang dihadapi dalam proyek Green Coast ini adalah koordinasi dan komunikasi yang tidak sempurna diantara aktivitas di lapangan. Setiap mitra kerja lebih terlihat bekerja sendiri terpisah dengan lainnya. Menurut hasil monitoring, tidak sedikit mitra kerja yang tidak tahu perkembangan aktivitas lainnya. Untuk menghadapi kendala ini, dilakukan penguatan jaringan melalui pertemuan dan pelatihan dengan jaringan KuALA. Jaringan KuALA sendiri memfasilitasi komunikasi diantara mitra kerja, sehingga diharapkan dengan adanya KuALA ini, jaringan yang sudah terjalin selama proyek Green Coast dapat kuat.

4.3. Transformasi Masyarakat dan Penerapan Prinsip *Sustainable Development* dalam Proyek Green Coast

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh WI-IP dalam proyek Green Coast telah memberikan pengaruh atau dampak yang cukup signifikan. Pengaruh-pengaruh tersebut meliputi kebijakan, cara berpikir, dan sistem dalam masyarakat. Kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir yang dilakukan oleh WI-IP telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Dari hasil monitoring tercatat persentase tumbuh tanam melebihi 75 persen. Dengan tumbuh tanam melebihi 75 persen maka pinjaman modal yang diberikan kepada masyarakat diubah statusnya menjadi hibah sesuai dengan kontrak. Dalam kegiatan rehabilitasi ekosistem

pesisir ini, masyarakat menanam sejumlah tanaman diantaranya mangrove dan tanaman pantai lainnya.

Tabel 2. Luas mangrove sebelum dan sesudah intervensi

	Luas Kerusakan Mangrove sebelum intervensi	Mangrove Sesudah Intervensi (ha)
Simeulue	3.057	14
Aceh Wilayah Pesisir Barat	1.892	76
Aceh Wilayah Pesisir Utara	>165	163
Aceh Wilayah Pesisir Timur	>26.890	87
Nias		40
Total	32.004	380

Dari tabel di atas dapat terlihat masyarakat berhasil merehabilitasi mangrove seluas 380 ha dari luas kerusakan mangrove akibat tsunami seluas 32.004 ha. Dengan persentase hidup tanam dari mangrove yang direhabilitasi ini adalah 30 persen sampai 90 persen pada fase I dan 55,23 persen sampai dengan 90 persen pada kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir fase II. Upaya rehabilitasi ekosistem pesisir ini memberikan manfaat lingkungan yang cukup signifikan. banyak hutan pantai yang telah ditanami tanaman pantai dijadikan tempat wisata alam oleh penduduk desa setempat dan sekitarnya bahkan dikunjungi berbagai tamu dari negara-negara lain serta dijadikan objek penelitian. Upaya rehabilitasi ekosistem pasca bencana berupa penanaman mangrove dan hutan pantai juga turut mendukung program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global karena mangrove dan tanaman hutan pantai mengikat CO₂ dari atmosfer dan akan melindungi kawasan pemukiman dari kecenderungan naiknya muka air laut di wilayah pesisir. Terkait dengan hal ini, pada bulan November 2007, tim *study tour* Green Coast WI-IP telah melakukan latihan pengukuran jumlah karbon yang tersimpan dalam total cemara yang ditanam selama dua tahun, yaitu 91,16 ton CO₂. Selain itu, Azhar, salah satu ketua kelompok masyarakat, juga mengungkapkan dampak kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir Green Coast,

“...memasuki tahun ke-2 dan anggotanya (dalam kelompoknya) sudah 35 orang dan dukungan dan hibah untuk menggulirkan ekonomi mereka

sekitar 160 juta. Lebih dari 200 bakau telah ditanam dengan tingkat hidup lebih dari 80%. Bakau yang ditanam awal program ini telah mencapai ketinggian 2 meter.”

Kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir dalam proyek Green Coast merupakan kegiatan rehabilitasi yang memadukan upaya pengembangan mata pencaharian. Keberhasilan-keberhasilan kegiatan rehabilitasi di atas juga sempat menghadapi kendala. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, NGO dalam melakukan rehabilitasi pesisir menggunakan pendekatan masing-masing. Namun, kebanyakan NGO melakukan kegiatan rehabilitasi di Aceh dan Nias dengan pendekatan *cash for work*. Pendekatan-pendekatan ini ternyata telah memberikan pengaruh tersendiri terhadap cara berpikir masyarakat pesisir Aceh dan Nias. Melalui pendekatan *cash for work*, masyarakat dilibatkan melakukan kegiatan rehabilitasi pantai dengan cara dibayar tunai. Walaupun, kegiatan ini berhasil melibatkan masyarakat namun keberlangsungan terhadap tanaman yang telah ditanam tidak ada. Hal ini dikarenakan program *cash for work* tidak mewajibkan adanya perawatan bibit yang telah ditanam oleh peserta. Dimana, selesai kegiatan tanam maka selesai pula kegiatan mereka. Hal ini mengakibatkan banyak bibit yang mati. Oleh karena itu, kegiatan rehabilitasi dengan pendekatan ini hanya dinilai berhasil pada sisi pelibatan masyarakat, pemberian kesibukan bekerja dan perolehan uang. Pendekatan ini setidaknya telah memberikan perubahan pola berpikir masyarakat pesisir Aceh dan Nias. Masyarakat menjadi tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi apabila terdapat ‘insentif’ untuk mereka.

Walaupun proyek Green Coast juga menerapkan mekanisme finansial yang memberikan masyarakat pinjaman untuk pengembangan alternatif mata pencaharian, tidak sedikit masyarakat yang awalnya enggan untuk ikut berpartisipasi dalam proyek ini. Hal ini karena masyarakat terikat pada tanggungjawab pemeliharaan. Berbeda dengan pendekatan *cash for work* dimana masyarakat tidak terikat oleh tanggungjawab pemeliharaan. Selain itu, masyarakat juga memikirkan beban apabila tanaman mereka tidak berhasil mencapai persentase hidup sebesar 75 persen. Untuk itu, WI-IP melakukan sosialisasi terkait pendekatan ini dan juga melakukan peningkatan kesadaran agar

masyarakat mau terlibat aktif dalam kegiatan rehabilitasi. Walaupun kemudian masyarakat banyak terlibat dalam proyek ini, tidak dapat dipungkiri terdapat kelemahan dalam pendekatan ini yaitu adanya beban untuk mengembalikan pinjaman apabila masyarakat tidak berhasil mempertahankan persentase hidup tanaman sesuai kontrak (biasanya diatas 75 persen). Hal ini yang harus menjadi perhatian bagi pengembangan mekanisme finansial lainnya. Untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi memang mudah dengan memberikan masyarakat insentif tetapi harus diperhatikan pula apakah mekanisme ini akan pada akhirnya memberikan beban kepada masyarakat. Pengikatan tanggungjawab masyarakat dalam pemeliharaan mungkin dapat dilakukan dengan cara lain dengan tidak memberikan beban tersendiri bagi masyarakat. Akan lebih baik apabila mekanisme ini lebih diperkuat dengan upaya peningkatan kesadaran (*awareness raising*) yang intens.

Selain itu capaian kegiatan proyek Green Coast lainnya dapat dilihat dari pengembangan mata pencaharian yang telah dilakukan. Sebelumnya, banyak masyarakat pesisir Aceh dan Nias yang mata pencahariannya adalah nelayan. Setelah tsunami, banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya. Dengan proyek Green Coast, dikembangkan beberapa alternatif mata pencaharian bagi masyarakat pesisir.

Tabel 3. Pengembangan Mata Pencaharian GC 1¹¹⁹

Category		Region	Total
Fishery	Capture fishery	Pulau Weh, Aceh Besar, Aceh Barat, Simeulue	13
	Aquaculture	Aceh Utara, Lhokseumawe, Sigli, Bireun, Aceh Besar, Aceh Barat	13
Agriculture	Secondary crops and horticulture	Aceh Barat, Aceh Besar	12
Animal	Poultry farming	Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie	4
husbandry	Ruminants/cattle	Nias, Sigli, Bireun, Aceh Besar, Aceh Barat	19
Small scale business	Trade, home industry	Aceh Besar, Aceh Barat	9
Ecotourism	Ecotourism	Aceh besar	3
TOTAL			73

¹¹⁹ *Ibid, An Assessment of Lesson Learnt from the Green Coast Project*, hlm 39

Tabel 4. Pengembangan Mata Pencaharian GC 2¹²⁰

Category		Percentage	Site
Fishery	Capture fishery	16	Anoi Itam, Iboih, Kajhu, Gle Jong, Ujong Drien
	Aquaculture	16	Krueng Tunong, Keude Ungah, Jambo Timu
Agriculture	Secondary crops & horticulture	16	Paya Kameng, Kajhu, Krueng Tunong, Suak Nie, Gampong Baro, Iboih,
Animal husbandry	Poultry farming	7	Gle Jong, Gampong Baro, Krueng Tunong, Keude Ungah
	Ruminants/cattle	25	Gampong Baro, Lam Ujong, Kajhu, Pulot, Krueng Tunong, Keude Ungah, Gle Jong, Bawonahono, Hilizihono Nias
Small scale	Small scale	15	Paya Kameng, Gampong Baro, Pineung Cabeng Iboih, Anoi Itam, Krueng Tunong, Keude Ungah, Gle Jong
Ecotourism	Ecotourism	5	Anoi Itam, Pulot, Gampong Baro. Gapang
TOTAL		100	

Dapat terlihat dari tabel di atas, telah dikembangkan beberapa alternatif mata pencaharian, pertanian, peternakan sapi, dan terdapat juga pengembangan ecotourism. Capaian positif dari rehabilitasi pesisir juga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat pesisir Aceh dan Nias. Di Desa Kajhu mulai ditemukan tirom sejenis kerang-kerang di akar tanaman mangrove. Tirom-tirom tersebut kini telah menambah pendapatn rumah tangga para pengumpul yang umumnya terdiri dari ibu-ibu. Hasil yang bisa didapat dari penjualan tirom, sehari bisa mencapai 20.000 sampai 25.000 rupiah. Di Desa Keude Unga, usaha tempe yang dikelola oleh kelompok masyarakat di desa tersebut mengalami kemajuan. Perhitungan kasar pendapatan dari usaha tempe tersebut mencapai 1,5 juta rupiah per bulan. Sedangkan si Desa Lam Ujong, menurut salah satu warga yaitu Pak Ridwan, mengungkapkan akibat rehabilitasi dalam satu malam bisa dihasilkan 3 kg kepiting.

Dari pengembangan mata pencaharian ini pada dasarnya telah memberikan pengaruh kepada sistem dalam masyarakat. Dalam hal ini, dapat terlihat terjadi perubahan dalam sistem ekonomi masyarakat. Semula masyarakat kebanyakan pergi melaut, sekarang banyak pilihan alternatif mata pencaharian yang dapat

¹²⁰ *Ibid, An Assessment of Lesson Learnt from the Green Coast Project*, hlm 57

dikembangkan oleh masyarakat. Tentu saja perubahan yang mencolok adalah bagaimana pengembangan mata pencaharian ini juga sejalan dengan pelestarian ekosistem pesisir.

Capaian kegiatan rehabilitasi proyek Green Coast juga dapat terlihat dari kebijakan. Kegiatan advokasi kebijakan yang telah dilakukan dalam proyek Green Coast telah memberikan pengaruh terhadap kebijakan provinsi NAD. Hal terutama terkait dengan kebijakan dalam pengelolaan ekosistem pesisir. Yang menarik adalah upaya penggabungan hukum adat laot ke dalam kebijakan terkait pengelolaan pesisir dan kelautan pemerintah Aceh. Dari hasil review kebijakan yang dilakukan tidak ada integrasi antara kebijakan pemerintah dengan hukum adat laot. Hukum adat laot sendiri sudah berdiri selama 400 tahun lamanya dalam masyarakat Aceh.

Tabel 5. Kebijakan Pemerintah Provinsi NAD dan Hukum Adat Laot

Compare & Contrast		
No	Government Law	Sea Traditional Law
1	Authority overlaps among sectors, among government levels and among areas	The sea environment is managed by the traditional institution led by the sea commander. The management system is based on local wisdom.
2	Sectoral and generally are not integrated	Managed together by the fishermen communities & led by the sea commander: Panglima Laot
3	Most of them cannot be implemented due to the absence of operational regulations	The management system is practiced over generations and turns to be successful in each community area
4	Have not accommodated women interest	No traditional regulations that specifically accommodate women interest in the coastal/sea area.
5	Have not involved the community actively, especially the coastal community in each policy process, from planning, execution to supervision.	The management is done collectively by the fishing community, from planning, executing, to supervising which is done by the sea commander/Panglima Laot.

Dari tabel di atas dapat dilihat bagaimana kebijakan pemerintah provinsi dan hukum adat laot terkait pengelolaan pesisir. Adanya memasukkan hukum adat laot ke dalam kebijakan pemerintah provinsi setidaknya dapat menciptakan sebuah kebijakan yang lebih mengakomodir aspirasi masyarakat. Selain itu, dalam kebijakan pengelolaan pesisir ini juga perlu mengakomodir peran perempuan dimana hal ini tidak ditemukan dalam kebijakan pemerintah provinsi dan hukum adat laot. Hasil yang telah dicapai seperti yang telah disebutkan di atas adalah dokumen analisis kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan

provinsi NAD dan Sumatera Utara, dan dilanjutkan dengan naskah rancangan Qanun Pengelolaan Pesisir.

Pengaruh-pengaruh kegiatan proyek Green Coast (cara berpikir, sistem dan kebijakan) ini secara tidak langsung telah mengubah perilaku masyarakat pesisir Aceh dan Nias terhadap keberlangsungan ekosistem pesisir. Masyarakat merupakan ujung tombak dalam kegiatan rehabilitasi. Kesadaran mereka terhadap pentingnya ekosistem pesisir perlu ditingkatkan untuk terus menjaga keberlangsungan ekosistem pesisir. Terkait dengan kesadaran lingkungan, biasanya akan terjadi naik turun. Ketika permasalahan lingkungan diangkat menjadi sebuah isu, banyak pihak yang antusias untuk melakukan upaya kegiatan perbaikan lingkungan seperti dalam hal ini menanam mangrove, menanam tanaman pantai, dan kampanye lingkungan. Berbagai kegiatan ini secara langsung menstimulasi masyarakat untuk tahu dan sadar akan pentingnya menjaga keberlangsungan lingkungan. Namun, ketika isu lingkungan ini menurun, maka kesadaran masyarakat juga ikut menurun.

Seperti Dalam kasus proyek Green Coast, pada dasarnya kesadaran masyarakat pesisir mulai meningkat akibat tsunami itu sendiri. Setelah tsunami, hampir semua nelayan baik nelayan tangkap, maupun budidaya merasa hutan bakau sangat bermanfaat baik dari segi perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun dari segi aspek kehidupan lainnya, misalnya sebagai benteng pelindung pantai dan pemukiman. Seperti salah seorang petambak di Desa Kandang Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe, melaporkan bahwa, ketika terjadi hantaman gelombang tsunami, keberadaan mangrove di depan tambaknya ternyata telah menyelamatkan tambak dan perumahan penduduk di belakangnya. Namun, tidak sedikit pula masyarakat yang masih memiliki kesadaran yang rendah terhadap keberlangsungan ekosistem pesisir setelah tsunami menerjang wilayah mereka. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat, WI-IP melakukan serangkaian kegiatan *awareness raising*. Kegiatan ini setidaknya dapat mengubah sebagian perilaku masyarakat pesisir Aceh dan Nias. Hal ini dapat

terlihat dari semakin tingginya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya ekosistem pesisir, seperti yang diungkapkan beberapa masyarakat,¹²¹

“...bisa melindungi desa dari angin kencang, air pasang, tanah kan ga longsor.”
(Azhar)

“mangrove paling manfaat karena ini cara kami cari uang bukan untuk hari ini tapi ke depan”
(Abdul Wahab)

“...saya pengen 20 tahun ke depan harus kita membangun (ekosistem pesisir) harus kita nampak bagus.”
(Suryadi, Kepala Desa Krueng Tunong)

“...dulu kami menanam bibit segala macamlah, sekarang masih merawat juga kami.”
(Syarifah)

Adanya advokasi kebijakan yang dilakukan selama proyek Green Coast juga membawa dampak yang cukup besar diantara pemangku kebijakan. Seperti, telah dideklarasikan Moratorium Logging oleh Gubernur Provinsi NAD pada tanggal 6 Juni 2007. Selain itu juga dikembangkan konsep “*Green Province*”. Namun, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, apabila isu permasalahan lingkungan menurun maka kesadaran masyarakat akan ikut menurun, dalam hal ini dikhawatirkan apabila proyek-proyek rehabilitasi ekosistem pesisir berakhir maka kesadaran masyarakat untuk menjaga dan merawat ekosistem pesisir menurun. Oleh karena itu, untuk tetap meningkatkan kesadaran masyarakat yang telah terbentuk dalam proyek Green Coast, dibentuklah jaringan KuALA yang tetap melaksanakan tugas-tugasnya termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat walaupun proyek Green Coast ini telah berakhir. Penyadaran masyarakat dilakukan melalui pembangunan wacana dan diskusi-diskusi kecil. Jaringan KuALA ini menjadi *exit strategy* untuk menjaga keberlangsungan ekosistem pesisir Aceh dan Nias.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, proyek Green Coast merupakan proyek yang bertujuan untuk merehabilitasi ekosistem pesisir dan mengembangkan mata pencaharian bagi masyarakat pesisir Aceh dan Nias. Dalam

¹²¹ Dikutip dari Film *Peuseulamat Pante Tanyoe (Selamatkan Pesisir Kita)*

hal ini, WI-IP menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proyek Green Coast. Adapun prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang dapat terlihat dalam proyek ini antara lain, pertama prinsip partisipasi publik dan akses informasi dan keadilan. Dalam proyek Green Coast ini terlihat jelas masyarakat merupakan pelaksana utama di lapangan. Dalam artian, keberhasilan proyek ini sangat tergantung dari partisipasi masyarakat Aceh dan Nias. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Oxfam menunjukkan bahwa proyek Green Coast merupakan salah satu proyek yang dapat dijadikan contoh yang baik dalam pengembangan partisipasi publik. Kedua, prinsip integrasi dan saling keterkaitan khususnya berhubungan dengan tujuan hak asasi manusia dan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Prinsip ini juga terlihat jelas diterapkan oleh WI-IP dalam proyek Green Coast. Dengan pendekatan bio-rights, proyek ini tidak hanya bertujuan untuk melakukan upaya untuk merehabilitasi ekosistem pesisir namun juga menggabungkan dengan upaya-upaya pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan mengembangkan alternatif mata pencaharian yang memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Dalam hal ini, sebisa mungkin mata pencaharian masyarakat ekonomi tidak merusak lingkungan atau ekosistem pesisir masyarakat itu sendiri. Di sini dapat terlihat terdapat upaya untuk mengintegrasikan ekonomi dan lingkungan, dimana hak-hak asasi manusia dalam hal ini hak-hak masyarakat ekosistem pesisir terhadap sumberdaya alam tetap diperhatikan.

Selain itu, dari kegiatan pengembangan mata pencaharian dalam proyek ini juga menerapkan prinsip keadilan dan pemerangan terhadap kemiskinan. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya dilibatkan dalam pemberian pinjaman modal untuk mengembangkan mata pencaharian, tetapi juga meningkatkan kapasitas mereka, dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Dengan menggunakan pendekatan bio-rights, WI-IP juga secara tidak langsung menerapkan prinsip internalisasi biaya lingkungan (*internalisation of environmental cost and incentive mechanism*) atau lebih khususnya menerapkan *incentive mechanism*. Mekanisme ini merupakan sebuah pendekatan untuk melibatkan pihak-pihak untuk ikut dalam mendorong mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya insentif, pihak-pihak akan lebih tertarik untuk terlibat dalam upaya pembangunan

berkelanjutan. Dalam proyek ini, kita melihat pendekatan ini memang menarik sebagian masyarakat pesisir Aceh dan Nias, namun tidak sedikit pula masyarakat yang ragu karena beban tanggungjawab pemeliharaan yang harus ditanggung masyarakat. Dalam hal ini, perlu dikembangkan lebih lanjut mekanisme-mekanisme yang tidak terlalu membebankan masyarakat pada akhirnya. Dalam proyek ini, WI-IP juga menerapkan prinsip kewajiban negara untuk menjamin penggunaan yang berkelanjutan atas sumberdaya alam. Penerapan prinsip ini dapat dilihat dari upaya advokasi kebijakan yang dilakukan dalam proyek ini. Di sini pemerintah diajak untuk lebih peka dalam isu lingkungan yang tertuang dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Secara keseluruhan proyek ini juga menerapkan prinsip perlindungan keragaman hayati. Tujuan dari proyek Green Coast adalah merehabilitasi ekosistem pesisir Aceh dan Nias yang rusak akibat tsunami. Dengan menggabungkan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat diharapkan masyarakat menjadi aktif terlibat dalam kegiatan rehabilitasi. Selain itu, dengan melakukan kegiatan peningkatan kesadaran diharapkan masyarakat semakin peduli dan mau merawat ekosistem pesisir ini secara berkelanjutan. Prinsip perlindungan keragaman hayati merupakan prasyarat bagi berhasilnya pelaksanaan prinsip keadilan antargenerasi. Dalam hal ini, potensi keragaman hayati memberikan arti penting bagi kesinambungan kehidupan umat manusia. Semakin besar kerusakan atau pun kepunahan keragaman hayati maka akan berdampak terhadap keberlangsungan kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, apabila prinsip perlindungan keragaman hayati dapat diterapkan dan diwujudkan maka prinsip keadilan antargenerasi dapat diwujudkan pula. Dapat terlihat upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan oleh NGO dan diterapkan dalam sebuah proyek. Dalam hal ini, WI-IP membantu mendorong mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam proyek Green Coast di Aceh dan Nias, dimana prinsip-prinsip pembangunan diterapkan dalam kegiatan-kegiatan proyek.

BAB V

Kesimpulan

Secara garis besar, penelitian ini ingin membahas mengenai peran *non-governmental organisation* (NGO) dalam merehabilitasi ekosistem pesisir dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Aceh dan Nias pasca tsunami. Dalam hal ini, Wetlands International – Indonesia Programme (WI-IP) merupakan salah satu NGO yang melakukan kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir Aceh dan Nias yang rusak akibat tsunami. Kegiatan rehabilitasi yang dilakukan WI-IP, proyek green coast, tidak hanya melakukan upaya rehabilitasi ekosistem pesisir namun juga menggabungkan dengan upaya mengembangkan mata pencaharian untuk masyarakat Aceh dan Nias. Dalam penelitian ini, digunakan teori Keck dan Sikkink untuk mengeksplor strategi WI-IP dan capaian kerja dalam proyek ini.

Temuan-temuan dari penelitian ini memperlihatkan tiga poin utama. Pertama, teori Keck dan Sikkink terkait tipologi strategi dan taktik yang digunakan dalam jejaring dapat menjelaskan atau mengeksplor strategi WI-IP dalam proyek green coast. Dalam hal ini, WI-IP menggunakan tiga strategi yaitu, *information politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. Dalam *information politics*, WI-IP melakukan berbagai kegiatan terkait pengumpulan data dan penyebaran data dan informasi terkait kondisi ekologi dan kondisi sosial-ekonomi. Sedangkan dalam *leverage politics* secara langsung WI-IP melibatkan aktor yang memiliki pengaruh kuat dalam masyarakat pesisir Aceh dan Nias, yaitu Panglima Laot. Untuk strategi *accountability politics*, WI-IP bekerjasama dengan WWF dalam melakukan upaya dalam mengembangkan kebijakan yang lebih memperhatikan keberlangsungan ekosistem pesisir.

Kedua, terkait capaian kerja dari WI-IP. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi berhasil mempertahankan tumbuh tanaman sebesar lebih dari 75 persen. Selain itu, dengan kegiatan *small grant* telah banyak dikembangkan beberapa mata pencaharian yang mendorong pertumbuhan masyarakat pesisir Aceh dan Nias. Kemudian, capaian kerja WI-IP juga dapat dilihat dari kegiatan advokasi yang menghasilkan beberapa dokumen analisis kebijakan terkait strategi

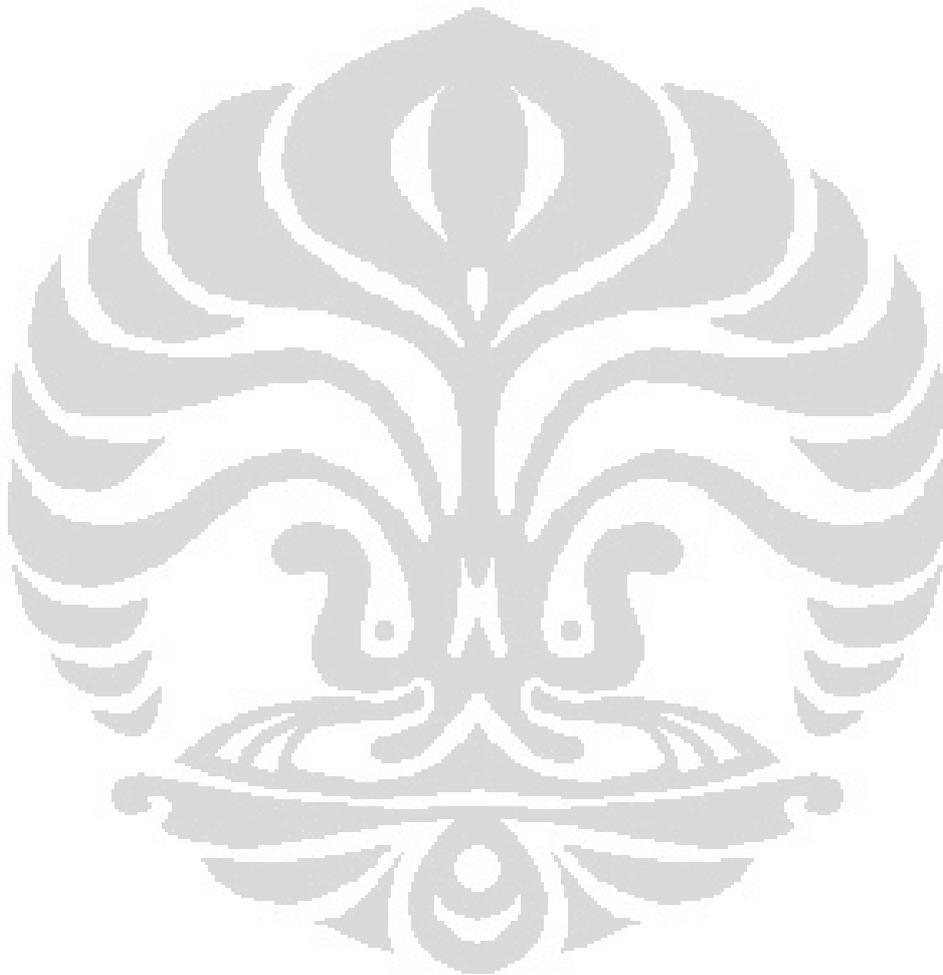
pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan. Selain itu, capaian kerja WI-IP dapat terlihat dari kesadaran masyarakat pesisir terhadap pentingnya ekosistem pesisir. Temuan ketiga terkait kendala. Kendala yang dihadapi WI-IP meliputi rendahnya minat dan persepsi masyarakat terhadap kegiatan rehabilitasi bagi sebagian masyarakat Aceh dan Nias. Sebagian masyarakat yang cenderung tertutup dan memiliki rasa curiga yang berlebihan terhadap para pendatang membuat WI-IP harus melakukan upaya sosialisasi dan bahkan melibatkan aktor yang berpengaruh dalam masyarakat. Selain itu, kegiatan rehabilitasi sebelum proyek green coast, seperti program *cash for work*, membuat WI-IP harus melakukan penyesuaian-penyesuaian lebih lanjut dalam proyek ini.

Penelitian ini pada dasarnya juga ingin mengkaji permasalahan Aceh dan Nias pasca tsunami dengan pendekatan yang berbeda yaitu dengan pendekatan lingkungan. Masyarakat ekosistem pesisir Aceh dan Nias seringkali tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, dalam hal ini terkait perekonomian mereka. Tingkat kemiskinan ada di pesisir, dimana menjadi penyumbang terbesar selain di daerah pedalaman. Dalam hal ini, masyarakat pesisir secara tidak sadar akan terus mengeksploitasi sumberdaya pesisir tanpa memperhatikan keberlangsungan ekosistem pesisir ini. Padahal ekosistem memberikan banyak manfaat kepada masyarakat ini. Oleh karena itu perlu untuk menjaga ekosistem pesisir ini jauh lebih baik dan bisa dinikmati oleh generasi mendatang paling tidak ekonomi masyarakat juga akan tumbuh.

Dalam penelitian ini juga terlihat bahwa pembangunan berkelanjutan dapat diimplementasikan dalam proyek Green Coast. Dalam hal ini, WI-IP secara tidak langsung menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kegiatan-kegiatan proyek Green Coast. Kendala dalam penelitian ini adalah keterbatasan dalam melihat semua aspek. Hal ini terkait skala program yang tidak tersebar ke seluruh wilayah Aceh. Sehingga keberhasilan yang dicapai oleh WI-IP tidak dapat mewakili keberhasilan keseluruhan wilayah Aceh.

Pada akhirnya, penelitian ini terbuka untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Saran kedepan, topik-topik yang menarik untuk dikaji lebih lanjut seperti dampak kegiatan rehabilitasi NGO terhadap kesadaran masyarakat terhadap

ekosistem pesisir, atau pun terkait advokasi NGO terhadap kebijakan pemerintah yang tidak mendukung keberlangsungan lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam, William Mark. 1990. *Green Development: Environment and Sustainability in the Third World*. London: Routledge.
- Blaikie, P. and S. Jeanrenaud. 1997. "Biodiversity and Human Welfare". *Social Change and Conservation: Politics and Impacts of National Parks and protected Areas*. London: Earthscan.
- Bryant, Bunyan. 1995. *Environmental Justice: Issues, Policies, and Solutions*. U.S.: Island Press
- Buckingham, Susan dan Mike Turner. 2008. *Understanding Environmental Issues*. London: Sage Publication Ltd.
- Hanley, N J F Shogren, B White. 2001. *Introduction to Environmental Economics*. New York: Oxford University Press.
- Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Depok: DIA FISIP UI.
- Keck, Margaret E. dan Kathryn Sikkink. 1998. *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- O'Neill, Kate. *The Environment and International Relations*. UK: Cambridge University Press.
- Pellow, David Naguib. 2007. *Resisting Global Toxics*. The MIT Press: Cambridge, Massachusetts.
- Welch, Claude E. 1995. *Protecting Human Rights in Africa: Roles and Strategies of Non-governmental Organizations*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Jurnal

- Betsill, Michele M. dan Elisabeth Corell. 2001. "NGO Influence in International Environmental Negotiations: A Framework for Analysis". *Global Environmental Politics*. Massachusetts Institute of Technology.
- Bishop, Joshua Sachin Kapila, Frank Hicks, Paul Mitchell dan Francis Vorhies. 2008. *Building Biodiversity Business*, London: Shell International Limited and the International Union for Conservation of Nature.
- Brown, Katrina. 2002. "Innovations for Conservation and Development". *The Geographical Journal*. Vol. 168. No.1.
- Desyana, Cut. "Green Coast Experience of coastal forest rehabilitation towards ecosystem and livelihood sustainability".
- Eye on Aceh. 2006. *Sebuah Agenda Rakyat? Bantuan Pasca Tsunami di Aceh*.
- Gough, Clair and Simon Shackley. 2001. "The Respectable Politics of Climate Change: The Epistemic Communities and NGOs". *Royal Institute of International Affairs 1944*. Vol. 77. No. 2.
- Hulme, D. and M. Murphree. 1999. "Communities, wildlife and 'new conservation". *Africa Journal of International Development*. Vol.11.
- Jakobsen, Susanne. "International Relations and Global Environmental Change". *Cooperation and Conflict*. Vol. 34(2). London: Sage Publications.
- Kates, Robert W Thomas M Parris dan Anthony A Leiserowitz. "What is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice". 2005. *Environment: Science and Policy for Sustainable Development*. Vol.47. No.3.
- Kurniasari, Telly. 2007. "Twinning Program: Program Studi Banding untuk kelompok Masyarakat Binaan Aceh ke Pemalang (Jawa Tengah)". *Warta Konservasi Lahan Basah*.

- Mitcham, Carl. "The Concept of Sustainable Development: Its origins and Ambivalence". *Technology in Society*. 1995. Vol.17. No.3. USA: Elsevier Science Ltd.
- Nelleman, C dan E. Corcoran (eds). 2010. *Dead Planet, Living Planet – Biodiversity and Ecosystem Restoration for Sustainable Development: A Rapid Response Assessment*. United Nations Environment Programme. Norway: Birkeland Trykkeri AS.
- Purba, Gandi Y. S. "Peran Laut dan Ekosistem Pesisir dalam Mengurangi Pemanasan Global", dalam *Warta Konservasi Basah*, Juli 2009
- Rechtschaffen, Clifford Eileen Guana, dan Catherine A. O'Neill. 2005. "Environmental Justice". *Publication of Golden Gate University School of Law*.
- Sneddon, Chris, Richard B Howarth, Richard B Norgaard. 2006. "Sustainable Development in a Post-Brundtland World". *Ecological Economics*. Vol.57. USA: Elsevier Science Ltd.
- Streeten, P. "Non-governmental Organizations and Development". *Annals of the American Academy of Political and Social Science*. Vol. 554
- Sualia, Ita. 2007. "Program Pesisir Hijau Green Coast Project di Aceh-Nias untuk Menghadapi Perubahan Iklim Global". *Warta Konservasi Lahan Basah*, Vol.15. No.3.
- Sualia, Ita dan Eko Budi P. 2009. "Empat Tahun Partisipasi Proyek Green Coast dalam Upaya Rehabilitasi Pesisir". *Warta Konservasi Lahan Basah*.
- ."Lokakarya Program Rehabilitasi Pesisir Partisipatif dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat". *Warta Konservasi Lahan Basah*. Vol.15. No.2. 2007.

Laporan dan Publikasi

- Abdurrahman. 2003. "Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia". *Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*. Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 14-18 Juli 2003
- BRR. *Laporan Akhir BRR NAD-Nias: Perwakilan Nias 2005-2008*. Desember 2008.
- BRR. 2005. *Aceh dan Nias Setahun Setelah Tsunami: Upaya Pemulihan dan Langkah Ke Depan*.
- Broadhead, Jeremy and Robin Leslie. 2007. *Proceedings of the workshop on coastal forest rehabilitation and management in Asian tsunami-affected countries*. Bangkok: FAO Regional Office for Asia and the Pasific.
- Cahyo, Iwan Tri Wibisono dan I Nyoman N. Suryadiputra. 2006. *Hasil Pembelajaran dari Restorasi Mangrove/Ekosistem Pesisir Aceh dan Nias Pasca Tsunami*. Bogor: Wetlands International.
- Cahyo, Iwan Tri dan I Nyoman Suryadiputra. 2006. *Study of Lessons Learned from Mangrove/Coastal Ecosystem Restoration Efforts in Aceh since Tsunami*. Bogor: WI-P.
- Ejik, Pieter van dan Ritesh Kumar. 2008. *Bio-rights dalam Teori dan Praktek: Sebuah Mekanisme Pendanaan untuk Pengentasan Kemiskinan dan Konservasi*. Netherlands: Wetlands International.
- Sari, N. Fadia Miraika, Ferry Hasudungan, Lili Muslihat, dan Nyoman Suryadiputra, 2006. *Penilaian Data Lingkungan Pasca Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Bogor: WI-IP.
- Stanley Foundation. 1971. *Sixth Conference on the United Nations of the Next Decade*.

Suryadiputra, I Nyoman N. (ed.al). *Kajian Kondisi Lingkungan Pasca Tsunami di Beberapa Lokasi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias*. Bogor: WI-IP/CPSG/Univ.Syah Kuala.

Suryadiputra, I. N. N. I. T. C. Wibisono, Ita Sualia, dan Ferry Hasudungan. 2009. *Pengelolaan Lahan Basah Pesisir dan Pengurangan Resiko Bencana di Indonesia*. Bogor, WI-IP.

UNEP. *Integrating Environment and Development: 1992-2002*.

Wetlands International, *Annual Plan and Budget 2011*, (Netherlands: Wetlands International)

Wetlands International. *Wetlands International Strategic Intent 2005-2014*.

Wetlands International – Indonesia Programme. *Profile Flyers of WI-IP*. Bogor: Wetlands International – Indonesia Programme.

WI-IP. *Ringkasan Profil Kegiatan WI-IP 2005-2009*. Bogor: WI-IP.WWF.

“WWF-Indonesia Kantor Program Aceh: Lestirikan Keanekaragaman Hayati untuk Kesejahteraan Generasi Sekarang dan Masa Depan”. *Publikasi WWF*.

Wibisono, I.T. C. dan Ita Sualia. 2008. *An Assessment of Lessons Learnt from the “Green Coast Project” in Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Province and Nias Island, Indonesia, Period 2005-2008*. Bogor: WI-IP.

World Resources Institute (WRI). 2000. *World Resources 2000-2001: People and Ecosystems – The Fraying Web of Life*. Washington DC.

WWF. “Azhar Pengabdian Lingkungan Tanah Tsunami”. *Media WWF Salam*.

WWF. 2004. *Promoting Equitable Distribution of Conservation Costs and Benefits*.

“Rehabilitasi Ekosistem Pesisir di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya” *Green Coast: For nature and people after the tsunami*.

”Percontohan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir di Kawasan Kuala Gigeng Kabupaten Aceh Besar”. *Green Coast: For nature and people after the tsunami*

“4 Tahun Kemitraan LEBah dalam Kegiatan Rehabilitasi Pesisir di Kawasan Kecamatan Baitussalam dan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar”, *Publikasi Lebah*.

“Perlindungan Ekosistem Terumbu karang oleh Masyarakat bagi Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan di Pulau Weh/Sabang, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam”, *Green Coast: For Nature and People After Tsunami*.

Internet

Cahyandito, M. Fani. “Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi dan Ekologi: Sustainability Communication dan Sustainability Reporting”. Diakses dari http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/06/jurnal_lmfe_pemb_berkelanjutan-ekonomiekologi-sust_comm-sust_rep_fani.pdf.

WI-IP. “Organisation Profile”. Diakses dari <http://www.wetlands.or.id/profile.php>

Wetlands International. “Green Coast Goals”. Diakses dari <http://www.wetlands.org/Whatwedo/Ouractions2/GreenCoastscommunitybasedrestoration/GreenCoastTsunamiresponse/tabid/438/language/en-US/Default.aspx>

Wetlands International. “About Wetlands International”. Diakses dari <http://www.wetlands.org/Aboutus/tabid/54/Default.aspx>.

Wetlands International. “ Our Mission and Vision”. Diakses dari <http://www.wetlands.org/Aboutus/MissionVision/tabid/58/Default.aspx>.

Wetlands International. “Our Donors”. Diakses dari <http://www.wetlands.org/Aboutus/Networkpartnersanddonors/Donors/tabid/2017/Default.aspx>.

Wetlands International. "Our Association of Members". Diakses dari

<http://www.wetlands.org/Aboutus/Ourorganisation/Governance/AssociationofMembers/tabid/1200/Default.aspx>.

Wetlands International. "Changing Policies". Diakses dari

<http://www.wetlands.org/Whatwedo/Ouractions/GreenCoastscommunitybasedrestoration/GreenCoast2inAceh/Changingpolicies/Influencingcoastalinvestments/tabid/1197/Default.aspx>,

----- "Adiwiyata". Diakses dari

<http://www.menlh.go.id/category/program-unggulan/adiwiyata/>,

----- "Implementasi Komponen dan Standar Adiwiyata". Diakses dari

<http://www.menlh.go.id/implementasi-komponen-dan-standar-adiwiyata/>,

----- "BRR Luncurkan Program Penghijauan Pesisir". Diakses dari

http://www.e-aceh-nias.org/media_center/press_release.aspx?id=22&language=IN

----- "Financial Mechanisms for Poverty-Environment Issues: The Bio-rights System". Diakses dari www.bio-rights.org

Film dan Radio

WI-IP/WWF. 2009. *Film Dokumenter: Peuseulamat Pante Tanyoe (Selamatkan Pesisir Kita)*.

"Jaringan KuALA". *Talkshow Radio Rumoh PMI*. Tanggal 19 September 2010

"Pusat Kajian Ekosistem Pesisir (PKEP) Gampong Baro, Apa Saja Disana?", *Talkshow Radio Rumoh PMI 104FM*. Rabu 01 Desember 2010.

LAMPIRAN 1

Daftar Instansi Pemerintah yang Terlibat dalam Kegiatan Lingkungan di NAD

No	Instansi pemerintah
1	BPDAS Provinsi NAD
2	GERHAN BPDAS
3	Dishut Aceh Besar
4	Disbunhut Aceh Besar
5	Disbunhut Pidie
6	Disbunhut Aceh Jaya
7	Dishut buntrans Aceh Barat
8	Dishut Aceh Utara
9	Dishut Simeulue
10	Dishut Aceh Singkil
11	Dishunbut Bireun
12	Dinas PPPK
13	Dishut Aceh Barat Daya
14	Disbunhut Aceh Selatan
15	Dishut Aceh Timur
16	Dispertanhutbun Langsa
17	Dishutpertrans Gayo Lues
18	Dishutpertrans Nagan Raya
19	Disperhut Kota Sabang
20	Satker BRR Pesisir
21	Balai Penelitian Teknologi Pertanian NAD
22	Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan-IPB
23	Kementrian Lingkungan Hidup
24	Departemen Pertanian
25	Departemen Dalam Negeri
26	Departemen Kehutanan
27	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
28	BRR Perumahan
29	BRR
30	BRR Peternakan

LAMPIRAN 2

Daftar Donor yang Terlibat Dalam Kegiatan Lingkungan di NAD

No.	Donor
1	ADB (Asian Development Bank)
2	Australian Government
3	Belgian Government
4	Canadian Government
5	EC (European Commission)
6	Finland Government
7	Irish Government
8	Japanese Government
9	Netherlands Government
10	New Zealand Government
11	Norwegian Government
12	United States of America
13	UNESCO
14	WFP (World Food Programme)
15	UNDP
16	UNFPA (United Nations Fund for Population Activities)
17	FAO
18	ILO
19	France
20	Coca-Cola Beverages Ltd.
21	LAO PDR
22	American Red Cross
23	ECHO (European Commission Humanitarian Aid Office)
24	Alanis Morrisett
25	AJWS (American Jewish World Service)
26	AUSTCARE
27	Dell Foundation
28	DRI (Direct Relief International), USA
29	DLA Paper-Rudnick
30	Foundation de France
31	Gates Foundation
32	General Donations
33	Gerber
34	Goldman Sachs Japan
35	Hess
36	Jesuit International
37	Nike
38	Packard Foundation
39	Taiwanese Government
40	USAID
41	AUSAID
42	NOVIB
43	R & D STEVE Goode
44	FIGI – Bush-Clinton
45	FIGI – Bessemer Trust
46	Jessica Fund
47	Credit Suisse First Boston

48	Spanish Government
49	MDTF (Multi Donor Trust Fund)
50	American Public
51	Canadian Red Cross
52	AVON
53	TUC
54	NCBA
55	The Sun Media Corp
56	CBI
57	Boulton society
58	HSBC
59	Royal Danish Embassy
60	UN-Habitat
61	UNHCR
62	UNOCHA
63	UNICEF
63	WFP, UN Compound
64	WHO
65	World Bank KDP
66	Australian Red Cross
67	American Red Cross
68	Winrock International
69	UNEP/UNORC
70	PMO-ADB
71	Oxfam International

LAMPIRAN 3

Daftar NGO Internasional yang Terlibat dalam kegiatan Lingkungan NAD

No.	NGO Internasional
1	IRC
2	CARE International
3	IMC
4	WVI
5	Mercy Corpe International
6	AMURT
7	German Development through GTZ
8	CRS
9	DAI
10	Build Change
11	Plan International
12	World Relief
13	Cantas Network
14	Concern Worlwide
15	ACT International
16	IFRC
17	GTZ
18	JICA
19	WWF
20	Save the Children
21	PKSPL
22	WI-IP
23	Fauna and Flora International
24	ProFauna
25	ICRAF Meulaboh
26	CRS
27	WALHI NAD
28	Leuseur International Foundation
29	WCS
30	IBO
31	Grameen Foundation
32	JANNI, Japan
33	Operation Blessing
34	Trocaire
35	IBE
36	Family Care Indonesia
37	Kerkennactie
38	UMRA-UK
39	CRCWC
40	SV
41	UAA-APHEDA
42	Misereor
43	Oppotunity International
44	Compassion International
45	The Church of Jesus Christ of Latter day Saintss
46	MCC
47	KNH

48	Norlink
49	DEA
50	Tellunde Foundation
51	Opportunity International Deutschland
52	Opportunity International Australia
53	Cantas Portugal
54	DEC UK
55	CIDA
56	Penang Office for Humanitarian Development-Malaysia
57	Diaego
58	Malaysian Red Crescent
59	OFDA
60	DFID
61	Price Waterhouse Cooper
62	KOICA
63	ACIAR
64	CGI
65	Islamic Relief
66	OISCA
67	Atlas Logistique
68	CWS
69	Alisei
70	JICS
71	Community Habitat Finance International
72	IRC-Cardi
73	Global Environment Centre-Malaysia
74	Istituto Agronomico per l'Oltremare
75	CI
76	Habitat for Humanity
77	Helen Keller International
78	IFCRC
79	ICRC
80	Turkish Red Crescent
81	IOM
82	MSF
83	Reefcheck
84	IUCN
85	Zero to One Foundation
86	UPLINK
87	IFRC
88	UMCOR-NGO
89	Emergency Architech
90	BRCR
91	GenAssist
92	YEU
93	TGH
94	HIVOS
95	EU
96	IRG